

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian

##### 4.1.1 Profil Perusahaan SUARANTB.com



Gambar 4.1 Logo Media SuaraNTB.com (SuaraNTB, 2025)

SuaraNTB.com merupakan portal berita lokal yang dimiliki oleh PT Suara NTB Pers, yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post, dan berpusat di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Portal ini secara resmi didirikan oleh tim redaksi Harian Suara NTB dan memiliki tagline "Jendela NTB untuk Dunia" yang mencerminkan visi untuk menghubungkan isu-isu lokal dengan audiens baik nasional maupun internasional. Fokus pemberitaan Suarantb.com terutama meliputi berita ekonomi, dunia usaha, politik, budaya, pariwisata, dan kehidupan sosial di NTB. Media ini mengutamakan akurasi dan kepercayaan, menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik dengan verifikasi informasi yang ketat serta menjaga nilai-nilai luhur pers Indonesia. Struktur organisasi redaksinya terdiri dari pimpinan umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, hingga jurnalis daerah—yang menunjukkan jaringan liputan yang mencakup berbagai kabupaten di NTB. Semua anggotanya bekerja berdasarkan struktur editorial yang profesional dan independen. Suarantb.com muncul sebagai portal berita lokal yang signifikan di NTB yang mengedepankan pemberitaan ekonomi dan usaha, dengan struktur organisasi yang kokoh dan jangkauan pembaca yang luas. Data statistik terbaru dari 2023–2024 semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu media daring terpopuler di wilayah NTB.

#### 4.1.2 Profil Perusahaan detik.com



Gambar 4.2 Logo Media Detik.com (Detik.com, 2025)

Detik.com merupakan platform berita daring yang dikelola oleh PT Detik Inet, dan saat ini menjadi bagian dari grup media besar Transmedia, yang merupakan anak perusahaan dari Trans Corp di bawah naungan CT Corp, milik pengusaha nasional Chairul Tanjung. Kantor pusatnya terletak di Jakarta dan perusahaan ini berfokus pada penyampaian informasi dengan cepat dan akurat melalui platform digital.

Media ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1998, didirikan oleh sekelompok jurnalis yang sebelumnya bekerja di redaksi tabloid Detik dan Tempo, dengan visi untuk menyajikan berita tanpa adanya tekanan politik. Pada saat itu, iklim politik Indonesia sedang mengalami perubahan besar setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Dengan memanfaatkan teknologi internet yang mulai berkembang, mereka menciptakan media berbasis digital yang menyajikan berita secara real-time. Ciri khas utama detik.com adalah kecepatan dalam menyampaikan berita. Tim redaksinya dikenal mampu mempublikasikan berita dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi. Hal ini menjadikan platform ini sebagai sumber utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkini.

Detik.com memiliki berbagai saluran berita, seperti detikNews (berita umum dan politik), detikFinance (ekonomi dan bisnis), detikSport (olahraga), detikHot (hiburan), serta detikFood dan detikTravel. Selain melalui situs web, mereka juga tersedia dalam bentuk aplikasi mobile dan aktif di media sosial, menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Perusahaan ini juga mengembangkan layanan seperti detikX untuk laporan mendalam dan 20Detik untuk konten video pendek. Dengan jangkauan pembaca yang sangat besar dan strategi digital yang kuat, detik.com telah menjadi bagian penting dalam

perkembangan media online di Indonesia dan terus mempertahankan kepercayaan publik melalui jurnalisme yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab.

## 4.2 Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Artikel Berita 1 SUARANTB.com

Judul : PHRI NTB Minta Penyelesaian Krisis Air Bersih di Gili Trawangan Dipercepat

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 09 Oktober 2024

Ringkasan : Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, mendesak agar pemerintah daerah segera mengatasi krisis air bersih di Gili Trawangan, yang berpotensi merusak citra pariwisata internasional. Ia berpendapat bahwa respons pemerintah sangat lambat, meskipun Gili merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan bagi Lombok Utara. Masalah lain yang diangkat mencakup ketiadaan rumah sakit internasional serta pengelolaan sampah. Saat ini, distribusi air terganggu karena masalah hukum terkait izin penyediaan air. PHRI mendorong adanya solusi jangka panjang yang tidak merugikan sektor pariwisata.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Artikel 1 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	PHRI NTB Minta Penyelesaian Krisis Air Bersih di Gili Trawangan Dipercepat
	Lead	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini menyoroti krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan, Lombok Utara. Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi merusak citra pariwisata di mata internasional.
	Latar Informasi	Krisis air bersih melanda Gili Trawangan, yang merupakan destinasi pariwisata internasional dengan jumlah kunjungan harian mencapai 3.000 wisatawan. Distribusi air bersih terhambat akibat persoalan hukum terkait perizinan penyedia air.
	Kutipan	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB Ni Ketut Wolini: Kutipan tidak langsung: Krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan, Lombok Utara. Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan berpotensi merusak citra pariwisata di mata internasional. Wisata alam di Nusa Tenggara Barat. Sikap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam mencari solusi. Ia mempertanyakan mengapa sebuah pulau kecil seperti Gili Trawangan

		<p>tidak bisa menemukan solusi untuk masalah air bersih. PHRI menurutnya sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha hotel dan restoran di sana, Namun, menurut Wolini, solusi jangka panjang tetap berada di tangan pemerintah daerah. Kuliner khas Lombok Barat</p> <p>Ditambahkannya, krisis air bersih di gili Trawangan ini dalam jangka panjang akan berdampak langsung kepada investasi hotel restoran yang sudah tertanam disana.</p> <p>Selain itu, beberapa permasalahan lain yang juga menjadi sorotan Ketut Wolini adalah belum adanya rumah sakit bertaraf internasional di Gili Trawangan sebagai pelengkap fasilitas pendukung destinasi wisata kelas dunia ini. Ada juga masalah sampah yang semakin menggunung belum mendapat solusi yang efektif.</p> <p>Wolini menambahkan, seharusnya, dengan PAD yang cukup besar diterima Pemda dari gili-gili, dapat disisihkan untuk mendukung fasilitas penunjang gili Tramen. Jika diharapkan Gili Tramen eksis dalam jangka panjang. Kuliner khas Lombok Barat</p> <p>Kutipan langsung</p> <p>“Setiap harinya, Gili Trawangan bisa dikunjungi oleh 3.000 wisatawan dan dominan adalah wisatawan asing. Bayangkan jika masalah air ini tidak segera diatasi, tentu akan berdampak sangat besar pada sektor pariwisata kita.”</p> <p>“Gili Trawangan ini kan andalan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Utara. Kenapa masalah air bersih saha tidak bisa diselesaikan. Padahal, pariwisata di Gili sudah mendunia.”</p> <p>“Kami tidak ingin gegabah mengambil tindakan yang justru akan merugikan pariwisata Lombok Utara. Saat ini, kami fokus pada konsolidasi internal dan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera mencari solusi yang tepat.”</p>
	Sumber	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi, NTB Ni Ketut Wolini
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	Saat ini, distribusi air bersih saat terganggu, karena proses hukum atas perizinan penyedia air bersih ini tengah berlangsung.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Terjadi krisis air bersih di Gili Trawangan yang berdampak pada sektor pariwisata dan mengancam kenyamanan wisatawan serta investasi usaha hotel dan restoran.
	<i>Where</i>	Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
	<i>When</i>	Waktu spesifik tidak disebutkan secara eksplisit dalam berita, tetapi konteks menunjukkan bahwa krisis air sedang berlangsung ketika berita diunggah pada 9 Oktober 2025.
	<i>Who</i>	Ketua PHRI Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini, sebagai narasumber utama yang menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi tersebut. Pihak yang disoroti adalah pemerintah daerah Lombok Utara.
	<i>Why</i>	Karena krisis air bersih belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah, padahal Gili Trawangan adalah destinasi wisata utama dengan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, dan masalah ini dapat merusak citra pariwisata internasional.
	<i>How</i>	PHRI telah berkoordinasi dengan pelaku usaha lokal, tetapi solusi jangka panjang tetap bergantung pada pemerintah. Distribusi air juga terganggu karena proses hukum terkait perizinan penyedia air bersih masih berlangsung.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 membahas keprihatinan Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, mengenai krisis air bersih di Gili Trawangan yang dianggap berdampak signifikan pada sektor pariwisata internasional. Ia menekankan pentingnya keberadaan air bersih karena Gili Trawangan merupakan destinasi utama bagi wisatawan asing.</p> <p>Paragraf 3–4 menyoroti kritik terhadap lambannya respons dari pemerintah daerah dan menekankan bahwa solusi jangka panjang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, meskipun PHRI telah melakukan koordinasi dengan pelaku usaha.</p> <p>Paragraf 5–6 menjelaskan dampak jangka panjang dari krisis ini terhadap investasi di sektor pariwisata dan menambahkan persoalan</p>

<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>lain yang juga belum teratasi, seperti ketiadaan rumah sakit internasional dan masalah sampah yang semakin memburuk. Paragraf 7–8 menekankan bahwa dengan kontribusi besar Gili terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seharusnya pemerintah daerah mampu memperbaiki fasilitas dasar. Selain itu, disampaikan bahwa distribusi air terganggu akibat adanya proses hukum terkait izin penyediaan air bersih yang belum selesai.</p> <p>Kata yang digunakan untuk menekankan fakta, yakni "Krisis", "Sangat mengkhawatirkan", "Bayangkan jika...", "Lamban", "Andalan pendapatan asli daerah (PAD)", "Sudah mendunia".</p>
		
		<p>Pada artikel berita ini menampilkan satu gambar, gambar tersebut menunjukkan Ni Ketut Wolini, yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Provinsi NTB.</p>

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

- Berita ini disusun dengan cara yang menekankan keseriusan krisis air bersih di Gili Trawangan dan memperlihatkan kritik terhadap pemerintah daerah. Judulnya langsung menyoroti permintaan PHRI agar masalah air segera diselesaikan. Ini memberi kesan bahwa situasi sudah mendesak. Lead berita juga langsung menyebut ancaman terhadap citra pariwisata, yang membuat pembaca langsung merasa masalah ini besar dan penting. Informasi latar menjelaskan bahwa Gili Trawangan adalah destinasi utama, dan krisis air bisa merusak pariwisata dan investasi. Lead juga memasukkan masalah lain seperti sampah dan ketiadaan rumah sakit, sehingga memperkuat kesan bahwa pengelolaan daerah ini kurang baik.

Kutipan dalam berita semuanya berasal dari Ketua PHRI. Ia menyampaikan kritik dan harapan kepada pemerintah daerah. Karena tidak ada pandangan dari pihak lain, berita ini hanya menampilkan satu sudut pandang. Penutup berita menyebut distribusi air terganggu karena proses hukum, yang mempertegas bahwa ada masalah struktural dalam penanganannya. Secara keseluruhan, cara berita ini ditulis menggiring pembaca untuk memihak PHRI dan menganggap pemerintah kurang tanggap.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini membentuk cerita dengan alur yang jelas mengenai adanya krisis air, pelaku usaha terdampak, pemerintah lamban, dan risiko besar bagi pariwisata jika tidak segera ditangani. Tokoh utamanya adalah Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, yang menyuarakan keprihatinan atas krisis air bersih di Gili Trawangan. Masalah utama adalah kekurangan air bersih yang berdampak pada kenyamanan wisatawan dan kelangsungan usaha hotel dan restoran. Pemerintah daerah Lombok Utara disorot karena dianggap belum menangani masalah ini secara serius. Pelaku usaha sudah berupaya mencari solusi, tetapi terkendala izin penyedia air yang belum tuntas. Akibatnya, distribusi air terhambat.

## 3. Struktur Tematik

Berita ini menyoroti krisis air bersih di Gili Trawangan dan dampaknya terhadap pariwisata. Di awal, Ketua PHRI NTB menyampaikan keprihatinannya karena Gili adalah destinasi utama wisatawan asing. Lalu, muncul kritik terhadap lambannya respons pemerintah daerah, meskipun pelaku usaha sudah mencoba mencari solusi. Selanjutnya, teks memperluas masalah dengan menyebut dampaknya terhadap investasi dan menyinggung persoalan lain seperti sampah dan ketiadaan rumah sakit. Pada bagian akhir, ditegaskan bahwa Gili berkontribusi besar pada pendapatan daerah, sehingga pemerintah seharusnya lebih bertanggung jawab. Namun, distribusi air masih terhambat oleh proses hukum. Secara umum, berita disusun dengan rapi untuk membentuk pesan bahwa krisis air bersih ini adalah masalah serius yang perlu segera ditangani oleh pemerintah demi menjaga sektor pariwisata.

## 4. Struktur Retoris

Berita menggunakan beberapa kata untuk menekankan fakta mengenai pentingnya kawasan wisata dan kurangnya perhatian pemerintah. Pertama, kata "Krisis" yang menunjukkan tingkat keparahan situasi yang sedang terjadi. Penggunaan kata "krisis air bersih" menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar gangguan biasa, tetapi sudah pada tahap genting dan

mendesak. "Sangat mengkhawatirkan" yang menekankan betapa serius dampak dari krisis tersebut, terutama terhadap sektor pariwisata. Ini memperkuat urgensi penanganan. Selanjutnya, "Bayangkan jika..." digunakan untuk menggugah imajinasi pembaca agar menyadari besarnya risiko yang ditimbulkan jika masalah tidak diselesaikan. "Lamban" digunakan untuk menilai sikap pemerintah daerah secara negatif, menekankan bahwa respons terhadap masalah ini dianggap tidak sigap. "Andalan pendapatan asli daerah (PAD)" menegaskan pentingnya Gili Trawangan sebagai sumber ekonomi utama daerah, sehingga memperkuat alasan mengapa krisis ini harus segera ditangani. "Sudah mendunia" menekankan reputasi internasional Gili Trawangan, sehingga menunjukkan bahwa krisis ini berpotensi mencoreng citra global daerah tersebut. Pada artikel berita ini menampilkan satu gambar, gambar tersebut menunjukkan

- Ni Ketut Wolini, yang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Provinsi NTB. Dalam konteks berita yang membahas mengenai krisis air bersih di Gili Trawangan, Ni Ketut Wolini tampak sedang memberikan pernyataannya dalam sebuah wawancara. Ia menekankan dampak serius dari krisis air bersih terhadap citra pariwisata Gili Trawangan yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing, mengungkapkan keprihatinan atas lambatnya respons dari pemerintah daerah, serta menekankan pentingnya solusi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pariwisata di wilayah tersebut.

## 2. Analisis Artikel Berita 2 SUARANTB.com

Judul : Krisis Air Bersih di Gili Trawangan Picu Respons Negatif Perbankan dan Wisatawan

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 14 Oktober 2024

Ringkasan : Krisis air bersih di Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) telah menimbulkan kekhawatiran yang luas, mulai dari kalangan wisatawan hingga sektor perbankan. Penundaan kredit usaha terjadi akibat risiko yang tinggi. Para pelaku industri hotel dan restoran mendesak pemerintah untuk

memberikan solusi konkret, dengan menyatakan bahwa ancaman ini dapat menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan okupansi hotel, dan bahkan kemungkinan penutupan usaha. Masalah ini juga berdampak pada pariwisata Bali, karena wisatawan asing menganggap Lombok sebagai bagian dari Bali. Industri ini mendesak agar tindakan segera diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Artikel 2 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Krisis Air Bersih di Gili Trawangan Picu Respons Negatif Perbankan dan Wisatawan
	Lead	KRISIS air bersih di tiga Gili yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena) Kabupaten Lombok Utara memicu sentimen negatif bagi berbagai kalangan, tidak saja wisatawan, perbankanpun menjadi wait and see.
	Latar Informasi	Krisis air bersih di tiga destinasi wisata utama Lombok Utara, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena), menimbulkan kekhawatiran luas, termasuk dari wisatawan dan pihak perbankan yang mulai menunda pencairan investasi. Pemerintah didesak segera menangani masalah ini karena dampaknya telah mengancam kelangsungan usaha pariwisata dan mata pencaharian sekitar 4.000–5.000 orang. Sebelumnya, kawasan ini memiliki lebih dari 755 usaha, tetapi jumlahnya tinggal sekitar 400 akibat gempa 2018 dan pandemi Covid-19. Saat ini terdapat sekitar 890 hotel di Gili Tramena, dan jika termasuk restoran, jumlah usaha melebihi seribu unit.
	Kutipan	Salah satu pimpinan cabang perbankan di Mataram, yang enggan disebutkan namanya Kutipan tidak langsung: 1. mempertanyakan bagaimana sikap pemerintah dalam penyelesaian ancaman krisis air bersih di Gili Trawangan khususnya. Menurut narasumber ini, ia sudah menyetujui pembiayaan kepada salah satu pengusaha di Gili Trawangan senilai Rp5 miliar. 2. Karena itu, menurutnya, ancaman krisis air bersih di Gili Trawangan ini merembet ke sektor ikutan lainnya. Untuk itu, perlu solusi cepat dan tepat mengatasinya. Kutipan langsung: 1. “Kreditnya sudah disetujui, tinggal cair. Tapi kantor pusatku minta hold dulu, karena soal krisis air bersih ini juga menjadi pertimbangan pusat. Gak dikasi cairkan, karena khawatir dampaknya, pengusaha tidak bisa bayar,” kata sumber yang enggan ditulis namanya ini. Sekretaris PHRI Kabupaten Lombok Utara Vicky Hanoy Kutipan tidak langsung: 1. Ancaman krisis air bersih di Gili Trawangan ini kian menyedot perhatian publik, terutama wisatawan. 2. Sampai saat ini belum ada solusi yang konkret dari pemerintah daerah, terutama Pemda Kabupaten Lombok Utara. 3. Sejumlah pengusaha di Gili Tramena sudah menyiapkan opsi menutup investasi yang sudah dibangun sejak lama. Karena tidak adanya titik temu untuk menyelesaikan ancaman krisis air bersih ini. 4. Vicky menambahkan, sebelum gempa, terdapat lebih dari 755 kegiatan usaha yang hidup di Gili Tramena.

---

5. Hal itu karena usaha property besar harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang diangkut oleh penyeberangan.

6. Jika berbulan – bulan ancaman krisis air bersih di Gili Tramen berlangsung, pengusaha property sudah menyiapkan opsi menutup usahanya. Dari pada beroperasi dengan biaya yang sangat tinggi.

7. Ancaman krisis air bersih di Gili Tramen ini juga menurutnya sudah menjadi topik di kalangan pengusaha pariwisata di Bali. Sebagaimana diketahui, wisatawan asing yang masuk ke Gili Tramen kebanyakan wisatawan yang datang langsung dari Bali menggunakan kapal cepat.

8. Karena persoalan air bersih ini, tingkat hunian hotel (okupansi) sudah turun sebesar 10 persen. Dan akan turun hingga 50 persen jika tidak ketemu penyelesaiannya dalam waktu cepat.

Kutipan langsung:

1. "Rapat-rapat terus, tapi tidak ada solusi. Yang dibutuhkan saat ini solusi konkret dan cepat," katanya.

2. "Ancaman krisis air bersih ini seperti Covid jilid 2. Bisa tersisa 100 usaha, bahkan puluhan usaha yang bertahan," katanya.

3. "Bayangkan, sehari untuk beli air bersih saja bisa sampai Rp10 juta pengeluaran. Hotel yang besar bisa sampai Rp15 juta. Kalau biasanya untuk kebutuhan air bersih hotel sekitar Rp80 juta sampai Rp100 juta per bulan. Sekarang bisa besar sekali pembengkakannya," ujarnya.

4. "Sekarang travelnya di Bali minta jaminan soal air bersih ini, baru mau bawa wisatawan ke Gili," ungkapya.

5. "Kalau sudah wisatawan cancel pesanan, bisa bertahun tahun recoverynya untuk meyakinkan kembali wisatawan datang. Bayangkan besar efeknya kalau wisatawan sepi. Bakal seperti dulu lagi Gili Gili. Kami dari pengusaha ndak mau tahu soal distribusi air oleh PT ini PT itu. Kami hanya ingin tau air bersih itu disediakan negara," demikian Vicky.

Dayu Apriawati, GM Ayome Suite Mataram sekaligus Excomm IHGMA NTB

Kutipan tidak langsung:

1. hotel di Kota Mataram ikut terdampak persoalan air bersih di Gili Tramen. Menurutnya, tamu dari Belanda mempertanyakan persoalan ini.

Kutipan langsung:

1. "Ada tamu saya dari Belanda, dia tanya, apakah tempat saya krisis air bersih. Dikiranya krisis air bersih ini terjadi se Lombok. Kita kena dampak juga," tandasnya.

Lalu Kusnawan, Ketua Asosiasi Hotel Gili, sekaligus Ketua IHGMA NTB

Kutipan tidak langsung:

1. menyampaikan pemerintah telah berinvestasi sangat besar di Lombok, NTB untuk membangun infrastruktur pendukung sektor pariwisata. Salah satunya Sirkuit Mandalika yang nilainya triliunan. Investasi tersebut semata mata untuk terus mendorong sektor pariwisata NTB terus berkembang.

Kutipan langsung:

1. "Gili Tramen ini menjadi destinasi wisatawan internasional. Jika ia terganggu karena persoalan air bersih, dan informasi dari wisatawan menyebar kemana mana. Efeknya ke Lombok, bahkan bisa Bali. Karena wisatawan asing dari Bali menganggap Lombok itu juga bagian dari Bali. Karena itu, ini persoalan sangat serius yang harus diselesaikan. Kami sudah capek meneriakkan soal ini sejak lama," katanya.

1. Salah satu pimpinan cabang perbankan di Mataram, yang enggan disebutkan namanya

2. Sekretaris PHRI Kabupaten Lombok Utara Vicky Hanoy

Sumber

		<p>3. Dayu Apriawati, GM Ayome Suite Mataram sekaligus Excomm IHGMA NTB</p> <p>4. Lalu Kusnawan, Ketua Asosiasi Hotel Gili, sekaligus Ketua IHGMA NTB</p> <p>Tidak ada</p>
<b>Struktur Skrip</b>	Pernyataan Opini Penutup	Di Gili Tramena terdapat sebanyak 890 hotel. Jika ditambah dengan resto, jumlahnya bisa lebih seribu.
	<i>What</i>	Terjadi krisis air bersih di tiga pulau wisata utama Lombok Utara (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air atau Gili Tramena), berdampak aktivitas pariwisata dan sektor ekonomi lainnya, termasuk perbankan.
	<i>Where</i>	Di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air (Tramena), Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
	<i>When</i>	Krisis berlangsung hingga saat ini, dengan pertemuan para pelaku usaha berlangsung pada Sabtu, 11 Oktober 2024.
	<i>Who</i>	Sumber berita, yakni salah satu pimpinan cabang perbankan di Mataram, yang enggan disebutkan namanya, Sekretaris PHRI Kabupaten Lombok Utara Vicky Hanoy, GM Ayome Suite Mataram sekaligus Excomm IHGMA NTB Dayu Apriawati, Ketua Asosiasi Hotel Gili, sekaligus Ketua IHGMA NTB Lalu Kusnawan.
<b>Struktur Tematik</b>	<i>Why</i>	<p>Berita juga menyebutkan tentang wisatawan (terutama asing), pengusaha hotel dan restoran di Gili dan Mataram, pihak perbankan yang menunda pencairan kredit, sekitar 4.000–5.000 pekerja di Gili Tramena, organisasi seperti PHRI, IHGMA, dan Asosiasi Hotel Gili, dan pemerintah daerah (yang didesak bertindak)</p> <p>Karena tidak adanya solusi konkret dan cepat dari pemerintah daerah terkait penyediaan air bersih, sementara kebutuhan air terus meningkat dan biaya pengadaannya melonjak. Permasalahan juga dipicu oleh ketergantungan pasokan dari pihak swasta dan distribusi yang tidak stabil.</p>
	<i>How</i>	Dampak krisis air meluas ke penurunan tingkat hunian hotel hingga 10%, berpotensi turun 50%, ancaman PHK massal, usaha gulung tikar, dan investasi properti dan kredit perbankan ditangguhkan. Selain itu, kekhawatiran travel agent di Bali ikut menyebar ke luar wilayah. Para pengusaha telah melakukan konsolidasi dan pertemuan menuntut solusi konkret dari pemerintah, tetapi hingga kini belum ada tindakan nyata yang dirasakan.
	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 membuka berita dengan menekankan bahwa krisis air bersih di Gili Tramena (Gili Trawangan, Meno, dan Air) menimbulkan dampak yang luas, termasuk kekhawatiran dari sektor perbankan dan desakan publik agar pemerintah segera mengambil tindakan.</p> <p>Paragraf 3–5 menguraikan dampak krisis terhadap sektor keuangan, dengan memberikan contoh nyata dari seorang pimpinan cabang bank yang menunda pencairan kredit akibat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh krisis air.</p> <p>Paragraf 6–8 menjelaskan respons dan kekhawatiran dari para pelaku usaha pariwisata, yang berkumpul untuk membahas masalah krisis air bersih. Mereka menyoroti ketiadaan solusi konkret dari pemerintah.</p> <p>Paragraf 9–12 menggambarkan betapa seriusnya ancaman terhadap keberlangsungan usaha di Gili Tramena. Ribuan pekerja terancam PHK dan jumlah usaha menurun drastis sejak bencana gempa dan pandemi, yang kini diperparah oleh krisis air.</p> <p>Paragraf 13–15 merinci beban biaya tinggi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan air bersih, serta opsi untuk menutup usaha jika krisis terus berlanjut.</p>

---

**Struktur Retoris**

Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

Paragraf 16–17 menyoroti dampak reputasional dari krisis ini terhadap minat wisatawan asing, terutama dari Bali, serta penurunan okupansi hotel sebagai dampak langsung.

Paragraf 18–19 mempertegas bahwa para pelaku usaha tidak peduli dengan konflik antarperusahaan penyedia air. Mereka hanya menuntut pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan air bersih.

Paragraf 20–21 memperlihatkan bahwa dampak krisis ini merambat hingga ke luar Gili Tramena, seperti ke hotel-hotel di Mataram, karena persepsi negatif wisatawan asing terhadap Lombok secara keseluruhan.

Paragraf 22–24 mengingatkan bahwa investasi besar pemerintah di sektor pariwisata (seperti Sirkuit Mandalika) bisa sia-sia jika persoalan air di Gili Tramena tidak segera diselesaikan, karena efek domino terhadap citra Lombok dan bahkan Bali.

Paragraf 25 menutup dengan penegasan bahwa Gili Tramena merupakan kawasan vital dengan lebih dari seribu unit usaha hotel dan restoran, yang menunjukkan betapa besar risiko ekonomi dari krisis air bersih ini.

Kata yang digunakan untuk menekankan fakta, yakni:

"Krisis air bersih"

"Memicu sentimen negatif"

"Wait and see"

"Sengkarut air bersih"

"Ancaman" (berulang kali disebut)

"Merembet ke sektor ikutan lainnya"

"Tidak ada solusi konkret" / "Solusi konkret dan cepat"

"Ancaman PHK" dan "4.000–5.000 orang terancam"

"Covid jilid 2"

"Biaya Rp10 juta – Rp15 juta per hari" dan "Rp100 juta per bulan"

"Kami sudah capek meneriakkan soal ini sejak lama"

"Bakal seperti dulu lagi Gili Gili"

"Efeknya ke Lombok, bahkan bisa Bali"



Dari kiri ke kanan: Lulu Kusnawan, Lily McDonald, Davu Apriawati, Vicky Hanoy dan Mukharom saat melakukan pertemuan membahas krisis air bersih di Gili Tramena. (Espe NTB/12)

Pada berita ini juga menampilkan foto kelima sumber yang ada pada berita ini berfoto bersama Mereka adalah para perwakilan pengusaha hotel dan restoran yang terlibat dalam pertemuan untuk membahas krisis air bersih yang melanda Gili Tramena

---

**Rincian analisis**

**1. Struktur Sintaksis**

Berita ini disusun untuk menekankan bahwa krisis air bersih di Gili Tramena berdampak luas dan menimbulkan kekhawatiran serius. Judul langsung menyebut adanya respons negatif dari wisatawan dan perbankan, yang menunjukkan bahwa masalah ini sudah mengganggu kepercayaan terhadap sektor pariwisata. Lead menegaskan bahwa krisis ini memicu sikap

hati-hati dari banyak pihak, termasuk perbankan yang menunda pencairan kredit. Informasi latar memperkuat pentingnya Gili sebagai destinasi utama dengan ribuan usaha yang bergantung pada pariwisata. Penurunan jumlah usaha sejak gempa dan pandemi ditampilkan untuk menunjukkan bahwa krisis air bisa menjadi pukulan lanjutan.

Kutipan dalam berita berasal dari berbagai pihak, seperti PHRI, pengusaha hotel, dan perbankan. Sebagian besar menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya tindakan pemerintah. Bahasa yang digunakan dalam kutipan bersifat emosional dan mendesak, yang memperkuat kesan bahwa krisis ini sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak ada pernyataan dari pemerintah, sehingga berita ini lebih menampilkan satu sisi dari pelaku usaha. Penutup mempertegas besarnya skala usaha yang bisa terdampak. Secara keseluruhan, penyusunan berita ini menggiring pembaca untuk melihat pemerintah sebagai pihak yang lambat tanggap dan krisis air sebagai ancaman serius bagi pariwisata.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menggambarkan krisis air bersih di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air dengan alur yang jelas, yakni krisis terjadi, kemudian pelaku usaha dan pekerja terdampak. Pemerintah lamban, pelaku usaha memberikan tekanan, tetapi solusi belum muncul. Tokoh utama dalam cerita ini adalah para pelaku usaha pariwisata dan perhotelan, termasuk perwakilan PHRI, IHGMA, Asosiasi Hotel Gili, serta pelaku perbankan. Mereka semua menyuarakan kekhawatiran yang sama, yakni krisis air ini berdampak langsung pada usaha, karyawan, dan wisatawan. Wisatawan asing pun disebut mulai terganggu kenyamanannya.

Masalah utama yang diangkat adalah ketersediaan air bersih yang sangat terbatas dan tidak stabil. Ini diperparah oleh ketergantungan terhadap penyedia swasta serta lambatnya tanggapan pemerintah daerah. Pihak yang dirugikan meliputi pengusaha hotel dan restoran, wisatawan, sektor perbankan yang menunda kredit, dan ribuan pekerja di Gili Tramen yang terancam kehilangan pekerjaan. Upaya yang sudah dilakukan yaitu para pengusaha dan asosiasi telah melakukan pertemuan dan mendesak

pemerintah agar segera memberikan solusi. Namun, hingga saat ini belum ada langkah nyata dari pemerintah yang benar-benar dirasakan.

### 3. Struktur Tematik

Berita ini mengangkat tema utama krisis air bersih di Gili Tramena dan dampaknya terhadap pariwisata dan ekonomi lokal. Sejak awal, ditegaskan bahwa krisis ini memicu kekhawatiran, bahkan dari sektor perbankan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa pelaku usaha pariwisata merasa terbebani, belum melihat solusi dari pemerintah, dan terancam tutup karena biaya tinggi dan krisis yang terus berlanjut. Masalah ini juga berdampak pada reputasi Gili, okupansi hotel menurun, dan persepsi negatif menyebar hingga luar pulau. Berita memberikan peringatan bahwa jika krisis ini tidak segera ditangani, investasi pariwisata, termasuk proyek besar seperti Mandalika terancam sia-sia. Secara keseluruhan, struktur berita disusun untuk menekankan bahwa krisis air bersih adalah ancaman serius yang membutuhkan tanggapan cepat dari pemerintah.

### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan sejumlah kata untuk menekankan pada masalah krisis air bersih di Gili Tramena. "Krisis air bersih" digunakan berulang kali sebagai istilah utama untuk menggambarkan tingkat keparahan masalah. Kata krisis memberi kesan darurat dan genting. "Memicu sentimen negatif" menunjukkan dampak psikologis dan sosial yang luas, tidak hanya teknis atau logistik. "Wait and see" menunjukkan sikap perbankan ini menandakan kehati-hatian tinggi dan penundaan keputusan finansial karena dampak krisis. "Sengkarut air bersih" menguatkan kesan kekacauan atau kompleksitas masalah yang tidak kunjung selesai.

"Ancaman", yang berulang kali disebut, menunjukkan bahwa krisis ini tidak hanya terjadi, tetapi juga mengandung risiko jangka panjang. "Merembet ke sektor ikutan lainnya" menggambarkan efek domino, menekankan bahwa ini bukan masalah satu sektor saja. "Tidak ada solusi konkret" / "Solusi konkret dan cepat" menegaskan bahwa upaya selama ini belum nyata dan tidak cukup cepat. "Ancaman PHK" dan "4.000–5.000 orang terancam"

adalah data kuantitatif yang memberi bobot nyata terhadap dampak sosial-ekonomi.

"Covid jilid 2" menunjukkan perbandingan bahwa krisis ini bisa menghancurkan sektor usaha sebagaimana pandemi dulu. "Biaya Rp10 juta – Rp15 juta per hari" dan "Rp100 juta per bulan" memberikan tekanan kuat pada beban ekonomi nyata yang dihadapi pelaku usaha. "Kami sudah capek meneriakkan soal ini sejak lama" menunjukkan keputusasaan dan frustrasi, sehingga memperkuat bahwa masalah ini sudah lama berlarut-larut. "Bakal seperti dulu lagi Gili Gili" mengacu pada masa suram sebelumnya, memperingatkan potensi kemunduran besar. "Efeknya ke Lombok, bahkan bisa Bali" memperluas dimensi dampak ke ranah regional.

Pada berita ini juga menampilkan foto kelima sumber yang ada pada berita ini yaitu di Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB Lalu Kusnawan, GM Vyhana Gili Air sekaligus Excomm IHGMA/GHA) Lily McDonal, Dayu Apriawati, GM Ayome Suite Mataram sekaligus Excomm IHGMA NTB, Sekretaris Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Lombok Utara Vicky Hanoy dan GM Hotel Prime Park (Excomm IHGMA NTB) Mukharom yang berfoto bersama Mereka adalah para perwakilan pengusaha hotel dan restoran yang terlibat dalam pertemuan untuk membahas krisis air bersih yang melanda Gili Tramena dengan menunjukkan gestur mengepalkan tangan ke depan sambil tersenyum, yang dapat diinterpretasikan sebagai simbol optimisme atau kesatuan dalam menghadapi permasalahan.

### 3. Analisis Artikel Berita 3 SUARANTB.com

Judul : 50 Hari Pertama, Kebutuhan Air Bersih Warga Gili Meno  
Disuplai dengan Tongkang

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 03 Juli 2024

Ringkasan : Warga Gili Meno menolak kehadiran perusahaan swasta yang berperan sebagai penyedia air bersih dan lebih memilih solusi dari PDAM melalui pipa bawah laut yang berasal dari Gili Air. Penolakan ini

didasari oleh kekhawatiran terhadap lingkungan serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan. DPRD KLU memberikan dukungan kepada warga dan mendesak agar solusi permanen dapat dicapai tanpa melibatkan pihak ketiga. Sementara itu, distribusi air menggunakan kapal diterima sebagai solusi sementara.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Artikel 3 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	50 Hari Pertama, Kebutuhan Air Bersih Warga Gili Meno Disuplai dengan Tongkang
	Lead	Krisis air bersih warga Gili Meno, disikapi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan mengalokasikan anggaran untuk mendistribusikan air bersih menggunakan tongkang. Sejumlah Rp500 juta telah disiapkan Pemda melalui mekanisme pergeseran anggaran untuk menutup kebutuhan darurat warga Gili Meno. Pelaksanaan distribusi air ini dipercayakan kepada Dinas PUPR KLU.
	Latar Informasi	Warga Gili Meno menghadapi krisis air bersih yang cukup parah. Pemerintah daerah merespons dengan anggaran darurat melalui Dinas PUPR untuk mendistribusikan air dengan tongkang dari titik sumber di Muara Putat. Proses distribusi dilakukan dengan melibatkan Pemdes setempat, dan ditargetkan mampu menyuplai hingga 16.000 liter per hari, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
	Kutipan	Kadis PUPR Perkim KLU, H. Kahar Rizal, ST., MT., melalui Kabid Cipta Karya, Rangga Wijaya, ST. Kutipan tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses persiapan distribusi air ke Gili Meno telah dimulai sejak Selasa kemarin. Hal ini menindaklanjuti sosialisasi yang dilakukan lebih dulu kepada warga di Gili Meno dan manajemen perhotelan sebelumnya.</li> <li>2. Persiapan pengiriman alat dan memasang sampai dinyatakan siap 100 persen butuh waktu 2 hari (Selasa – Rabu). Selanjutnya, air baru bisa diangkut menggunakan tongkang ke pulau pada hari Kamis, 4 Juli 2024.</li> <li>3. Secara teknis, Dinas PUPR akan memaksimalkan anggaran Rp 500 juta sesuai perencanaan. Mengingat anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan tandon 1000 liter dan 5000 liter, mesin 2 unit (mesin sedot dan mesin dorong), selang pompa 100 meter untuk mengantisipasi kandas kapal tongkang, karena arus surut, aksesoris pipa 2 inch, biaya sewa tongkang, maupun biaya operasional staf yang mengawal distribusi. Satu-satunya yang gratis pada proses ini hanya sumber air PDAM di mana titik lokasi pengambilan ditentukan di Muara Putat, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung.</li> <li>4. Persiapan droping sampai sore kemarin, diakui Kabid CK, sudah 95 persen. Rabu hari ini, proses akan dilanjutkan untuk pemasangan instalasi hingga masyarakat bisa mengambil air di 5 titik lokasi yang ditentukan.</li> <li>5. Air yang diangkut menggunakan tongkang selanjutnya akan ditampung di tandon-tandon penyimpanan yang disiapkan di 5 titik. Di mana kapasitas penyimpanan per titik adalah 5.000 liter.</li> <li>6. Menurut telaah Dinas PUPR, jumlah warga (non hotel) di Gili Meno sejumlah 900 jiwa. Dengan asumsi kebutuhan per orang 60 liter per hari untuk mandi, cuci</li> </ol>

		<p>dan masak, maka jumlah ideal yang harus disiapkan adalah 54.000 liter.</p> <p>7. Volume angkutan Muara Putat – Gili Meno sangat tergantung pada kemampuan kapten kapal. Selain itu, faktor cuaca (air surut) juga ikut mempengaruhi kelancaran distribusi. Potensi kendala tersebut sudah diantisipasi dengan menyiapkan selang pipa sejauh 100 meter dan pompa dorong.</p> <p>8. Pada proses eksekusi anggaran Rp 500 juta ini, Pemda menunjuk Dinas PU sebagai pelaksana. Sesuai instruksi, Dinas PU tidak melakukan tender ataupun PL melainkan eksekusi langsung dengan tujuan mempercepat pemenuhan krisis air bersih warga Meno.</p> <p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Hari ini kita mulai siapkan distribusi dengan mengirim peralatan dan instalasi di lapangan. Kita juga minta bantuan Pemdes untuk menentukan titik lokasi yang bisa dijangkau masyarakat dan memasang tempat dudukan tandon penampung,” ungkap Rangga.</li> <li>2. “Teknis pengangkutannya, kita siapkan 2 kapal tongkang masing-masing mengangkut 4 ribu liter (4 tandon) sekali jalan. Kita coba terapkan dua kali bolak-balik, sehingga sehari itu bisa mensuplai 16.000 liter,” terangnya.</li> <li>3. “Langkah awal kita siapkan 16.000 liter, kalau dirasa habis, kita tambah lagi volume angkutan menjadi 3 kali. Sebagai sesuatu yang baru pertama kali, tentu tidak sempurna. Sembari berjalan distribusi, kita lakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat setempat,” terang Rangga.</li> <li>4. “Suplai tahap pertama akan berlangsung selama 50 hari. Pengangkutan juga tidak harus setiap hari. Umpama stok masih ada, kemungkinan pengangkutan akan dilakukan selang sehari,” jelasnya.</li> <li>5. “Proses eksekusi anggaran ini tidak tender, karena selain sifatnya darurat, proses tender juga lama. Tetapi dalam pelaksanaan, kita dilengkapi oleh berita acara rapat, telaah staf, keputusan pergeseran anggaran dan dokumen lain dilengkapi saat semua berjalan,” tandasnya.</li> </ol>
	Sumber	1. Kadis PUPR Perkim KLU, H. Kahar Rizal, ST., MT., melalui Kabid Cipta Karya, Rangga Wijaya, ST.
	Pernyataan Opini Penutup	Tidak ada
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	“Proses eksekusi anggaran ini tidak tender, karena selain sifatnya darurat, proses tender juga lama. Tetapi dalam pelaksanaan, kita dilengkapi oleh berita acara rapat, telaah staf, keputusan pergeseran anggaran dan dokumen lain dilengkapi saat semua berjalan,” tandasnya.
	<i>Where</i>	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyalurkan air bersih ke Gili Meno menggunakan kapal tongkang sebagai respons terhadap krisis air bersih yang melanda warga pulau tersebut.
	<i>When</i>	Di Gili Meno, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Air diambil dari Muara Putat, Desa Sigar Penjalin.
	<i>Who</i>	Dimulai pada Selasa, 2 Juli 2024, dengan pengiriman air perdana menggunakan tongkang direncanakan pada Kamis, 4 Juli 2024, dan berlangsung selama 50 hari pertama sebagai tahap awal distribusi.
		Kadis PUPR Perkim KLU, H. Kahar Rizal, ST., MT., melalui Kabid Cipta Karya, Rangga Wijaya, ST. sebagai sumber berita.
		Berita juga menyebutkan berbagai pihak, yakni Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU), Dinas PUPR KLU sebagai pelaksana teknis, Warga Gili

		<p>Meno (sekitar 900 jiwa) sebagai penerima manfaat, dan Pemerintah Desa (Pemdes) setempat untuk membantu titik distribusi.</p>
	<i>Why</i>	<p>Karena terjadi krisis air bersih yang mengganggu kebutuhan dasar masyarakat, dan tidak tersedia sumber air lokal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian warga.</p>
	<i>How</i>	<p>Air bersih dari PDAM diangkut menggunakan 2 kapal tongkang, masing-masing membawa 4.000 liter air per perjalanan, dengan target harian awal 16.000 liter. Air ditampung dalam tandon di 5 titik distribusi. Anggaran sebesar Rp500 juta digunakan tanpa proses tender karena sifatnya darurat, dan pelaksanaan dikawal langsung oleh Dinas PUPR.</p>
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 membahas tanggapan awal Pemda KLU terhadap krisis air bersih di Gili Meno dengan mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta untuk distribusi air menggunakan tongkang, serta menunjuk Dinas PUPR sebagai pelaksana.</p> <p>Paragraf 3–4 menjelaskan proses awal teknis pendistribusian air, yang mencakup pengiriman alat hingga penentuan lokasi penampungan, serta keterlibatan pemerintah desa.</p> <p>Paragraf 5–6 menjabarkan secara rinci rencana waktu distribusi air, teknik pengangkutan, dan jenis perlengkapan yang digunakan sesuai dengan rincian anggaran.</p> <p>Paragraf 7–8 menguraikan kemajuan persiapan di lapangan dan mekanisme teknis pengangkutan air menggunakan tongkang, termasuk skenario pasokan harian sebesar 16.000 liter.</p> <p>Paragraf 9–10 menyajikan perhitungan kebutuhan air warga (non-hotel) dan strategi fleksibel dalam distribusi air, termasuk kemungkinan penambahan volume sesuai kebutuhan di lapangan.</p> <p>Paragraf 11–12 menjelaskan potensi hambatan dalam distribusi air, seperti kemampuan kapten kapal dan faktor cuaca, serta upaya antisipasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR.</p> <p>Paragraf 13–14 menggambarkan rencana jangka waktu distribusi (50 hari), fleksibilitas jadwal pengangkutan, dan strategi penggunaan anggaran darurat tanpa tender untuk mempercepat realisasi bantuan air.</p> <p>Paragraf terakhir (15) menekankan bahwa meskipun anggaran dieksekusi tanpa proses tender karena sifat darurat, semua dokumentasi administrasi tetap dilengkapi untuk memastikan akuntabilitas.</p>
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>Kata-kata yang digunakan untuk menekankan fakta, yakni:</p> <p>“Krisis air bersih”  “Kebutuhan darurat”  “Rp500 juta”  “50 hari pertama”  “Tanpa proses tender”  “Distribusi menggunakan tongkang”  “16.000 liter per hari” dan “54.000 liter ideal”  “Proses sudah 95 persen” dan “siap 100 persen”  “Satu-satunya yang gratis hanya sumber air PDAM”  “Tentu tidak sempurna”</p>



Gambar ini memperlihatkan sebuah kapal tongkang yang sedang mengangkut beberapa tandon air besar yang terbungkus dengan rapi

---

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun untuk menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah bertindak cepat menangani krisis air bersih di Gili Meno. Judulnya langsung menyebut bahwa kebutuhan air warga disuplai dengan kapal tongkang selama 50 hari pertama, memberi kesan bahwa penanganan sudah direncanakan dan berjalan. Lead berita memperlihatkan komitmen pemda dengan menyebut alokasi anggaran sebesar Rp500 juta dan keterlibatan langsung Dinas PUPR. Ini memberi kesan bahwa pemerintah hadir dalam situasi darurat.

Latar informasi menyebutkan langkah-langkah teknis seperti penyediaan tandon, pompa, dan penempatan air di lima titik distribusi. Penjelasan ini menunjukkan kesiapan dan detail perencanaan, sehingga memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang bertindak cepat dan sistematis. Kutipan dalam berita hanya berasal dari pejabat teknis pemerintah, yaitu Kabid Cipta Karya Dinas PUPR. Semua kutipan menekankan aspek teknis, efisiensi, danantisipasi kendala, tanpa menyalahkan pihak mana pun. Tidak ada pandangan dari warga atau pelaku usaha, sehingga berita hanya menyuarakan sudut pandang pemerintah. Penutup berita kembali menegaskan bahwa eksekusi anggaran dilakukan tanpa tender karena situasi darurat, dengan penjelasan bahwa semua proses administratif tetap dilengkapi. Secara keseluruhan, berita ini membentuk citra bahwa pemerintah tanggap, terorganisir, dan bertanggung jawab dalam menangani krisis air di Gili Meno.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menyajikan alur cerita tentang respons pemerintah terhadap krisis air bersih di Gili Meno. Berita menyajikan terjadinya krisis, kemudian pemerintah bertindak cepat, sehingga warga terbantu. Berita juga menjelaskan pelaksanaan diawasi langsung dan solusi bersifat sementara tetapi konkret. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, khususnya Dinas PUPR, yang mengambil peran aktif dengan menyalurkan air menggunakan kapal tongkang. Pejabat yang disebut adalah Kabid Cipta Karya, Rangga Wijaya, mewakili Kadis PUPR Perkim. Masalah utama yang dihadapi adalah tidak tersedianya air bersih yang cukup di Gili Meno. Warga yang tinggal di pulau kecil tersebut (sekitar 900 jiwa) mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar karena sumber air lokal tidak mencukupi. Pihak yang terdampak adalah masyarakat Gili Meno sebagai penerima manfaat, sedangkan pemerintah desa setempat dilibatkan untuk membantu proses distribusi. Tindakan yang dilakukan adalah pengiriman air dari Muara Putat ke Gili Meno menggunakan dua kapal tongkang, masing-masing mengangkut 4.000 liter air. Target harian awal adalah 16.000 liter, yang akan disalurkan selama 50 hari pertama. Air ditampung dalam tandon di lima titik, dengan biaya pelaksanaan sekitar Rp500 juta yang dikucurkan secara darurat tanpa tender.

## 3. Struktur Tematik

Berita ini mengangkat tanggapan Pemda KLU terhadap krisis air bersih di Gili Meno. Di awal, berita menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan dana Rp500 juta dan menunjuk Dinas PUPR sebagai pelaksana distribusi air menggunakan tongkang. Bagian selanjutnya menguraikan langkah-langkah teknis, mulai dari pengiriman alat, penentuan lokasi penampungan, hingga rencana distribusi harian sebesar 16.000 liter air. Pemerintah desa juga dilibatkan dalam pelaksanaan. Berita juga memuat perhitungan kebutuhan warga, strategi fleksibel distribusi, serta potensi hambatan seperti cuaca dan keterampilan awak kapal. Untuk itu, antisipasi teknis disiapkan oleh dinas terkait. Terakhir, dijelaskan bahwa distribusi direncanakan selama 50 hari dengan penggunaan anggaran darurat tanpa tender, namun

tetap dilakukan secara akuntabel melalui dokumentasi lengkap. Secara keseluruhan, isi berita disusun untuk membentuk bingkai bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah cepat dan teknis dalam menangani krisis air bersih secara bertanggung jawab dan terukur.

#### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan kata mengenai keseriusan serta keterbatasan upaya pemerintah daerah dalam menangani krisis air di Gili Meno. “Krisis air bersih” menunjukkan kondisi darurat yang menjadi latar utama berita dan memperkuat urgensi tindakan. “Kebutuhan darurat” menekankan bahwa situasi ini bersifat mendesak dan memerlukan penanganan segera. “Rp500 juta” menekankan besarnya komitmen anggaran dari Pemda. “50 hari pertama” menunjukkan jangka waktu distribusi yang cukup panjang, menekankan bahwa krisis ini tidak bersifat sementara.

Selain itu, “Tanpa proses tender” menekankan bahwa pelaksanaan dilakukan cepat dan langsung karena sifatnya mendesak dan tak bisa menunggu prosedur biasa. “Distribusi menggunakan tongkang” menunjukkan metode pengangkutan yang tidak biasa, menandakan bahwa kondisi ini luar biasa dan menuntut solusi alternatif. “16.000 liter per hari” dan “54.000 liter ideal” menegaskan skala kebutuhan air dan upaya pemenuhannya, memperkuat besarnya tantangan logistik. “Proses sudah 95 persen” dan “siap 100 persen” digunakan untuk menunjukkan progres dan kesungguhan pelaksanaan di lapangan. “Satu-satunya yang gratis hanya sumber air PDAM” menyoroti bahwa hampir seluruh proses butuh biaya besar, mempertegas besarnya beban logistik dan finansial. “Tentu tidak sempurna” digunakan untuk mengantisipasi ekspektasi masyarakat, sekaligus menekankan bahwa ini adalah solusi darurat pertama kalinya.

Gambar ini memperlihatkan sebuah kapal tongkang yang sedang mengangkut beberapa tandon air besar yang terbungkus dengan rapi, berlayar di perairan dengan latar belakang pegunungan yang terlihat di kejauhan. Kehadiran tandon-tandon air ini secara visual mencerminkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam menangani krisis air bersih di Gili Meno, seperti yang diuraikan dalam

artikel. Kapal tongkang ini berfungsi sebagai sarana utama untuk mendistribusikan pasokan air darurat dari Muara Putat ke Gili Meno, demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat dan mendukung kelangsungan aktivitas di pulau tersebut.

#### 4. Analisis Artikel Berita 4 SUARANTB.com

Judul : Krisis Air Bersih di Gili, KLU Buka Komunikasi dengan KKP

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 22 Oktober 2024

Ringkasan : Pencabutan izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) PT TCN oleh KKP kembali memunculkan masalah air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno. PT TCN merupakan satu-satunya penyedia air di daerah tersebut, dan operasionalnya terganggu akibat pengeboran yang dilakukan di luar area izin. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyatakan akan segera berkoordinasi dengan KKP untuk mencari solusi baik jangka panjang maupun pendek. PT TCN beralasan bahwa kebutuhan air di Gili jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga mereka terpaksa melakukan pengeboran di lokasi baru. Saat ini, kegiatan ilegal tersebut telah dihentikan, dan pemerintah sedang mencari solusi.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Artikel 4 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Krisis Air Bersih di Gili, KLU Buka Komunikasi dengan KKP
	Lead	Sejak dicabutnya izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 27 September 2024 lalu, masalah penyaluran air bersih ke Gili Trawangan dan Gili Meno kembali menjadi masalah. Pasalnya, penyulingan air bersih yang dilakukan oleh PT TCN merupakan satu-satunya sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di dua lokasi tersebut.
	Latar Informasi	Krisis air bersih kembali mengancam Gili Trawangan dan Gili Meno setelah izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 27 September 2024. PT TCN selama ini merupakan satu-satunya penyedia air bersih melalui penyulingan air laut untuk kedua pulau tersebut. Pencabutan izin terjadi karena PT TCN melakukan pengeboran dan penyulingan air di luar area yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
	Kutipan	Asisten II Setda KLU Ir. Hermanto

		<p>Kutipan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihaknya telah bersurat kepada pihak Kementerian untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai masalah air bersih di Gili ini.</li> <li>2. Saat ini penyaluran air bersih ke Gili Meno dan Trawangan masih dilakukan oleh PT TCN. Karena yang dipermasalahkan oleh KKP dan KPK adalah penyulingan yang dilakukan diluar area yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerja sama.</li> <li>3. Alasan PT TCN melakukan pengeboran tanpa izin di luar wilayah kerja sama karena kebutuhan air bersih di Gili cukup tinggi, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Tanjung. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Gili ini, dilakukan pengeboran di area lain.</li> <li>4. PT TCN telah mencoba mengajukan area penyulingan baru. Namun, karena membutuhkan proses yang cukup panjang, sehingga ia melakukan penyulingan sendiri tanpa izin.</li> </ol> <p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Yang bermasalah itu di tempat yang baru. Yang dapat izin di satu kawasan, dia ngebornya di kawasan lain. Sekarang sudah disetop kegiatan yang bermasalah itu," ungkapnya.</li> <li>2. "Kalau air surut, dia mati mesinnya. Oleh itulah dasarnya dia cari tempat baru," katanya.</li> </ol>
	Sumber Pernyataan Opini Penutup	Asisten II Setda KLU Ir. Hermanto Tidak ada Ia melanjutkan, PT TCN telah mencoba mengajukan area penyulingan baru. Namun, karena membutuhkan proses yang cukup panjang, sehingga ia melakukan penyulingan sendiri tanpa izin.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Terjadi masalah dalam penyaluran air bersih ke Gili Trawangan dan Gili Meno setelah izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ini memicu kekhawatiran akan terjadinya krisis air bersih. Di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
	<i>Where</i>	Di Gili Trawangan dan Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
	<i>When</i>	Setelah 27 September 2024, yaitu tanggal pencabutan izin oleh KKP. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menyampaikan responsnya pada 21 Oktober 2024
	<i>Who</i>	Sumber berita, yakni Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto. Berita juga menyebutkan sejumlah pihak, yakni PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) sebagai penyedia air bersih, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak yang mencabut izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang akan berkoordinasi.
	<i>Why</i>	Karena PT TCN melakukan pengeboran dan penyulingan air di luar area yang diizinkan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih Gili yang sangat tinggi. Akibat pelanggaran ini, KKP mencabut izin PRL.
	<i>How</i>	Pemkab Lombok Utara menyatakan akan membuka komunikasi dan berkoordinasi dengan KKP, serta telah bersurat untuk mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang agar krisis air tidak kembali terjadi.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1–2 membahas konteks permasalahan: pencabutan izin PRL PT TCN oleh KKP yang mengakibatkan terhambatnya kembali penyaluran air bersih ke Gili Trawangan dan Gili Meno. Hal ini sangat penting karena PT TCN adalah satu-satunya penyedia air bersih di area tersebut.

<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>Paragraf 3–4 menjelaskan tanggapan awal dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, yang berencana untuk membuka jalur komunikasi dengan KKP sebagai langkah pencegahan agar krisis air bersih tidak terulang. Pemerintah juga telah mengirimkan surat kepada KKP untuk membahas solusi.</p> <p>Paragraf 5–6 menguraikan bahwa meskipun izin telah dicabut, penyaluran air oleh PT TCN tetap berlangsung. Masalah hukum muncul karena pengeboran dilakukan di luar wilayah kerja sama yang telah disetujui oleh pemerintah.</p> <p>Paragraf 7–8 menjelaskan alasan teknis di balik pengeboran tanpa izin, yaitu karena kebutuhan air bersih di Gili sangat tinggi, bahkan melebihi kebutuhan di daerah daratan seperti Kecamatan Tanjung, sehingga PT TCN berusaha mencari sumber air baru secara mandiri.</p> <p>Paragraf 9 menegaskan bahwa meskipun PT TCN berusaha mengajukan izin penyulingan di lokasi baru, proses yang panjang mendorong mereka untuk mengambil tindakan sendiri tanpa izin, yang kemudian menimbulkan masalah hukum.</p> <p>Kata-kata yang menekankan fakta, yakni:          “Dicabutnya izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL)”          “Satu-satunya sumber air bersih”          “Masalah penyaluran air bersih kembali menjadi masalah”          “Segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KKP”          “Yang bermasalah itu di tempat yang baru”          “Kebutuhan air bersih di Gili cukup tinggi, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Tanjung”          “Sudah disetop kegiatan yang bermasalah itu”          “Melakukan penyulingan sendiri tanpa izin”</p>
		
		<p>Pada artikel ini menggunakan satu gambar, gambar tersebut menampilkan Asisten II Sekretariat Ir. Hermanto Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU).</p>

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini menjelaskan bahwa krisis air di Gili Trawangan dan Gili Meno terjadi akibat pencabutan izin PT TCN oleh KKP, yang selama ini menjadi satu-satunya penyedia air bersih. Judul dan lead menunjukkan bahwa Pemda Lombok Utara sedang membuka komunikasi dengan KKP sebagai upaya penyelesaian. Latar informasi menyebut pelanggaran PT TCN terjadi karena pengeboran di luar izin, namun dilakukan karena kebutuhan air yang tinggi. Semua kutipan berasal dari Pemda, yang menjelaskan alasan di balik pelanggaran dan langkah komunikasi yang ditempuh. Tidak ada tanggapan dari PT TCN atau KKP, sehingga berita berpihak pada narasi pemerintah

daerah. Secara keseluruhan, berita ini menunjukkan bahwa krisis air bersumber dari persoalan izin, dan Pemda tengah mencari solusi melalui jalur koordinasi.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menyusun alur cerita yang memperlihatkan munculnya kembali ancaman krisis air bersih, kali ini akibat masalah perizinan. Berita menjelaskan terjadi pelanggaran, kemudian izin dicabut, sehingga pasokan air terganggu. Lalu, muncul kekhawatiran krisis, sehingga pemerintah berupaya mencari solusi. Tokoh utama dalam cerita ini adalah PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), perusahaan swasta yang selama ini menjadi penyedia air bersih untuk Gili Trawangan dan Gili Meno. TCN kehilangan izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melanggar ketentuan wilayah pegeboran.

Masalah utama yang disampaikan adalah terganggunya pasokan air bersih ke dua pulau wisata tersebut, yang bisa memicu kembali krisis air seperti sebelumnya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, karena kebutuhan air bersih di Gili sangat tinggi dan tidak mudah digantikan. Pihak yang terlibat dan terdampak adalah TCN sebagai pelanggar dan penyedia, KKP sebagai lembaga yang menindak, serta Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang bertugas mencari solusi. Masyarakat dan pelaku usaha di Gili secara tidak langsung juga menjadi pihak yang terancam terdampak. Tindakan yang diambil adalah pernyataan dari Asisten II Setda KLU, Ir. Hermanto, bahwa pemerintah daerah akan segera berkomunikasi dengan KKP. Surat telah dikirim untuk membahas solusi jangka pendek dan panjang agar pasokan air tetap terjamin.

## 3. Struktur Tematik

Berita ini mengangkat tema utama konflik perizinan yang berdampak pada krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno. Paragraf awal menjelaskan bahwa pencabutan izin PT TCN oleh KKP menghentikan distribusi air, padahal perusahaan ini adalah satu-satunya penyedia air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara merespons dengan mencoba membangun komunikasi dengan KKP agar

krisis tidak terulang. Surat resmi pun telah dikirim untuk mencari solusi. Meski izin dicabut, PT TCN tetap menyalurkan air karena kebutuhan mendesak, meskipun pengeboran dilakukan di luar wilayah izin. Ini menimbulkan persoalan hukum. Berita menjelaskan bahwa kebutuhan air di Gili sangat tinggi, bahkan melebihi wilayah daratan, sehingga PT TCN mengambil inisiatif sendiri. Berita ditutup dengan penegasan bahwa lambatlaunya proses perizinan mendorong PT TCN bertindak tanpa izin resmi, yang menjadi akar masalah hukum saat ini. Secara keseluruhan, berita disusun untuk membentuk bingkai bahwa kebutuhan mendesak akan air bersih di Gili memicu benturan antara regulasi dan realitas lapangan, yang membutuhkan penyelesaian cepat dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.

#### 4. Struktur Retoris

- Berita ini menggunakan kata-kata untuk menekankan konflik antara kebutuhan mendesak masyarakat dan ketentuan hukum/izin formal. “Dicabutnya izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL)” menekankan bahwa tindakan resmi dari pemerintah pusat (KKP) telah terjadi dan menjadi pemicu langsung masalah krisis air. “Satu-satunya sumber air bersih” menunjukkan bahwa tidak ada alternatif lain bagi warga Gili selain dari penyulingan oleh PT TCN, sehingga menggambarkan tingkat ketergantungan yang tinggi. “Masalah penyaluran air bersih kembali menjadi masalah” memperkuat kesan bahwa persoalan ini serius dan terus berulang.

Selanjutnya, “Segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KKP” menekankan pentingnya tindakan cepat dan koordinasi antarlembaga agar krisis tidak memburuk. “Yang bermasalah itu di tempat yang baru” menyoroti fakta bahwa pelanggaran teknis lokasi pengeboran adalah isu utama, yang menyebabkan pencabutan izin. “Kebutuhan air bersih di Gili cukup tinggi, dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Tanjung” menekankan skala kebutuhan dan beratnya tantangan penyediaan air bersih di pulau-pulau kecil. “Sudah disetop kegiatan yang bermasalah itu” menegaskan bahwa langkah penindakan sudah dilakukan, memperkuat

kesan adanya konsekuensi nyata. “Melakukan penyulingan sendiri tanpa izin” menunjukkan tindakan ilegal yang dilakukan karena desakan kebutuhan, sekaligus memperjelas akar masalah.

Pada artikel ini menggunakan satu gambar, gambar tersebut menampilkan Asisten II Sekretariat Ir. Hermanto Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Dalam konteks artikel, ia menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil Pemda KLU, yaitu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang terhadap permasalahan krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, menyusul pencabutan izin Pemanfaatan Ruang Laut (PRL) PT Tiara Cipta Nirwana (TCN). Ir. Hermanto mengenakan seragam dinas berwarna khaki, berbicara dengan ekspresi serius atau menjelaskan sesuatu, yang mengindikasikan perannya sebagai narasumber dalam berita.

#### 5. Analisis Artikel Berita 5 SUARANTB.com

Judul : Bappeda Isyaratkan Pipa Bawah Laut Bisa Masuk, Tetapi Terganjil KPBU

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 15 November 2024

Ringkasan : Warga Gili Meno dan Walhi NTB kembali mengadakan krisis air bersih ke DPRD Lombok Utara, mendesak status darurat air setelah delapan bulan tanpa solusi. Mereka menyoroti kegagalan kerja sama KPBU dengan PT TCN yang masih beroperasi meski izinnnya dicabut. Pemda menawarkan solusi jangka pendek seperti pengangkutan air manual dan SWRO portable, namun terkendala izin. Sementara, solusi jangka panjang berupa pemasangan pipa bawah laut terhambat perjanjian KPBU yang membutuhkan kajian hukum agar tak menimbulkan gugatan dari PT TCN.

Tabel 4.5 Hasil Analisis Artikel 5 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Bappeda Isyaratkan Pipa Bawah Laut Bisa Masuk, Tetapi Terganjal KPBU
	Lead	Warga Gili Meno, didampingi Walhi NTB, kembali mendatangi DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis, 14 November 2024. Hearing lanjutan ini dijadwalkan, dimana DPRD sebelumnya, berjanji menghadirkan eksekutif selaku pelaksana.
	Latar Informasi	Krisis air bersih selama delapan bulan di Gili Meno mendorong warga, didampingi WALHI NTB, mendesak DPRD Lombok Utara segera bertindak. Warga menyebut situasi sudah darurat dan menuntut solusi jangka panjang. Kadus Gili Meno menyoroti kejanggalan kerja sama KPBU dengan PT TCN yang tetap beroperasi meski melanggar izin. Sementara itu, Pemda melalui Bappeda menyatakan solusi darurat masih berupa distribusi manual dan rencana pemasangan SWRO portable, yang terkendala izin Kementerian ESDM.
	Kutipan	<p>Kepala Dusun (Kadus) Gili Meno Masrun</p> <p>Kutipan tidak langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda seharusnya menyatakan Status Darurat terhadap krisis air warga Gili Meno. Delapan bulan terakhir, krisis air menyulitkan warga. Bahkan, saat musim hujan ini, warga terpaksa menampung air hujan untuk dimanfaatkan.</li> <li>2. Masrun juga menyoroti kejanggalan dalam KPBU dengan PT TCN dan meminta pemerintah untuk meninjau kembali kerja sama tersebut. Ia mempertanyakan alasan PT TCN masih beroperasi di Gili Meno meskipun terbukti melanggar aturan (Inlok dicabut).</li> </ol> <p>Kutipan langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Kami berada dalam kondisi darurat air, bukan sekadar krisis. Kami berharap ada solusi nyata, bukan solusi sementara yang tidak maksimal,” tegasnya.</li> </ol> <p>Sekretaris Bappeda Lombok Utara Nur Asmaun Gunadi</p> <p>Kutipan tidak langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda perlu menyiapkan solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi krisis. Berdasarkan diskusi internal, solusi jangka pendek yang diambil adalah mengangkut air bersih ke Gili Meno secara manual. Dimana proses ini ia klaim masih berlangsung saat ini.</li> <li>2. Kemudian untuk kebutuhan air di Gili Trawangan, Gunadi mengklaim TCN masih beroperasi dengan memanfaatkan pasang surut air laut. Pada saat air laut pasang, air laut tersebut ditampung, selanjutnya diolah dan disalurkan kepada masyarakat.</li> <li>3. Gunadi menyambung, pihaknya sudah mendapat informasi kontak dari Pemprov NTB untuk menyambung pipa dari Gili Air ke Gili Meno. Hanya saja, informasi tersebut masih harus divalidasi kembali kepada Pemprov NTB.</li> <li>4. Di sisi lain, Gunadi juga menyatakan eksekutif saat ini dalam proses meninjau kembali KPBU antara Pemda dengan PT. TCN. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TCN, dan (potensi) masalah hukum yang ditimbulkan, di luar yurisdiksi eksekutif Pemda Lombok Utara. Proses tersebut akan dilakukan oleh lembaga terkait (penegak hukum).</li> <li>5. Gunadi pun mengisyaratkan meminta dukungan legislatif Lombok Utara. Bahwa, untuk mempercepat proses pipa bawah laut ke Gili Meno dan Gili Trawangan, maka KPBU harus dibersikan dulu. Ia tidak ingin, niat baik Pemda untuk masyarakat mendapat ganjalan di kemudian hari, – misalnya saja, adanya langkah hukum yang dilakukan PT. TCN kepada Pemda.</li> </ol>

		<p>Kutipan langsung</p> <p>1. “Solusi lain yang akan dilakukan adalah memasang SWRO Portable di Gili Meno. Namun langkah ini masih terhambat karena izin SWRO belum keluar dari Badan Geologi Kementerian ESDM,” ucapnya.</p> <p>2. “Untuk jangka panjangnya, tidak ada lain, perjanjian ini (KPBU) harus ditinjau kembali. Namun untuk mengarah ke sana, bukan satu hal yang bisa diselesaikan satu dua hari. Karena ini membutuhkan pembicaraan yang matang, kemudian pelajari poin-poin perjanjian itu. Kelemahan ada di mana, hal yang harus diantisipasi ada dimana,” paparnya.</p> <p>Wisata alam di Nusa Tenggara Barat</p> <p>3. “Pemda saat ini memiliki semangat yang sama dalam melihat persoalan krisis air di Gili Meno dan Trawangan.”</p> <p>4. “Hanya kami sekarang ini tersandera oleh perjanjian kerjasama itu, KPBU itu. Mengenai pemasangan pipa bawah laut sepertinya sudah bisa. Bahwa pernah ada rencana ke Gili, saya mendapatkan tembusan perencanaan itu, tetapi sampai di sana itu belum dilaksanakan, karena apa, karena kami terhambat oleh perjanjian itu (KPBU),” paparnya.</p>
	Sumber	<p>1. Kepala Dusun Gili Meno Masrun</p> <p>2. Sekretaris Bappeda Lombok Utara Nur Asmaun Gunadi</p>
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	<p>Gunadi pun mengisyaratkan meminta dukungan legislatif Lombok Utara. Bahwa, untuk mempercepat proses pipa bawah laut ke Gili Meno dan Gili Trawangan, maka KPBU harus dibereskan dulu. Ia tidak ingin, niat baik Pemda untuk masyarakat mendapat ganjalan di kemudian hari, – misalnya saja, adanya langkah hukum yang dilakukan PT. TCN kepada Pemda.</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Warga Gili Meno menuntut solusi nyata terhadap krisis air yang berlangsung selama delapan bulan.
	<i>Where</i>	Di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, hearing dilakukan di DPRD KLU
	<i>When</i>	Kamis 14 November 2024, Warga Gili Meno kembali mendatangi DPRD Kabupaten Lombok Utara
	<i>Who</i>	Sumber berita, yakni Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, Sekretaris Bappeda Lombok Utara Nur Asmaun Gunadi Walhi NTB, DPRD KLU, Pemda KLU, PT TCN
	<i>Why</i>	Krisis air yang berkepanjangan dan pelanggaran kerja sama yang dilakukan oleh PT TCN
	<i>How</i>	Pemda menyampaikan solusi sementara seperti pengangkutan manual, rencana pemasangan SWRO, dan meninjau kembali KPBU
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 menjelaskan aksi dari warga Gili Meno bersama WALHI NTB yang melakukan hearing lanjutan di DPRD Lombok Utara. Mereka menuntut agar DPRD memenuhi janji yang sebelumnya telah berkomitmen untuk menghadirkan pihak eksekutif.</p> <p>Paragraf 3–4 menunjukkan tekanan dari Kepala Dusun Gili Meno kepada Pemda untuk menetapkan status darurat air, bukan hanya sekadar krisis. Ia juga mengkritik kerja sama KPBU dengan PT TCN dan mempertanyakan legalitas operasional PT TCN setelah izin mereka dicabut.</p> <p>Paragraf 5–6 menguraikan tanggapan Pemda melalui Sekretaris Bappeda yang menyatakan bahwa mereka telah merancang solusi jangka pendek berupa pengangkutan air bersih secara manual, dan mengakui bahwa proses ini masih berlangsung. Ia juga menyampaikan bahwa PT TCN masih mendistribusikan air di Gili Trawangan.</p> <p>Paragraf 7–8 membahas rencana alternatif yang sedang dipertimbangkan, seperti pemasangan SWRO Portable yang terhambat izin, serta opsi penyambungan pipa dari Gili Air ke Gili Meno. Namun, semua ini masih dalam tahap validasi dan</p>

---

**Struktur Retoris**Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

awal.

Paragraf 9–10 mengarah pada strategi jangka panjang, yaitu peninjauan kembali perjanjian KPBU dengan PT TCN. Gunadi menegaskan bahwa hal ini memerlukan proses hukum dan diskusi menyeluruh mengenai isi perjanjian tersebut.

Paragraf 11–12 menyampaikan keterbatasan eksekutif dalam menindak PT TCN secara hukum karena hal tersebut berada di luar kewenangan mereka. Pemda mengakui terhambat oleh isi perjanjian KPBU yang saat ini masih mengikat secara hukum.

Paragraf 13–14 menutup dengan permohonan dukungan dari legislatif. Pemda ingin memastikan bahwa langkah strategis seperti pemasangan pipa bawah laut dapat segera dilaksanakan, tetapi terlebih dahulu harus menyelesaikan masalah legal kerja sama dengan PT TCN.

Kata-kata yang digunakan untuk menekankan fakta dalam berita ini, yakni

“Kondisi darurat air, bukan sekadar krisis”

“Delapan bulan terakhir”

“Solusi nyata, bukan solusi sementara yang tidak maksimal”

“Pelanggaran... terbukti” dan “Inlok dicabut”

“Masih beroperasi meskipun terbukti melanggar”

“Tersandera oleh perjanjian kerja sama itu, KPBU itu”

“Belum dilaksanakan... karena kami terhambat oleh perjanjian itu”

“Izin SWRO belum keluar”

“Kami tidak ingin niat baik Pemda... mendapat ganjalan di kemudian hari”



Pada artikel ini menampilkan Warga Gili Meno yang kembali menemui anggota DPRD KLU menuntut solusi darurat air bersih.

---

**Rincian analisis****1. Struktur Sintaksis**

Berita ini menunjukkan bahwa krisis air bersih di Gili Meno belum terselesaikan meski sudah berlangsung delapan bulan. Judul menyoroti rencana pemasangan pipa bawah laut yang terhambat oleh perjanjian kerja sama (KPBU) antara Pemda dan PT TCN. Lead memperlihatkan tekanan warga yang kembali mengadu ke DPRD, didampingi WALHI. Latar berita menekankan tuntutan warga akan solusi permanen, bukan bantuan sementara. Kepala Dusun Gili Meno mempertanyakan keabsahan operasi PT TCN yang tetap berjalan meski melanggar izin. Kutipan dari Bappeda menjelaskan bahwa distribusi manual masih berlangsung, sementara solusi jangka panjang seperti pipa bawah laut terganjal KPBU. Pemerintah mengaku “tersandera” oleh perjanjian tersebut. Tidak ada pernyataan dari

PT TCN atau KKP, sehingga sudut pandang berita hanya datang dari warga dan Pemda. Secara keseluruhan, berita ini menyampaikan bahwa perjanjian KPBU menjadi penghambat utama penyelesaian krisis air, meski Pemda menunjukkan itikad baik.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menggambarkan lanjutan dari krisis air bersih yang sudah berlangsung selama delapan bulan di Gili Meno. Berita menggambarkan krisis berkepanjangan, sehingga warga menuntut. Namun, solusi terbentur perjanjian lama dan upaya teknis terhambat, sehingga belum ada kepastian jangka panjang. Tokoh utama dalam cerita adalah warga Gili Meno, yang diwakili oleh Kepala Dusun Masrun. Mereka menyuarakan desakan agar pemerintah segera mencari solusi permanen, karena cara-cara sementara sudah tidak cukup.

Masalah utama adalah krisis air bersih yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Rencana solusi jangka panjang, yaitu pemasangan pipa bawah laut, terhambat oleh adanya kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta (PT TCN) yang bermasalah secara hukum. Pihak-pihak yang disebut meliputi warga, pemerintah daerah, DPRD, Bappeda, WALHI, PT TCN, Pemprov NTB, hingga Kementerian ESDM. Ini menunjukkan bahwa krisis ini bukan hanya persoalan lokal, tapi melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tindakan yang dilakukan sejauh ini masih terbatas, yakni air diangkut secara manual, dan ada rencana pemasangan SWRO portable, namun masih terkendala izin. Rencana besar seperti pipa bawah laut belum bisa dijalankan karena perjanjian KPBU dengan PT TCN belum ditinjau ulang.

## 3. Struktur Tematik

Berita ini mengangkat tema utama ketegangan antara warga, pemerintah, dan perusahaan terkait krisis air bersih di Gili Meno. Di awal, warga bersama WALHI menuntut DPRD menepati janji menghadirkan pihak eksekutif untuk membahas penanganan krisis air. Selanjutnya, Kepala Dusun Gili Meno mendesak agar status dinaikkan menjadi darurat air dan mempertanyakan legalitas PT TCN setelah izinnya dicabut, sekaligus

mengkritisi kerja sama KPBU. Pemda merespons dengan menyampaikan solusi sementara berupa pengangkutan air secara manual dan menjelaskan bahwa PT TCN masih aktif mendistribusikan air di Gili Trawangan. Rencana alternatif seperti pemasangan SWRO portable dan pipa dari Gili Air juga disebutkan, namun masih dalam tahap awal. Untuk jangka panjang, Pemda mempertimbangkan peninjauan ulang perjanjian dengan PT TCN, namun mengakui bahwa proses hukum diperlukan karena perjanjian masih berlaku. Mereka juga menyatakan bahwa penindakan terhadap PT TCN berada di luar kewenangannya. Berita ditutup dengan permintaan dukungan DPRD agar solusi strategis seperti pemasangan pipa bawah laut bisa segera dijalankan setelah masalah legal diselesaikan. Secara keseluruhan, berita membentuk bingkai bahwa penyelesaian krisis air bersih di Gili Meno terhambat oleh persoalan hukum dan birokrasi, sehingga diperlukan kerja sama lebih erat antara warga, legislatif, dan eksekutif.

#### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan sejumlah kata untuk menekankan fakta mengenai krisis air bersih. “Kondisi darurat air, bukan sekadar krisis” menunjukkan bahwa situasi di Gili Meno lebih parah dari krisis biasa. “Delapan bulan terakhir” menekankan lamanya durasi krisis, yang memperkuat bahwa masalah ini bukan sementara atau baru muncul. “Solusi nyata, bukan solusi sementara yang tidak maksimal” menunjukkan bahwa warga tidak puas dengan upaya sementara, menuntut tindakan konkret dan permanen. “Pelanggaran... terbukti” dan “Inlok dicabut” mempertegas bahwa PT TCN telah melanggar aturan resmi, menambah bobot argumen untuk meninjau ulang KPBU. “Masih beroperasi meskipun terbukti melanggar” menyoroti kejanggalan dan ketimpangan hukum, menekankan adanya celah pengawasan. “Tersandera oleh perjanjian kerja sama itu, KPBU itu” menunjukkan Pemda merasa terikat secara tidak adil, sehingga tidak bebas bergerak. “Belum dilaksanakan... karena kami terhambat oleh perjanjian itu” memperjelas bahwa hambatan utama bukan teknis, tetapi administratif dan legal, yaitu KPBU. “Izin SWRO belum keluar” menekankan bahwa solusi teknis pun terhambat oleh birokrasi pusat, menunjukkan

ketergantungan terhadap regulasi nasional. “Kami tidak ingin niat baik Pemda... mendapat ganjalan di kemudian hari” menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi konflik hukum.

Pada artikel berita ini terdapat satu gambar yang menunjukkan suasana rapat yang berada di dalam sebuah ruangan, gambar ini merepresentasikan pertemuan lanjutan yang diadakan di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) pada Kamis, 14 November 2024, antara warga Gili Meno yang didampingi Walhi NTB dengan pihak eksekutif. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan krisis air bersih di Gili Meno, di mana warga mendesak Pemda untuk menyatakan status darurat dan mencari solusi nyata, sementara pihak Pemda menjelaskan upaya jangka pendek dan panjang yang sedang diupayakan, termasuk peninjauan kembali perjanjian kerja sama dengan PT TCN.

#### 6. Analisis Artikel Berita 6 SUARANTB.com

Judul : Pemprov NTB Minta KKP Kaji Ulang Izin PT TCN

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 12 Oktober 2024

Ringkasan : Pemprov NTB meminta KKP mengkaji ulang pencabutan izin pengeboran PT TCN di Gili Trawangan, dengan alasan kebutuhan air bersih lebih mendesak daripada dampak lingkungan. Kadis Pariwisata NTB menilai kerugian ekonomi akibat krisis air lebih besar dibanding kerusakan terumbu karang, dan selama aktivitas pengeboran tak membahayakan keselamatan, sebaiknya dilanjutkan sambil menunggu solusi jangka panjang. Namun, Pemda Lombok Utara didorong segera menyelesaikan krisis ini, mengingat pentingnya Gili Tramenya bagi pendapatan daerah.

Tabel 4.6 Hasil Analisis Artikel 6 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pemprov NTB Minta KKP Kaji Ulang Izin PT TCN
	Lead	Permasalahan air bersih di Gili Tramenya kembali memanas. Pasalnya, izin pengeboran air bersih oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena didapati merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di kawasan tersebut.
	Latar Informasi	Permasalahan air bersih di kawasan wisata Gili Tramenya (Gili

	<p>Trawangan, Meno, dan Air) kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut izin pengeboran PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) akibat dugaan kerusakan lingkungan dan ekosistem laut. Pencabutan ini menghentikan operasi penyulingan air bersih satu-satunya di Gili Trawangan, sehingga dikhawatirkan akan memicu krisis air bersih seperti yang terjadi pada Juni 2024.</p>
<p>Kutipan</p> <p>Sumber</p> <p>Pernyataan Opini</p> <p>Penutup</p>	<p>Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T., Kutipan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat perlu meninjau kembali pencabutan izin operasional PT TCN ini. Menurutnya, sebelum melihat ekosistem, pemerintah harus mengedepankan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Yang mana air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.</li> <li>2. Sebagai Kadis Pariwisata, Jamal mengatakan pemerintah pusat sebagai pemangku kebijakan perlu melihat kebijakan mana yang kiranya dampaknya tidak terlalu merugikan masyarakat dan negara. Sehingga menurutnya, dengan pemberian izin PT TCN untuk tetap melakukan penyulingan di Gili Trawangan dinilai lebih baik untuk saat ini, dibandingkan dengan terjadinya krisis air di kawasan Gili tersebut.</li> <li>3. Jamal melanjutkan, selagi pengeboran yang dilakukan oleh PT TCN ini tidak membunuh masyarakat yang ada di lokasi tersebut, maka tidak masalah untuk dilanjutkan pengeboran sampai pemerintah mendapatkan solusi jangka panjang yang lebih aman untuk pendistribusian air ke Gili Trawangan dan Meno. Wisata alam di Nusa Tenggara Barat</li> <li>4. Meski demikian, Jamal menekankan kepada Pemda KLU untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi Gili Tramena menjadi salah satu sumber PAD terbesar kabupaten tersebut.</li> </ol> <p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Dari Kementerian KKP mau merevisi atau apa surat itu, karena demi kepentingan orang banyak. Mungkin beberapa spot terumbu karang rusak, tapi kan tidak semua," ujarnya.</li> <li>2. "Kita fikirkan mana dampak ekonomi yang lebih besar. Lebih besar keuntungan dari mudharat. Bayangkan jika tidak ada air dan segala macam, pariwisata kita pasti anjlok, pendapatan pengusaha disana juga pasti berkurang, masyarakat yang ada disana juga kan tidak dapat kebutuhan dasar," jelasnya.</li> <li>3. "Penting juga menjaga lingkungan, tetapi ketika ada hal seperti ini, yang lebih urgent yang dikedepankan. Itu (pengeboran, red) tidak membuat orang mati, tidak membuat nyawa orang melayang. Tapi kalau tidak ada air? Itu kan kebutuhan dasar," katanya.</li> </ol> <p>Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T., Tidak ada</p> <p>Meski demikian, Jamal menekankan kepada Pemda KLU untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi Gili Tramena menjadi salah satu sumber PAD terbesar kabupaten tersebut.</p>
<p><b>Struktur Skrip</b></p>	<p><i>What</i> Pemerintah Provinsi NTB meminta KKP mengkaji ulang pencabutan izin pengeboran air bersih milik PT TCN, karena pencabutan tersebut memicu ancaman krisis air di Gili Tramena.</p> <p><i>Where</i> Di Gili Tramena (Gili Trawangan, Meno, dan Air), Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.</p> <p><i>When</i> Pernyataan disampaikan pada Jumat, 11 Oktober 2024, setelah pencabutan izin oleh KKP dan menjelang potensi krisis seperti</p>

		<p>pada Juni 2024.</p> <p><i>Who</i> Berita menggunakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T., sebagai sumber utama. Berita juga menyebutkan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) sebagai pihak yang dicabut izinnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pihak yang mencabut izin, serta masyarakat dan pelaku usaha di Gili Tramena, dan Pemda Lombok Utara yang diminta ikut menyelesaikan masalah.</p> <p><i>Why</i> Karena PT TCN dinilai merusak lingkungan, khususnya ekosistem laut, sehingga KKP mencabut izinnya. Namun, pencabutan ini mengancam pasokan air bersih, yang merupakan kebutuhan dasar warga dan pelaku usaha pariwisata.</p> <p><i>How</i> Dinas Pariwisata NTB mengusulkan KKP meninjau ulang keputusan pencabutan izin, dengan pertimbangan bahwa penyediaan air bersih lebih mendesak daripada dampak lingkungan terbatas, dan tetap menunggu solusi jangka panjang dari pemerintah.</p>
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 menguraikan latar belakang permasalahan, yaitu pencabutan izin pengeboran air bersih PT TCN oleh KKP yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Pencabutan ini menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya krisis air bersih di wilayah Gili Tramena.</p> <p>Paragraf 3–4 menyajikan pernyataan dan keberatan dari Dinas Pariwisata NTB, yang meminta agar pencabutan izin tersebut ditinjau kembali. Mereka menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, di atas kepentingan lingkungan.</p> <p>Paragraf 5–6 memperkuat argumen ini dengan menyoroti potensi dampak ekonomi dan sosial yang signifikan jika air bersih tidak tersedia, seperti penurunan sektor pariwisata dan terganggunya kehidupan masyarakat lokal.</p> <p>Paragraf 7–8 menyajikan pembelaan moral terhadap pengeboran oleh PT TCN, dengan alasan bahwa aktivitas tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa, sementara krisis air justru menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.</p> <p>Paragraf 9 berfungsi sebagai penutup dengan penekanan bahwa Pemda KLU harus segera menyelesaikan permasalahan ini secara konkret, mengingat Gili Tramena merupakan penyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>Kata-kata yang digunakan untuk menekankan fakta, yakni:</p> <p>“Permasalahan air bersih di Gili Tramena kembali memanas”</p> <p>“Izin... dicabut karena didapati merusak lingkungan dan ekosistem”</p> <p>“Jika permasalahan ini tidak secepatnya mendapatkan solusi, maka... terdampak krisis”</p> <p>“Air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat”</p> <p>“Demi kepentingan orang banyak”</p> <p>“Lebih besar keuntungan dari mudharat”</p> <p>“Pariwisata pasti anjlok” / “pendapatan pengusaha... berkurang”</p> <p>“Tidak membuat nyawa orang melayang... Tapi kalau tidak ada air?”</p> <p>“Gili Tramena menjadi salah satu sumber PAD terbesar”</p>
		 <p>Gambar tersebut menampilkan Jamaludin Malady, S.Sos., M.T., Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang sedang</p>

## **Rincian analisis**

### **1. Struktur Sintaksis**

Berita ini disusun untuk menunjukkan bahwa Pemprov NTB meminta KKP mengkaji ulang pencabutan izin PT TCN, karena dikhawatirkan akan memperparah krisis air bersih di Gili Tramena. Judul dan lead menekankan bahwa masalah air dan lingkungan kembali memanas, memperlihatkan ketegangan antara kepentingan ekologi dan kebutuhan masyarakat. Latar informasi menjelaskan bahwa PT TCN adalah satu-satunya penyedia air bersih di Gili, dan pencabutan izinnya bisa mengulangi krisis seperti Juni 2024. Kutipan dari Kepala Dinas Pariwisata NTB menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat dan dampak ekonomi, dibanding hanya fokus pada kerusakan lingkungan. Semua kutipan berasal dari satu sumber pemerintah provinsi, tanpa tanggapan dari KKP atau pihak lingkungan. Ini membuat berita berpihak pada sudut pandang ekonomi dan kebutuhan masyarakat, bukan konservasi lingkungan. Secara keseluruhan, berita ini membingkai bahwa izin TCN sebaiknya dipertimbangkan kembali demi mencegah krisis air, sambil menekankan pentingnya solusi jangka panjang.

### **2. Struktur Skrip**

Berita ini menyajikan alur cerita yang memperlihatkan ketegangan antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pasokan air bersih di Gili Tramena. Berita menjelaskan izin dicabut karena kerusakan lingkungan, kemudian muncul ancaman krisis air, sehingga pemerintah daerah minta evaluasi. Namun, terjadi dilema antara ekologi dan kebutuhan dasar, sehingga menunggu solusi nyata dari pusat. Tokoh utama dalam skrip ini adalah Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaludin Malady, yang mewakili suara pemerintah provinsi.

Masalah utama adalah pencabutan izin pengeboran milik PT TCN oleh KKP karena dianggap merusak ekosistem laut. Namun, keputusan ini memicu kekhawatiran terjadinya krisis air, terutama menjelang musim ramai

wisatawan. Pihak-pihak yang terlibat meliputi PT TCN (penyedia air), KKP (pencabut izin), Pemprov NTB (yang meminta evaluasi ulang), serta masyarakat dan pelaku usaha di Gili Tramena yang terancam kekurangan air. Pemda Lombok Utara juga disebut sebagai pihak yang diminta ikut membantu menyelesaikan masalah. Tindakan yang diambil adalah upaya Dinas Pariwisata NTB untuk meminta KKP mempertimbangkan kembali keputusan pencabutan izin, dengan alasan bahwa air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan. Pemerintah daerah juga menunggu solusi jangka panjang yang masih dalam proses.

### 3. Struktur Tematik

Berita ini membentuk tema utama ketegangan antara perlindungan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Gili Tramena, menyusul pencabutan izin pengeboran air bersih PT TCN oleh KKP. Di awal, dijelaskan bahwa pencabutan dilakukan karena alasan lingkungan, namun menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya krisis air bersih. Dinas Pariwisata NTB menolak keputusan ini dan meminta peninjauan ulang, dengan alasan bahwa kebutuhan masyarakat harus lebih diutamakan daripada isu lingkungan. Penjelasan diperkuat dengan potensi dampak sosial dan ekonomi, seperti turunnya sektor pariwisata dan terganggunya kehidupan warga lokal. Bahkan, pembelaan moral disampaikan, yakni pengeboran dianggap tidak merugikan nyawa, sedangkan krisis air mengancam hajat hidup orang banyak. Berita ditutup dengan penekanan bahwa Pemda KLU harus segera bertindak konkret, karena Gili Tramena berperan penting dalam menyumbang PAD. Secara keseluruhan, berita ini menyusun pesan bahwa krisis air bersih adalah masalah mendesak yang harus diutamakan, meskipun ada risiko terhadap kelestarian lingkungan.

### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan krisis air bersih sebagai konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat serta ekonomi lokal. “Permasalahan air bersih di Gili Tramena kembali memanas” menunjukkan bahwa isu ini serius dan kembali menjadi sorotan publik. “Izin... dicabut karena didapati

merusak lingkungan dan ekosistem” menekankan alasan tegas pencabutan izin, yakni kerusakan lingkungan yang terbukti. “Jika permasalahan ini tidak secepatnya mendapatkan solusi, maka... terdampak krisis” menegaskan konsekuensi langsung dan mendesak jika tidak segera ditangani. “Air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat” menyatakan bahwa akses terhadap air adalah hak dan kebutuhan dasar, bukan sekadar layanan tambahan. “Demi kepentingan orang banyak” menekankan bahwa keputusan kebijakan harus berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya regulasi teknis. Selanjutnya, “Lebih besar keuntungan dari mudharat” menunjukkan adanya pertimbangan rasional antara risiko lingkungan dan manfaat ekonomi-sosial. “Pariwisata pasti anjlok” / “pendapatan pengusaha... berkurang” menekankan pada dampak ekonomi riil yang dapat terjadi akibat krisis air. “Tidak membuat nyawa orang melayang... Tapi kalau tidak ada air?” membandingkan langsung risiko lingkungan dengan kebutuhan hidup, untuk menegaskan urgensi air bersih. “Gili Tramena menjadi salah satu sumber PAD terbesar” menekankan pada kontribusi ekonomi kawasan, untuk memperkuat alasan agar segera dicarikan solusi. Pada artikel berita ini menampilkan satu gambar, gambar tersebut menampilkan Jamaludin Malady, S.Sos., M.T., Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB yang sedang memberikan pernyataannya mengenai krisis air bersih di Gili Tramena

#### 7. Analisis Artikel Berita 7 SUARANTB.com

Judul : Walhi: Negara bertanggung Jawab Soal Krisis Air di Gili Meno dan Trawangan

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 11 November 2024

Ringkasan : Direktur Walhi NTB menegaskan negara bertanggung jawab atas krisis air dan kerusakan laut akibat aktivitas PT TCN di Gili Meno dan Trawangan. Dalam diskusi publik, Walhi dan warga mendesak solusi jangka pendek dan panjang, termasuk pemasangan pipa dari Gili Air. Walhi juga menyoroti endapan lumpur yang merusak terumbu karang seluas

2.364 m<sup>2</sup> di Gili Trawangan. Dukungan disampaikan BKKPN Kupang, dengan catatan solusi air bersih tetap ramah lingkungan.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Artikel 7 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Walhi: Negara bertanggung Jawab Soal Krisis Air di Gili Meno dan Trawangan
	Lead	Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat Amri Nuryadin menyampaikan bahwa negara harus bertanggung jawab atas persoalan krisis air yang terjadi di kawasan wisata Gili Meno dan Trawangan dan juga kerusakan ekosistem laut yang terjadi akibat dampak pengeboran pemasangan pipa penyulingan air laut milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan.
	Latar Informasi	Krisis air bersih dan kerusakan ekosistem laut di Gili Meno dan Trawangan menjadi sorotan dalam diskusi publik yang melibatkan Walhi NTB dan masyarakat setempat. Walhi meminta pemerintah segera mencari solusi pemenuhan air bersih dan mengevaluasi kembali keberadaan PT TCN yang disebut sebagai penyebab kerusakan terumbu karang. Selain itu, solusi jangka pendek berupa sambungan pipa dari Gili Air diusulkan sebagai langkah cepat, sementara pihak BKKPN menyatakan dukungan asalkan ramah lingkungan.
	Kutipan	<p>Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat Amri Nuryadin</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat Amri Nuryadin menyampaikan bahwa negara harus bertanggung jawab atas persoalan krisis air yang terjadi di kawasan wisata Gili Meno dan Trawangan dan juga kerusakan ekosistem laut yang terjadi akibat dampak pengeboran pemasangan pipa penyulingan air laut milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan.(Amri Nuryadin).</li> <li>2. Amri menyampaikan bahwa hasil pertemuan dalam diskusi publik tersebut Walhi NTB bersama seluruh elemen masyarakat yang berdomisili di Gili Meno dan Trawangan mendesak pemerintah untuk segera menemukan solusi dalam pemenuhan hak dasar masyarakat tersebut.(Amri Nuryadin)</li> <li>3. Menurut dia, tawaran solusi jangka pendek yang muncul dalam diskusi publik tersebut berupa penyambungan pipa air bersih dari Gili Air menuju Gili Meno dan Trawangan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengentaskan persoalan krisis air bersih tersebut.(Amri Nuryadin).</li> <li>4. Dia turut mengingatkan agar persoalan kerusakan ekosistem laut dampak dari pengeboran pemasangan pipa milik PT TCN yang mengakibatkan adanya endapan lumpur seluas 2.364 meter persegi dengan ketinggian mencapai 1 meter menutupi terumbu karang di perairan Gili Trawangan agar menjadi perhatian pemerintah daerah.(Amri Nuryadin).</li> <li>5. Dia berharap agar sanksi administratif yang nanti akan diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap PT TCN dapat menjadi momentum pemerintah daerah mengkaji kembali soal keberadaan PT TCN di kawasan Gili Trawangan maupun rencana pembangunan sarana di Gili Meno.(Amri Nuryadin).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Yang pasti, negara di sini harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di Gili Trawangan dan juga di Gili Meno, baik persoalan krisis air maupun dampak perluasan dari</li> </ol>

	<p>kerusakan ekosistem laut di Gili Trawangan,” (Amri Nuryadin).</p> <p>2. “Kami yakin, pemerintah memiliki solusi-solusi, baik dalam jangka pendek maupun panjang dalam air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan terus melakukan beragam upaya, termasuk advokasi untuk masyarakat agar kebutuhan air bersih ini bisa segera terpenuhi,” (Amri Nuryadin).</p> <p>3. “Dalam diskusi publik tadi ada disebut bahwa pipa distribusi air bersih dari Pantai Sire menuju Gili Air itu dapat disambungkan ke Gili Meno dan Trawangan. Dari diskusi disebutkan, solusi itu bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan. Itu yang kami dorong agar pemerintah bisa lebih serius dalam mengentaskan pemenuhan hak dasar masyarakat ini,” (Amri Nuryadin).</p> <p>4. “Kami menegaskan bahwa Walhi NTB akan mengawal proses rehabilitasi kawasan ekosistem laut itu sampai tuntas, termasuk mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk mengkaji ulang soal operasional PT TCN,”(Amri Nuryadin).</p> <p>Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) Martanina Kutipan Tidak Langsung:</p> <p>1. Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) Martanina turut menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pengentasan krisis air dan perbaikan kerusakan ekosistem laut tersebut. (Martanina).</p> <p>2. Dari berbagai solusi yang muncul dalam diskusi publik tersebut, dia menegaskan bahwa BKKPN Kupang mendukung hal tersebut dengan menerapkan metode yang ramah lingkungan.(Martanina).</p> <p>Kutipan Langsung:</p> <p>1. “Apa pun metode-nya nanti, kami tetap mendukung selagi itu sifatnya ramah lingkungan,” (Martanina).</p>
Sumber	<p>1. Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat Amri Nuryadin</p> <p>2. Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) Martanina</p>
Pernyataan Opini Penutup	<p>Tidak ada</p> <p>“Apa pun metode-nya nanti, kami tetap mendukung selagi itu sifatnya ramah lingkungan,” ujar Martanina</p>
<b>Struktur Skrip</b>	
<i>What</i>	<p>Terjadi krisis air bersih dan kerusakan ekosistem laut di Gili Meno dan Gili Trawangan, akibat aktivitas pengeboran dan pemasangan pipa milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN). Walhi NTB menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kondisi ini.</p>
<i>Where</i>	<p>Di kawasan wisata Gili Meno dan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Diskusi publik digelar di Mataram.</p>
<i>When</i>	<p>Pernyataan disampaikan dalam diskusi publik pada Kamis, 31 Oktober 2024, dan diberitakan pada 1 November 2024.</p>
<i>Who</i>	<p>Berita menggunakan Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin dan Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Trawangan, Meno, dan Air (Tramena) Martanina. Berita juga menyebutkan pemerintah daerah dan pusat (KKP, Pemda Lombok Utara) dan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN)</p>
<i>Why</i>	<p>Krisis air muncul akibat pencemaran lingkungan dan kerusakan terumbu karang yang diduga disebabkan oleh aktivitas pengeboran dan pemasangan pipa PT TCN. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap air bersih dan mengganggu ekosistem laut.</p>
<i>How</i>	<p>Solusi yang diusulkan dalam diskusi publik antara lain penyambungan pipa air bersih dari Gili Air ke Gili Meno dan</p>

<p><b>Struktur Tematik</b></p>	<p>Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat</p>	<p>Trawangan, yang disebut bisa selesai dalam 1 bulan, advokasi oleh Walhi dan elemen masyarakat, rehabilitasi ekosistem laut, evaluasi ulang izin operasional PT TCN oleh pemerintah daerah dan KKP, dan BKKPN mendukung solusi asal ramah lingkungan.</p> <p>Paragraf 1–2 memperkenalkan pernyataan dari Direktur Walhi NTB yang menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas dua persoalan besar: krisis air bersih dan kerusakan ekosistem laut di Gili Trawangan dan Meno akibat aktivitas PT TCN.</p> <p>Paragraf 3–4 menjelaskan hasil diskusi publik yang dilakukan Walhi bersama masyarakat lokal. Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah air, dengan keyakinan bahwa solusi jangka pendek dan panjang bisa ditemukan oleh pemerintah.</p> <p>Paragraf 5–6 merinci salah satu solusi jangka pendek yang diusulkan, yaitu penyambungan pipa dari Gili Air ke Gili Meno dan Trawangan. Solusi ini dinilai realistis dan mendesak untuk segera direalisasikan dalam waktu dekat.</p> <p>Paragraf 7–8 kembali menekankan dampak lingkungan dari pengeboran PT TCN, dengan data konkret mengenai kerusakan terumbu karang. Walhi juga mendorong agar sanksi dari KKP menjadi momentum untuk meninjau ulang keberadaan PT TCN.</p> <p>Paragraf 9–10 menunjukkan komitmen Walhi untuk terus mengawal proses pemulihan lingkungan dan mendorong Pemda untuk mengevaluasi ulang izin PT TCN.</p> <p>Paragraf 11–12 ditutup dengan pernyataan dari BKKPN Kupang yang menyatakan dukungannya terhadap solusi yang diajukan, selama tetap mengedepankan metode yang ramah lingkungan.</p>
<p><b>Struktur Retoris</b></p>	<p>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</p>	<p>Kata-kata yang menekankan fakta, yakni "Yang pasti," "Harus bertanggung jawab", "Kami yakin," "Segera menemukan solusi", "Kebutuhan dasar masyarakat", "Bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan", "Mengakibatkan adanya endapan lumpur seluas 2.364 meter persegi", "Menegaskan bahwa Walhi NTB akan mengawal proses... sampai tuntas", "Apa pun metodenya... selagi itu ramah lingkungan".</p>  <p>Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin (kanan) bersama Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Tramen Martanina (kedua kiri) saat hadir dalam kegiatan diskusi publik pengentasan krisis air bersih dan kerusakan ekosistem laut di kawasan Gili Meno dan Trawangan di Mataram. (Suara NTB/ant)</p>

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini menyoroti tuntutan Walhi NTB agar negara bertanggung jawab atas krisis air dan kerusakan lingkungan di Gili Meno dan Trawangan. Judul dan lead menekankan peran negara dalam menangani dua isu, yakni kebutuhan dasar warga dan dampak lingkungan akibat pengeboran PT TCN.

Latar informasi menjelaskan bahwa Walhi bersama warga mendesak solusi air bersih dan meminta evaluasi terhadap PT TCN. Solusi jangka pendek berupa penyambungan pipa dari Gili Air juga disampaikan. Kutipan Walhi menekankan urgensi dan hak masyarakat atas air bersih, sekaligus dorongan untuk merehabilitasi ekosistem laut yang rusak. BKKPN juga mendukung upaya penanganan, selama ramah lingkungan. Sumber berita berasal dari aktivis lingkungan dan lembaga pengelola kawasan laut, tanpa melibatkan pandangan pemerintah daerah atau PT TCN, sehingga berita berfokus pada perspektif lingkungan dan masyarakat. Secara keseluruhan, berita ini membingkai negara sebagai pihak yang harus hadir dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan krisis air dan menjaga kelestarian lingkungan di Gili.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menyusun alur cerita yang kuat tentang krisis ganda, yakni krisis air bersih dan krisis lingkungan. Berita menjelaskan kerusakan lingkungan dan krisis air, kemudian masyarakat dan WALHI menuntut karena negara dianggap lalai, sehingga mengajukan solusi secara kolektif melalui diskusi publik. Tokoh utama dalam berita ini adalah WALHI NTB, yang secara tegas menyatakan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kerusakan ekosistem dan terganggunya akses air bersih. Masalah utama yang diangkat adalah rusaknya terumbu karang dan lingkungan laut akibat aktivitas pengeboran dan pemasangan pipa milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN). Aktivitas ini bukan hanya merusak alam, tetapi juga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

Pihak-pihak yang terlibat adalah WALHI NTB dan BKKPN Kupang sebagai sumber suara masyarakat dan lingkungan, PT TCN sebagai pihak yang dituding merusak lingkungan, serta pemerintah daerah dan KKP sebagai pemilik wewenang yang dianggap harus bertanggung jawab atas izin dan pengawasan. Solusi yang diajukan muncul dari diskusi publik dan meliputi penyambungan pipa air bersih antar pulau, rehabilitasi lingkungan laut, evaluasi ulang izin PT TCN, pendekatan advokasi dari WALHI, dan dukungan dari lembaga konservasi asalkan solusinya ramah lingkungan.

### 3. Struktur Tematik

Berita ini membentuk tema utama tuntutan tanggung jawab negara atas krisis air bersih dan kerusakan lingkungan di Gili Trawangan dan Meno. Di awal, Walhi NTB menegaskan bahwa negara harus hadir untuk menyelesaikan dua persoalan besar: kebutuhan dasar masyarakat dan kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas PT TCN. Diskusi publik yang dilakukan bersama warga menegaskan desakan agar pemerintah segera bertindak, karena masyarakat yakin solusi jangka pendek maupun panjang bisa ditemukan. Salah satu solusi cepat yang diusulkan adalah penyambungan pipa dari Gili Air, yang dinilai realistis dan mendesak. Selain soal air, Walhi juga menyoroti kerusakan lingkungan dengan data konkret, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin PT TCN dan penggunaan momen pencabutan izin sebagai titik balik untuk memperbaiki tata kelola. Berita ditutup dengan dukungan dari BKKPN Kupang terhadap solusi yang diajukan, selama tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Secara keseluruhan, berita membentuk bingkai bahwa negara harus segera bertindak menyelesaikan krisis air tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, dengan Walhi dan masyarakat sebagai pengawal aktif proses perbaikan.

### 4. Struktur Retoris

Berita menggunakan kata-kata yang menekankan bahwa krisis air bersih dan kerusakan lingkungan membutuhkan tindakan dari pemerintah. "Yang pasti," menandakan kepastian dan ketegasan atas pernyataan yang akan disampaikan. "Harus bertanggung jawab" menekankan kewajiban negara, bukan sekadar saran atau harapan. "Kami yakin," memberikan keyakinan kuat atas potensi solusi dari pemerintah. "Segera menemukan solusi" menunjukkan urgensi waktu dalam menangani krisis. "Kebutuhan dasar masyarakat" menegaskan pentingnya air bersih sebagai hak fundamental. "Bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan" menyampaikan fakta bahwa solusi jangka pendek sangat mungkin dilakukan secara cepat. Selanjutnya, "Mengakibatkan adanya endapan lumpur seluas 2.364 meter persegi" menyampaikan data kuantitatif untuk memperkuat bukti kerusakan.

"Menegaskan bahwa Walhi NTB akan mengawal proses... sampai tuntas" menunjukkan komitmen serius atas pemantauan dan advokasi. "Apa pun metodenya... selagi itu ramah lingkungan" menekankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis.

Pada artikel berita ini menampilkan satu foto yang menunjukkan Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin (kanan) bersama Koordinator BKKPN Kupang Wilayah Kerja Perairan Gili Tramena Martanina (kedua kiri) saat menghadiri kegiatan diskusi publik pengentasan krisis air bersih dan kerusakan ekosistem laut di kawasan Gili Meno dan Trawangan di Mataram. Gambar ini merepresentasikan kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat bersama elemen masyarakat, seperti yang disebutkan dalam artikel. Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi atas krisis air bersih di Gili Meno dan Trawangan, sekaligus menyoroti kerusakan ekosistem laut akibat pengeboran, dan mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab serta segera memenuhi hak dasar masyarakat akan air bersih.

#### **8. Analisis Artikel Berita 8 SUARANTB.com**

Judul : Hari Pertama Masuk Kantor, Pj Gubernur NTB Didemo Mahasiswa

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 2 Juli 2024

Ringkasan : Pada hari pertama menjabat, Pj Gubernur NTB Mayjen (Purn) Hassanudin langsung didemo oleh Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena terkait krisis air bersih yang belum teratasi di Gili Tramena, terutama Gili Meno, di mana warga masih menggunakan air asin untuk kebutuhan sehari-hari. Mahasiswa menuding ada pembohongan publik mengenai ketersediaan air bersih di media sosial dan menyoroti dampak lingkungan akibat pengeboran PT TCN sejak 2016 yang merusak area konservasi laut seluas 1.660 meter persegi. Dalam aksi ini, mereka mengajukan empat tuntutan: jaminan akses air bersih untuk warga Gili, penghentian komersialisasi air, perlindungan terhadap masyarakat

yang menolak pengeboran, serta solusi penyediaan air bersih yang ramah lingkungan dan bebas kepentingan pribadi. Selain itu, mereka merekomendasikan penguatan peran PDAM Lombok Utara untuk menjamin kebutuhan air bersih secara mandiri.

Tabel 4.8 Hasil Analisis Artikel 8 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Hari Pertama Masuk Kantor, Pj Gubernur NTB Didemo Mahasiswa
	Lead	Di hari pertama masuk kantor, Pj Gubernur NTB, Mayjen (Purn) Hassanudin di demo mahasiswa lantaran krisis air bersih yang ada di Gili Tramena masih belum teratasi hingga saat ini.
	Latar Informasi	Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena melakukan aksi unjuk rasa terhadap Pj Gubernur NTB. Mereka menuntut penyelesaian krisis air dan kerusakan lingkungan akibat pengeboran ilegal oleh PT TCN. Mahasiswa menyoroti pembohongan publik terkait ketersediaan air bersih, menuduh terjadinya ancaman terhadap warga yang menolak pengeboran, serta menuntut perlindungan lingkungan. Mereka juga memberikan rekomendasi agar PDAM didorong menjadi penyedia utama air bersih tanpa merusak lingkungan.
	Kutipan	<p>Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena</p> <p>Kutipan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menuntut kepada Pj Gubernur NTB yang baru untuk menemui mereka dan memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di Gili.</li> <li>2. Lebih jelasnya, ada empat tuntutan pokok dalam aksi ini, yang mana pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, pertama adalah pemerintah perlu memberikan jaminan akses air kepada Masyarakat Gili Trawangan dan Gili Meno yang sampai saat ini mengalami krisis air dan hentikan komersialisasi air yang disebabkan oleh kedunguan Bupati Lombok Utara dan jajarannya. Kedua, pemerintah daerah harus melindungi Masyarakat Gili Trawangan dan Gili Meno yang ditindas dan diancam oleh Bupati Lombok Utara dan jajarannya karena menolak aktivitas pengeboran PT TCN yang membahayakan lingkungan, mencemari laut, dan merusak terumbu karang di sekitar gili. Ketiga, mendesak Pj. Gubernur NTB untuk mewujudkan komitmen perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup di NTB. Dan yang keempat adalah segera selesaikan permasalahan dan berikan solusi yang fundamental penyediaan air bersih di Gili Tramena dengan tidak merusak lingkungan hidup, tidak bertendensi kepentingan pribadi dan golongan.</li> </ol> <p>Selain memberikan tuntutan, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat ini juga memberikan rekomendasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan Gili Tramena dengan segera.</p> <p>Salah satunya adalah mendorong kemandirian PDAM dalam memberikan dan menjamin kebutuhan dasar air bersih, sebagai upaya untuk memaksimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara.</p> <p>Koordinator Umum dalam aksi ini, Yudiatna</p>

		<p>Kutipan tidak langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengaku bahwa telah terjadi pembohongan publik yang disebarkan oleh orang-orang berkepentingan, yang mana beredar berita mengenai sudah adanya air bersih di kawasan Gili, khususnya Gili Meno. Faktanya, sampai saat ini, masyarakat Gili Meno masih mandi dengan air asin.</li> <li>2. Selain permasalahan krisis air, mahasiswa ini juga menuntut pemerintah daerah untuk bisa mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh pengeboran PT TCN.</li> <li>3. Adapun dampak pengeboran ini merusak ekosistem laut yang ada di kawasan konservasi laut Gili Tramena.</li> </ol> <p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Terkait dengan isu air bersih yang ada di Gili Tramena, pada saat ini banyak sekali pembohongan-pembohongan public yang ada di media sosial, kenyataan yang sudah kami temukan di lapangan, investigasi kami di Gili Meno airnya sangat kotor," katanya pada Senin, 1 Juli 2024.</li> <li>2. "Sejak tahun 2016 proses produksi PT TCN (Tiara Cipta Nirwana) berjalan telah terjadi pembohongan public, katanya akan melakukan penyulingan air laut menjadi air bersih, tapi malah melakukan pengeboran hingga 30 meter," lanjutnya.</li> <li>3. "1660 meter persegi area konservasi laut rusak terutama terumbu karang dan biota laut mati akibat ditutupi lumpur limbah produksi PT TCN," jelasnya.</li> </ol>
	Sumber	Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena dan Yudiantna selaku Koordinator Umum Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	Salah satunya adalah mendorong kemandirian PDAM dalam memberikan dan menjamin kebutuhan dasar air bersih, sebagai upaya untuk memaksimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lombok Utara.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Aksi demonstrasi dilakukan mahasiswa dan masyarakat karena krisis air bersih di Gili Tramena dan kerusakan lingkungan akibat pengeboran PT TCN.
	<i>Where</i>	Kantor Gubernur NTB, di Mataram.
	<i>When</i>	Senin, 1 Juli 2024 atau hari pertama Pj Gubernur NTB masuk kantor.
	<i>Who</i>	Berita menggunakan Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena dan Yudiantna selaku Koordinator Umum Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena sebagai sumber. Berita juga menyebutkan Pj Gubernur NTB Mayjen (Purn) Hassanudin; PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).
	<i>Why</i>	Karena krisis air bersih di Gili Tramena belum teratasi dan adanya dugaan pembohongan publik serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas pengeboran PT TCN.
	<i>How</i>	Aksi demonstrasi dilakukan dengan menyuarakan empat tuntutan utama, termasuk jaminan akses air bersih, perlindungan terhadap masyarakat Gili, penghentian komersialisasi air, dan solusi ramah lingkungan tanpa kepentingan pribadi.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 memberi penjelasan yang menggambarkan aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada hari pertama kerja Pj Gubernur NTB sebagai ungkapan kekecewaan terhadap belum terselesaikannya masalah krisis air bersih di Gili Tramena, sekaligus menuntut agar gubernur baru segera memberikan solusi yang konkret.</p> <p>Paragraf 3–5 menjelaskan tuduhan pembohongan publik terkait informasi mengenai ketersediaan air bersih di Gili Meno serta fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa warga masih menggunakan air asin. Hal ini diikuti dengan</p>

---

kritik terhadap PT TCN yang dianggap telah melanggar janji dan merusak lingkungan melalui pengeboran yang dalam.

Paragraf 6 memperkuat argumen tersebut dengan menyebutkan dampak nyata dari aktivitas pengeboran PT TCN terhadap kawasan konservasi laut Gili Tramena, khususnya kerusakan yang terjadi pada terumbu karang dan biota laut.

Paragraf 7–10 memuat empat tuntutan utama dari aliansi mahasiswa dan rakyat. Tuntutan tersebut mencakup: jaminan akses terhadap air bersih, perlindungan bagi warga yang menolak aktivitas pengeboran, komitmen untuk melindungi lingkungan, dan penyelesaian masalah air tanpa merusak lingkungan atau menguntungkan kepentingan tertentu.

Paragraf 11–12 ditutup dengan rekomendasi konkret yang diajukan oleh massa aksi, yaitu mendorong kemandirian PDAM Kabupaten Lombok Utara dalam penyediaan air bersih, sebagai solusi yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada pihak swasta yang merusak lingkungan.

Kata-kata untuk menekankan fakta, yakni "Faktanya", "Kenyataan yang sudah kami temukan di lapangan", "Investigasi kami di Gili Meno airnya sangat kotor", "Sejak tahun 2016 proses produksi PT TCN berjalan", "1660 meter persegi area konservasi laut rusak", "Terutama terumbu karang dan biota laut mati akibat ditutupi lumpur", "Empat tuntutan pokok", dan "Tidak bertendensi kepentingan pribadi dan golongan".



Aksi unjuk rasa depan kantor Gubernur yang dilakukan oleh Aliansi Solidaritas Masyarakat dan Rakyat, Senin, 1 Juli 2024 di Mataram. (Suara NTB/era)

### Struktur Retoris

Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

---

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun untuk menyoroti aksi unjuk rasa mahasiswa pada hari pertama kerja Pj Gubernur NTB terkait krisis air dan kerusakan lingkungan di Gili Tramena. Judul dan lead menegaskan bahwa krisis air menjadi isu mendesak yang langsung dihadapi kepala daerah baru. Latar informasi menjelaskan bahwa unjuk rasa dipicu oleh kekhawatiran atas kelangkaan air bersih dan dampak lingkungan akibat pengeboran PT TCN. Kutipan dari aliansi mahasiswa menyampaikan empat tuntutan, termasuk penghentian komersialisasi air, perlindungan warga, dan penyelesaian masalah tanpa merusak lingkungan. Kutipan dari koordinator aksi memperkuat tuduhan terhadap PT TCN, termasuk pembohongan publik dan kerusakan ekosistem

laut. Tidak ada tanggapan dari pemerintah atau PT TCN, sehingga berita hanya menampilkan perspektif masyarakat dan mahasiswa. Secara keseluruhan, berita ini membingkai krisis air sebagai kegagalan pemerintah dan perusahaan, serta menuntut solusi mendesak yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

## 2. **Struktur Skrip**

Berita ini menyajikan aksi protes terhadap lambannya penyelesaian krisis. Berita menggambarkan krisis air bersih tidak kunjung selesai, sehingga masyarakat dan mahasiswa kecewa kemudian melakukan aksi protes dengan tuntutan disuarakan langsung kepada pemimpin baru sebagai desakan agar solusi segera diwujudkan. Tokoh utama dalam cerita adalah Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena, yang dipimpin oleh Yudiatna. Mereka tampil sebagai representasi suara masyarakat yang terdampak. Masalah utama adalah krisis air bersih dan kerusakan lingkungan di Gili Tramena, yang dianggap belum ditangani secara serius oleh pemerintah. Bahkan, dalam aksi tersebut juga disampaikan tuduhan pembohongan publik dan kekhawatiran akan komersialisasi sumber daya air. Pihak-pihak yang disebut antara lain mahasiswa dan masyarakat sebagai penggerak aksi, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) sebagai perusahaan yang dituding merusak lingkungan, dan Pj Gubernur NTB Mayjen (Purn) Hassanudin sebagai sosok yang dituju secara simbolis saat baru menjabat. Tindakan yang terjadi adalah demonstrasi damai yang membawa empat tuntutan, yakni jaminan hak atas air bersih, perlindungan terhadap masyarakat Gili, penghentian komersialisasi air, solusi lingkungan yang bebas dari kepentingan pribadi.

## 3. **Struktur Tematik**

Berita ini membentuk tema utama desakan mahasiswa terhadap pemerintah agar segera menyelesaikan krisis air bersih di Gili Tramena tanpa mengorbankan lingkungan. Demonstrasi dilakukan tepat pada hari pertama kerja Pj Gubernur NTB, sebagai simbol kekecewaan dan tuntutan agar solusi nyata segera diberikan. Mahasiswa menuduh adanya pembohongan publik terkait kondisi air di Gili Meno, karena kenyataannya warga masih

menggunakan air asin. Mereka juga mengkritik PT TCN yang dinilai ingkar janji dan merusak lingkungan melalui pengeboran dalam yang berdampak pada terumbu karang. Tuntutan aksi mencakup empat poin utama: akses air bersih yang adil, perlindungan bagi warga, penghentian kerusakan lingkungan, dan penyelesaian masalah tanpa kepentingan tersembunyi. Sebagai solusi, mereka mendorong agar PDAM Lombok Utara mengambil alih penyediaan air agar tidak lagi bergantung pada swasta. Secara keseluruhan, berita ini menyusun bingkai bahwa krisis air di Gili bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut keadilan, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan, yang menuntut respons cepat dan tegas dari pemerintah.

#### 4. **Struktur Retoris**

Berita menggunakan kata-kata untuk menekankan fakta mengenai aksi mahasiswa. "Faktanya" digunakan untuk menegaskan realitas di lapangan, yaitu masyarakat masih mandi dengan air asin. "Kenyataan yang sudah kami temukan di lapangan" menunjukkan hasil investigasi langsung sebagai bukti konkret. "Investigasi kami di Gili Meno airnya sangat kotor" memperkuat klaim dengan hasil temuan nyata. "Sejak tahun 2016 proses produksi PT TCN berjalan" memberikan titik waktu yang jelas dan faktual. "1660 meter persegi area konservasi laut rusak" menyebut angka spesifik untuk menunjukkan besarnya dampak. "Terutama terumbu karang dan biota laut mati akibat ditutupi lumpur" menjelaskan kerusakan lingkungan secara rinci. "Empat tuntutan pokok" menunjukkan kejelasan isi demonstrasi. "Tidak bertendensi kepentingan pribadi dan golongan" – menegaskan obyektivitas dan kepentingan publik.

Pada artikel berita ini menggunakan pemilihan foto hitam putih yang memperlihatkan suasana aksi demonstrasi di jalanan, dengan kerumunan massa yang membawa spanduk yang bertuliskan pesan-pesan yang ingin disampaikan di bagian depan, dan seorang orator sedang berbicara menggunakan pengeras suara dari atas sebuah mobil pikap. Gambar ini merepresentasikan aksi "Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat untuk Gili Tramena" yang berunjuk rasa di depan kantor Pj Gubernur NTB pada

Senin, 1 Juli 2024. Aksi ini menuntut Pj Gubernur yang baru untuk segera mengatasi krisis air bersih di Gili Tramena serta permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengeboran PT TCN, sekaligus mengancam pembohongan publik terkait ketersediaan air bersih.

## 9. Analisis Artikel Berita 9 SUARANTB.com

Judul: Pemenuhan Air Bersih, Warga Meno Dominan Tolak Perusahaan

Sumber: SUARANTB.com

Tanggal: 03 Juli 2024

Ringkasan: Mayoritas warga Gili Meno menolak kerja sama PDAM dengan PT TCN karena khawatir terhadap kerusakan lingkungan dan mahal nya harga air. Dari 43 warga, 41 menyatakan penolakan dalam musyawarah pada 16 Juni 2024. Mereka meminta distribusi air dikelola langsung oleh PDAM lewat pipa bawah laut tanpa melibatkan swasta. Sebagai solusi sementara, warga mendukung pengiriman air via kapal. DPRD KLU mendesak Pemda menghormati suara warga dan segera menyiapkan solusi permanen yang dikelola pemerintah daerah.

Tabel 4.9 Hasil Analisis Artikel 9 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pemenuhan Air Bersih, Warga Meno Dominan Tolak Perusahaan
	Lead	Warga Gili Meno, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara (KLU), dominan menolak hadirnya perusahaan sebagai penyuplai air bersih. Warga lebih menginginkan hadirnya Pemda melalui PDAM dengan metode menyambung pipa bawah laut dari Gili Air.
	Latar Informasi	Pada 16 Juni 2024, warga Gili Meno mengadakan musyawarah bersama perangkat desa, BPD, dan aparat wilayah. Dari hasil musyawarah tersebut, mayoritas warga (41 dari 43) menolak skema KPBU antara Pemda, PDAM, dan TCN, karena dianggap merusak lingkungan dan tidak terjangkau secara ekonomi. Warga hanya mendukung skema pipa bawah laut oleh PDAM dari Gili Air. Pemerintah merespons sementara dengan bantuan distribusi air menggunakan kapal kayu. Penolakan warga ini juga didukung oleh pernyataan anggota DPRD KLU.
	Kutipan	Berita Acara Hasil Musyawarah untuk petisi terhadap rencana kerjasama Pemda dengan pihak ketiga di Gili Meno tanggal 16 Juni 2024. Kutipan tidak langsung: 1. 5 poin kesepakatan antar warga. Antara lain, menolak wacana pengeboran dan jaringan reservoir yang akan dibangun oleh TCN selaku pihak yang akan digandeng Pemda dan PDAM. Penolakan didasari akan adanya

		<p>kerusakan lingkungan baik di darat maupun laut. Selain itu, warga menolak karena harga air yang ditawarkan melalui mekanisme KPBU tidak sesuai dengan kemampuan dan perekonomian masyarakat Gili Meno. Sebaliknya, masyarakat akan menerima Perumda PDAM dengan instalasi jaringan bawah laut yang terhubung dari Gili Air. Serta poin terakhir, apabila perusahaan di paksakan masuk, maka Gili Meno yang termasuk kawasan TWP GILI Matra, dengan ini masyarakat meminta untuk keluar dari kawasan tersebut. Kepala Dusun Gili Meno, Masrun</p> <p>Kutipan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membenarkan dominan warga menolak perusahaan. Untuk pemenuhan jangka pendek, pihaknya menyambut baik cara kerja Pemda dengan mensuplai air menggunakan Kapal Kayu.</li> <li>2. Pendistribusian air dari Pemda akan sangat membantu warga yang kesulitan membeli air setiap saat. Pemberian bantuan selama 50 hari ke depan, ia nilai akan sangat membantu krisis jangka pendek yang dialami warga.</li> </ol> <p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Masyarakat intinya tetap menginginkan solusi Pemda menggunakan sistem pipa bawah laut. Untuk bekerjasama dengan perusahaan TCN, warga masih tetap menolaknya,” tegasnya.</li> <li>2. “Penolakan warga hal lumrah, dan itu harus dihormati. Warga berhak menentukan pilihan. Ibarat kata, ini sama dengan hak pilih memilih Bupati, siapapun tidak boleh mengintervensi,” tegasnya.</li> </ol> <p>Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah</p> <p>Kutipan tidak langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. meminta penolakan warga Meno harus dihormati sebagai sebuah aspirasi maupun hak asasi. Mereka berhak memilih karena statusnya kelak bertindak sebagai pelanggan yang merasakan dampak langsung dari rencana KPBU.</li> <li>2. Sebagai solusi, Hakamah mengapresiasi langkah pemenuhan jangka pendek. Namun demikian, setelah 50 hari, Pemda diharapkan sudah mengantongi solusi, misalnya meminta bantuan Pusat melalui BWS dan Pemprov NTB agar pipa bawah laut ke Gili Meno dilanjutkan oleh PDAM.</li> </ol> <p>Kutipan langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Penyertaan modal kita ke PDAM setiap tahun cukup besar. Kita menilai dengan pengelolaan keuangan yang tepat, manajemen air se-KLU bisa dilakukan dengan baik. Apalagi PDAM selama ini tidak pernah kita dengar merugi,” tandasnya.</li> </ol>
	Sumber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Hasil Musyawarah untuk petisi terhadap rencana kerjasama Pemda dengan pihak ketiga di Gili Meno tanggal 16 Juni 2024.</li> <li>2. Kepala Dusun Gili Meno, Masrun</li> <li>3. Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah</li> </ol>
	Pernyataan Opini Penutup	<p>Tidak ada</p> <p>“Penyertaan modal kita ke PDAM setiap tahun cukup besar. Kita menilai dengan pengelolaan keuangan yang tepat, manajemen air se-KLU bisa dilakukan dengan baik. Apalagi PDAM selama ini tidak pernah kita dengar merugi,” tandasnya.</p>
Struktur Skrip	What	Warga Gili Meno menolak keterlibatan perusahaan (PT TCN) dalam penyediaan air bersih dan lebih memilih solusi dari Pemda melalui PDAM dengan pemasangan pipa bawah laut dari Gili Air.
	Where	Di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok

	<i>When</i>	Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat. Penolakan dituangkan dalam berita acara musyawarah warga pada 16 Juni 2024, dan pernyataan warga disampaikan pada 2 Juli 2024.
	<i>Who</i>	Berita menggunakan Kepala Dusun Gili Meno Masrun dan Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU Hakamah sebagai sumber. Berita juga menyebutkan warga Gili Meno, Pemdes Gili Meno, BPD, Pemda Lombok Utara, PDAM, dan PT TCN.
	<i>Why</i>	Warga menolak karena khawatir akan kerusakan lingkungan akibat pengeboran dan jaringan reservoir oleh perusahaan, serta karena harga air yang tidak terjangkau melalui skema KPBU.
	<i>How</i>	Penolakan disampaikan melalui berita acara resmi musyawarah warga dengan 41 dari 43 orang menolak KPBU, serta disertai aksi dan pernyataan terbuka. Warga mendesak Pemda menyediakan solusi alternatif yang dikelola oleh PDAM dan bukan perusahaan swasta.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1–2 menjelaskan sikap mayoritas penduduk Gili Meno yang menolak kehadiran perusahaan swasta (PT TCN) sebagai penyedia air bersih dan lebih memilih solusi dari pemerintah daerah melalui PDAM dengan metode pipa bawah laut dari Gili Air. Penolakan ini diformalkan dalam berita acara musyawarah Paragraf 3–4 menguraikan alasan penolakan warga, yaitu kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan ketidaksesuaian harga air dengan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, warga mengancam akan keluar dari kawasan konservasi jika perusahaan tetap dipaksakan untuk masuk Paragraf 5–6 memuat konfirmasi dari Kepala Dusun Gili Meno, yang mendukung sikap warga dan menyatakan bahwa bantuan jangka pendek dari Pemda berupa suplai air dengan kapal kayu cukup membantu. Ia menegaskan kembali bahwa solusi jangka panjang yang diinginkan tetap berbasis pada PDAM Paragraf 7–9 memuat respons dari Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah, yang menekankan bahwa penolakan warga adalah hak yang sah dan harus dihormati. Ia juga mendukung solusi jangka pendek dan mendorong Pemda untuk segera menindaklanjuti solusi jangka panjang melalui PDAM, mengingat PDAM dinilai mampu secara keuangan dan operasional
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Kata-kata yang digunakan untuk menekankan fakta, yakni: "Dominan menolak" "Tertuang dalam Berita Acara Hasil Musyawarah" "Dari 43 orang warga..., hanya 2 orang yang setuju" "Penolakan didasari..." "Masyarakat intinya tetap menginginkan..." "Jika perusahaan dipaksakan masuk..." "Penolakan warga hal lumrah, dan itu harus dihormati" "PDAM... tidak pernah kita dengar merugi"
		 <p>Warga Meno saat melakukan aksi Demo menolak KPBU dan menuntut Pemda menyiapkan solusi air bersih</p>

## **Rincian analisis**

### **1. Struktur Sintaksis**

Berita ini disusun untuk menunjukkan bahwa mayoritas warga Gili Meno menolak keterlibatan perusahaan dalam penyediaan air bersih. Judul dan lead menekankan keinginan warga agar Pemda melalui PDAM menjadi penyedia air, bukan perusahaan swasta seperti PT TCN. Latar informasi menyampaikan bahwa penolakan tersebut tercermin dalam musyawarah resmi warga, yang dituangkan dalam petisi. Penolakan didasari alasan lingkungan dan harga air yang dianggap tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi warga. Kutipan dari Kepala Dusun Gili Meno memperkuat bahwa penolakan warga bersifat kolektif dan harus dihormati, serta mendukung solusi jangka pendek berupa distribusi air dengan kapal kayu. DPRD juga menegaskan bahwa aspirasi warga harus dihormati, dan mendorong Pemda mencari solusi jangka panjang melalui PDAM dan bantuan dari pusat. Semua kutipan mendukung pendekatan berbasis publik, tanpa suara dari pihak perusahaan. Secara keseluruhan, berita ini membingkai bahwa warga lebih mempercayai pemerintah daerah daripada swasta, dan menyerukan solusi air bersih yang terjangkau, aman, dan dikelola oleh negara.

### **2. Struktur Skrip**

Berita ini menyajikan penolakan warga terhadap keterlibatan swasta dalam pengelolaan sumber daya publik, dalam hal ini air bersih. Berita menjelaskan bahwa warga alami krisis air, kemudian pemerintah tawarkan kerja sama dengan swasta. Namun, warga menolak karena alasan lingkungan dan biaya dan warga mengusulkan solusi sendiri. Warga menyampaikan tuntutan secara resmi dan kolektif. Tokoh utama dalam cerita adalah warga Gili Meno, yang diwakili oleh Kepala Dusun Masrun dan didukung pernyataan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU, Hakamah.

Masalah utama yang diangkat adalah ketidaksetujuan warga terhadap rencana melibatkan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dalam penyediaan air bersih melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Warga khawatir akan kerusakan lingkungan dan tingginya biaya air, yang

mereka nilai tidak adil dan tidak berkelanjutan. Pihak-pihak yang disebut antara lain warga, tokoh desa, BPD, DPRD, Pemda, PDAM, dan PT TCN. Warga lebih memilih solusi yang bersumber dari pemerintah daerah melalui PDAM, dengan sistem distribusi air yang rencananya disalurkan dari Gili Air menggunakan pipa bawah laut. Tindakan yang dilakukan oleh warga adalah menyampaikan penolakan secara formal melalui berita acara musyawarah tertanggal 16 Juni 2024. Dari 43 warga yang hadir, 41 orang menyatakan menolak keterlibatan perusahaan. Penolakan juga disampaikan secara terbuka kepada pemerintah daerah.

### 3. Struktur Tematik

Berita ini mengangkat tema utama penolakan warga Gili Meno terhadap perusahaan swasta dalam penyediaan air bersih, serta dukungan terhadap solusi pemerintah melalui PDAM. Di awal, dijelaskan bahwa mayoritas warga secara resmi menolak PT TCN dan lebih memilih solusi pipa bawah laut dari Gili Air yang dikelola oleh PDAM. Alasan penolakan warga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan harga air yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Bahkan, mereka mengancam keluar dari kawasan konservasi jika perusahaan tetap dipaksakan. Dukungan terhadap sikap warga datang dari Kepala Dusun Gili Meno, yang menyatakan bahwa bantuan sementara dari Pemda sudah membantu, namun tetap menekankan pentingnya solusi permanen dari PDAM. Wakil Ketua Komisi II DPRD KLU turut menyatakan bahwa penolakan warga adalah hak yang harus dihormati. Ia mendorong Pemda untuk segera mempercepat realisasi solusi jangka panjang melalui PDAM karena dianggap lebih layak secara teknis dan finansial. Secara keseluruhan, berita membentuk bingkai bahwa masyarakat Gili Meno menginginkan penyediaan air bersih yang adil, terjangkau, dan ramah lingkungan, serta menolak dominasi swasta dalam pengelolaan sumber daya vital.

### 4. Struktur Retoris

Berita menggunakan kata-kata untuk menekankan fakta mengenai aspirasi masyarakat. "Dominan menolak" menunjukkan mayoritas warga bersikap tegas menolak. "Tertuang dalam Berita Acara Hasil Musyawarah"

memperkuat bahwa penolakan bukan sekadar opini, melainkan sudah didokumentasikan resmi. "Dari 43 orang warga..., hanya 2 orang yang setuju" mempertegas fakta dominasi penolakan. "Penolakan didasari..." memberikan alasan logis dan berbasis fakta seperti kerusakan lingkungan dan harga air yang tidak sesuai. "Masyarakat intinya tetap menginginkan..." menunjukkan konsistensi sikap masyarakat. "Jika perusahaan dipaksakan masuk..." memperkuat sikap tegas warga dengan ancaman keluar dari kawasan konservasi. "Penolakan warga hal lumrah, dan itu harus dihormati" menunjukkan pernyataan DPRD bahwa sikap warga valid dan sah secara hukum dan moral. "PDAM... tidak pernah kita dengar merugi" menyampaikan keandalan PDAM sebagai fakta pendukung alternatif solusi. Terdapat satu gambar pada artikel berita ini, pemilihan gambar pada artikel ini menunjukkan sekelompok besar warga, sebagian besar wanita, sedang melakukan aksi protes di luar ruangan. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan "KAMI MASYARAKAT GILI MENOLAK PT TCN" yang jelas menunjukkan penolakan terhadap perusahaan tersebut, serta beberapa poster kecil lainnya. Gambar ini merepresentasikan aspirasi dominan warga Gili Meno, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, yang menolak kehadiran perusahaan swasta seperti PT TCN sebagai penyuplai air bersih. Mereka lebih menginginkan intervensi pemerintah daerah melalui PDAM dengan metode penyambungan pipa bawah laut dari Gili Air, serta mengkhawatirkan dampak kerusakan lingkungan dan harga air yang tidak terjangkau jika PT TCN terlibat.

#### 10. Analisis Artikel Berita 10 SUARANTB.com

Judul : Krisis Air Masih Tanpa Solusi Perhotelan di Gili Terawangan Mode "Defense", Menunggu Saatnya Tutup Usaha

Sumber : SUARANTB.com

Tanggal : 27 Juni 2024

Ringkasan: Krisis air bersih di Gili Trawangan yang telah berlangsung empat hari belum mendapat solusi pasti. Pelaku usaha perhotelan terpaksa

bertahan dengan berbagai cara sambil menunggu keputusan pemerintah. Harga air melonjak, dan hotel harus berbagi pasokan atau mencampur air sumur dengan air laut. Pemkab Lombok Utara belum mengambil langkah konkret di luar rencana kerja sama dengan PT TCN, meski tengah melobi KKP. Para pelaku usaha berharap solusi cepat agar sektor pariwisata tidak kembali terpukul seperti saat gempa dan pandemi.

Tabel 4.10 Hasil Analisis Artikel 10 SUARANTB.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Krisis Air Masih Tanpa SolusiPerhotelan di Gili Terawangan Mode “Defense”, Menunggu Saatnya Tutup Usaha
	Lead	Krisis air bersih hingga hari ke 4 pasca putus distribusi oleh PDAM Amerta Dayan Gunung, masih belum menemukan solusi. Hotel-hotel pun terpaksa menerapkan mode defensif (bertahan), namun sembari menunggu masanya untuk tutup usaha.
	Latar Informasi	Distribusi air bersih dari PDAM Amerta Dayan Gunung terhenti, memicu krisis air bersih yang berdampak pada sektor pariwisata, terutama hotel-hotel di Gili Trawangan. Pemda belum mengambil keputusan konkret, meskipun ada upaya lobi ke instansi pusat. DPRD dan pelaku usaha pariwisata menyampaikan keprihatinan dan harapan atas solusi segera. Pelaku usaha pun menjalankan strategi bertahan, bahkan hingga mengambil risiko terhadap fasilitas hotel. Meski terjadi pro-kontra terhadap perusahaan TCN, para pengusaha tetap fokus pada tanggung jawab PDAM sebagai mitra kontrak mereka.
	Kutipan	<p>Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU)</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belum mengambil keputusan solutif di luar ketergantungan pada MoU Persuda milik daerah – PDAM dengan PT. TCN. Kendati demikian, upaya dikabarkan sedang dilakukan. Dimana, Bupati, Manajemen PDAM beserta beberapa Kepala OPD berangkat ke Bali. (Pemda Kabupaten Lombok).</li> </ol> <p>Ketua PHRI Lombok Utara sekaligus Ketua Gili Hotel’s Association (GHA), Kusnawan</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ia mengajak semua pihak agar menyamakan persepsi agar solusi jangka pendek dapat dihadirkan pemerintah. Ancaman banyaknya wisatawan yang akan kembali dari Gili Trawangan, untuk sementara dapat ditanggulangi. Namun mengantisipasi kondisi krisis yang terus menerus terjadi, pada akhirnya akan memaksa para pengusaha untuk menutup usahanya. (Kusnawan).</li> <li>2. GMHotel Wilson’s Retreat ini bersyukur, antar manajemen hotel rata-rata kompak untuk saling bantu menampung keluhan tamu. Meski Pemda dinilai lambat, namun GHA melihat kondisi krisis air ini secara positif. (Kusnawan).</li> <li>3. Kusnawan menyatakan pihaknya tidak ingin terjebak pada perdebatan sebab akibat beroperasinya TCN terhadap dampak lingkungan. Sebab manajemen hotel dan masyarakat, berkontrak dengan PDAM, bukan dengan TCN.(Kusnawan).</li> </ol>

		<p>4. bagi Kusnawan, akar masalah telah disanggupi untuk diselesaikan sehingga krisis air saat ini harusnya bisa dibijaksanai. (Kusnawan).</p> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Saat alam Gili Trawangan ini rusak, maka apa yang menjadi daya tarik? Tidak ada." (Kusnawan).</li> <li>2. "Sekarang ini harga air galon naik menjadi Rp 35 ribu. Air kemasan kotak juga naik antara Rp 100 ribu, sampai Rp 150 ribu, tergantung ongkos angkut," (Kusnawan).</li> <li>3. "Mulanya banyak tamu yang akan kembali, tetapi kita sikapi dengan saling bantu antar hotel. Komplain di satu hotel ditanggulangi dengan mengoper tamu ke hotel lain," (Kusnawan).</li> <li>4. "Beberapa hotel bahkan mempertaruhkan mesin dan peralatannya hanya untuk bertahan. Water heater misalnya, yang sejatinya tidak boleh kena air payau, terpaksa digunakan," (Kusnawan).</li> <li>5. "Bahwa beban ini bukan hanya tanggung jawab Pemda tetapi semua, lebih-lebih manajemen juga perlu memberi makan banyak karyawan. Kami sudah trauma dengan 2 kejadian sebelumnya, yaitu Gempa dan Covid. Sehingga dengan kondisi ini, kami mencoba bertahan." (Kusnawan).</li> <li>6. "Iya, kami saling bantu, sampai sejauh kami bisa bertahan, sampai titik darah penghabisan. Tidak tahu untuk berapa lama. Kalau pun kondisi ini berlama-lama, maka kami harus tutup walaupun kami tahu risikonya sangat besar," (Kusnawan).</li> <li>7. "Terlepas dari TCN TCU, TCD, kami berkontrak dengan PDAM. Apakah benar PDAM atau Pemda mau merusak? Dan, kalau pun terjadi kerusakan, apakah benar akibat eksekusi atau saat konstruksi TCN," (Kusnawan).</li> <li>8. "Cuma kembali lagi, air ini kebutuhan orang banyak. Ibarat kata, hatta sebuah pohon itu melindungi, tetapi dengan menebangnya menyelamatkan orang banyak, maka tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, harus ada trust juga kepada pemerintah dilihat dari solusi atas sebuah permasalahan," (Kusnawan).</li> </ol> <p>Ketua Komisi II Bidang Pariwisata dan Ekonomi – DPRD KLU, Hakamah, S.KH.</p> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kami mendapat info kalau Pak Bupati, didampingi PDAM, Kadis Perhubungan, Kepala Bappeda, Dinas PUPR dan Manajemen TCN sedang di Bali. Kita doakan, lobi ke PSDKP Benoa di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi lampu hijau untuk beroperasi," (Hakamah).</li> </ol>
<p>Sumber</p> <p>Pernyataan Opini Penutup</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU),</li> <li>2. Ketua Komisi II Bidang Pariwisata dan Ekonomi – DPRD KLU, Hakamah, S.KH.</li> <li>3. Ketua PHRI Lombok Utara sekaligus Ketua Gili Hotel's Association (GHA), Kusnawan,</li> </ol> <p>Tidak ada</p>	<p>Artinya bagi Kusnawan, akar masalah telah disanggupi untuk diselesaikan sehingga krisis air saat ini harusnya bisa dibijaksanai. "Saat alam Gili Trawangan ini rusak, maka apa yang menjadi daya tarik? Tidak ada." "Cuma kembali lagi, air ini kebutuhan orang banyak. Ibarat kata, hatta sebuah pohon itu melindungi, tetapi dengan menebangnya menyelamatkan orang banyak, maka tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, harus ada trust juga kepada pemerintah dilihat dari solusi atas sebuah permasalahan," sarannya.</p>
<p><b>Struktur Skrip</b></p>	<p><i>What</i></p>	<p>Krisis air bersih di Gili Trawangan masih belum terselesaikan hingga hari keempat setelah distribusi dari PDAM terhenti. Hotel-hotel beroperasi dalam mode</p>

		bertahan dan terancam tutup. Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
	<i>Where</i>	
	<i>When</i>	Krisis memuncak hingga 26 Juni 2024 atau hari ke-4 setelah distribusi air putus. Delegasi Pemda ke Bali terjadi sekitar akhir Juni 2024.
	<i>Who</i>	Berita menggunakan Ketua PHRI Lombok Utara/GHA Lalu Kusnawan dan Ketua Komisi II Bidang Pariwisata dan Ekonomi DPRD KLU, Hakamah, S.KH sebagai sumber. Namun, berita juga menyebutkan Pemda Lombok Utara, PDAM Amerta Dayan Gunung, PT TCN, serta pelaku usaha perhotelan dan masyarakat Gili Trawangan.
	<i>Why</i>	Karena distribusi air bersih dari PDAM terhenti dan belum ada solusi konkret. Ketergantungan terhadap kerja sama PDAM-TCN serta perdebatan soal dampak lingkungan menambah kerumitan.
	<i>How</i>	Pengusaha hotel bertahan dengan berbagai cara, seperti mencampur air payau dan laut, memindahkan tamu ke hotel lain, dan mempertaruhkan peralatan. Pemda sedang berupaya lobi ke KKP di Bali untuk mencari jalan keluar.
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1–2 menjelaskan kondisi awal krisis air bersih di Gili Trawangan, di mana hingga hari ke-4 setelah terputusnya distribusi air oleh PDAM, belum ada solusi yang jelas. Pemerintah daerah dianggap pasif dan masih bergantung pada kolaborasi dengan pihak swasta, sementara upaya lobi sedang dilakukan di Bali. Paragraf 3–4 mengungkapkan keprihatinan DPRD dan pemangku kepentingan pariwisata mengenai dampak langsung krisis air terhadap keberlangsungan industri perhotelan dan pariwisata. Ditegaskan juga bahwa keterlambatan keputusan dari Pemda memperburuk situasi. Paragraf 5–6 menjelaskan dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha, termasuk kenaikan harga air bersih. Ketua GHA menekankan pentingnya kesamaan pandangan untuk mencari solusi cepat guna mencegah kepulangan wisatawan dan potensi penutupan hotel. Paragraf 7–8 menguraikan strategi defensif yang diterapkan oleh para pengusaha hotel, seperti berbagi tamu antar hotel dan mencampurkan air payau dengan air laut agar tetap dapat beroperasi. Terlihat adanya solidaritas yang tinggi di antara manajemen hotel, namun juga tekanan yang berat untuk bertahan. Paragraf 9–11 menunjukkan posisi kritis namun realistis dari pengusaha terhadap peran Pemda dan PDAM. Meskipun menyadari adanya polemik lingkungan terkait TCN, mereka tetap berpegang pada kenyataan bahwa kontrak mereka adalah dengan PDAM. Fokus diarahkan pada solusi praktis, bukan pada perdebatan panjang mengenai penyebabnya. Paragraf 12–13 menutup dengan pandangan pragmatis: bahwa kerusakan lingkungan memang penting, tetapi kebutuhan air menyangkut hajat hidup orang banyak. Ditekankan seruan agar pemerintah diberikan kepercayaan dan dapat bertindak bijaksana dalam menyelesaikan krisis.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Kata-kata yang menekankan fakta, yakni: "Krisis air bersih hingga hari ke-4 pasca putus distribusi..." "Masih belum menemukan solusi" "Hotel-hotel pun terpaksa menerapkan mode defensif" "Harga air galon naik menjadi Rp 35 ribu" dan "air kemasan kotak naik antara Rp 100 ribu – Rp 150 ribu" "Beberapa hotel bahkan mempertaruhkan mesin dan peralatannya" "Sampai titik darah penghabisan" "Kami sudah trauma dengan 2 kejadian sebelumnya, yaitu Gempa dan Covid"

---

"Kami berkontrak dengan PDAM, bukan dengan TCN"  
"Air ini kebutuhan orang banyak"  
"Tidak tahu untuk berapa lama. Kalau pun kondisi ini berlama-lama, maka kami harus tutup"



Salah seorang penjual cinderamata sedang melayani wisatawan yang akan meninggalkan Gili Trawangan. Sekarang ini, Gili Trawangan dihadapkan dengan krisis air bersih

---

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini disusun untuk menunjukkan bahwa krisis air bersih di Gili Trawangan belum terselesaikan hingga hari keempat, dan mulai mengancam kelangsungan usaha perhotelan. Judul dan lead menekankan bahwa hotel-hotel dalam kondisi bertahan atau “mode defense” sambil menunggu kemungkinan terpaksa tutup. Latar informasi menyebut bahwa suplai air dari PDAM terhenti, tetapi belum ada solusi konkret dari Pemda. Kutipan dari DPRD menyampaikan keprihatinan atas lambatnya penanganan, sementara pengusaha hotel yang tergabung dalam PHRI dan GHA menyoroti lonjakan harga air, kerusakan alat hotel, dan strategi bertahan antar hotel. Sebagian besar kutipan berasal dari Ketua PHRI, Lalu Kusnawan, yang menyuarakan kesulitan di lapangan dan pentingnya kepercayaan terhadap pemerintah, sambil menghindari perdebatan soal PT TCN. Berita berfokus pada sudut pandang pelaku usaha dan legislatif, tanpa respons dari Pemda atau PDAM. Secara keseluruhan, berita ini mbingkai bahwa krisis air bersih belum ditangani serius oleh pemerintah, dan sektor pariwisata di Gili berada dalam kondisi genting dan kritis.

### 2. Struktur Skrip

Berita ini menyajikan pelaku usaha dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dari krisis air. Berita menjelaskan krisis air terjadi karena distribusi air terputus, sehingga hotel dan masyarakat terdampak. Namun, belum ada solusi nyata karena pemerintah masih berupaya secara politis, tetapi belum ada upaya teknis. Tokoh utama yang disorot adalah para pengusaha hotel, seperti yang disampaikan oleh Ketua PHRI Lombok

Utara, Lalu Kusnawan, serta DPRD yang turut menyuarakan keprihatinan. Masalah utama adalah terhentinya distribusi air dari PDAM selama empat hari berturut-turut, tanpa solusi yang jelas dari pemerintah daerah. Krisis ini membuat hotel-hotel terpaksa bertahan dalam kondisi darurat, bahkan terancam tutup. Pihak-pihak yang terlibat mencakup Pemda Lombok Utara, PDAM Amerta Dayan Gunung, dan PT TCN sebagai bagian dari sistem distribusi yang bermasalah. Masyarakat dan pelaku usaha menjadi korban langsung dari krisis ini. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha meliputi berbagai upaya bertahan, seperti mencampur air laut dan air payau, memindahkan tamu ke hotel lain, hingga mengambil risiko terhadap peralatan hotel. Sementara itu, Pemda terlihat belum menyelesaikan masalah secara konkret, dan hanya diketahui tengah melakukan lobi ke KKP di Bali.

### 3. ● Struktur Tematik

Berita ini menyusun tema utama krisis air bersih di Gili Trawangan sebagai ancaman nyata bagi pariwisata, yang diperburuk oleh lambannya respon pemerintah daerah. Di awal, dijelaskan bahwa distribusi air dari PDAM telah terhenti selama empat hari tanpa solusi jelas, sementara Pemda dianggap pasif dan masih menggantungkan harapan pada kerja sama dengan pihak swasta. Kekhawatiran datang dari DPRD dan pelaku pariwisata, yang menilai keterlambatan keputusan memperparah dampak ekonomi. Kenaikan harga air bersih dan ancaman terhadap keberlangsungan hotel menjadi isu mendesak. Ketua GHA menegaskan pentingnya penyatuan sikap untuk menghindari eksodus wisatawan. Para pengusaha hotel pun mengambil langkah darurat, seperti berbagi tamu dan mencampur air payau dengan air laut. Solidaritas di antara mereka kuat, namun tekanan operasional sangat tinggi. Meski menyadari polemik hukum dan lingkungan yang menyertai PT TCN, fokus utama mereka adalah menyelamatkan bisnis melalui PDAM, sesuai kontrak yang ada. Berita ditutup dengan seruan pragmatis: meskipun isu lingkungan penting, kebutuhan air bersih tidak bisa ditunda. Pemerintah didorong untuk segera bertindak dan diberi kepercayaan dalam menyelesaikan krisis ini secara bijaksana. Secara

keseluruhan, berita membentuk bingkai bahwa penanganan krisis air harus mengutamakan solusi praktis dan cepat, karena menyangkut hajat hidup dan kelangsungan ekonomi, terutama sektor pariwisata.

#### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan kata-kata untuk menekankan fakta mengenai pelaku usaha berjuang sendirian menghadapi krisis air bersih, sedangkan pemerintah dianggap belum memberikan solusi langsung. "Krisis air bersih hingga hari ke-4 pasca putus distribusi..." menunjukkan fakta waktu dan kondisi nyata yang sedang berlangsung. "Masih belum menemukan solusi" menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penyelesaian yang dicapai. "Hotel-hotel pun terpaksa menerapkan mode defensif" menunjukkan tindakan nyata dan mendesak yang dilakukan pelaku usaha. "Harga air galon naik menjadi Rp 35 ribu" dan "air kemasan kotak naik antara Rp 100 ribu – Rp 150 ribu" menunjukkan dampak ekonomi dari krisis. "Beberapa hotel bahkan mempertaruhkan mesin dan peralatannya" menunjukkan risiko teknis yang diambil demi bertahan. "Sampai titik darah penghabisan" menunjukkan keseriusan situasi dan tekad bertahan. "Kami sudah trauma dengan 2 kejadian sebelumnya, yaitu Gempa dan Covid" menunjukkan fakta sejarah untuk menguatkan kondisi tertekan saat ini. "Kami berkontrak dengan PDAM, bukan dengan TCN" menunjukkan posisi hukum dan tanggung jawab. "Air ini kebutuhan orang banyak" menekankan bahwa isu ini menyangkut hak dasar manusia. "Tidak tahu untuk berapa lama. Kalau pun kondisi ini berlama-lama, maka kami harus tutup" menunjukkan kemungkinan terburuk jika krisis tak segera ditangani.

Pemilihan foto pada artikel berita ini menunjukkan aktivitas di sebuah area yang tampak seperti pasar atau tempat perbelanjaan terbuka di pinggir pantai, di mana seorang pedagang sedang berinteraksi dengan seorang pengunjung di depan deretan kalung atau aksesoris yang dipajang. Gambar ini secara umum menggambarkan suasana aktivitas ekonomi dan pariwisata yang berlangsung di Gili Trawangan. Dalam konteks krisis air bersih yang dijelaskan dalam artikel, gambar ini dapat menyiratkan dampak tidak langsung dari permasalahan tersebut terhadap aktivitas ekonomi lokal dan

kunjungan wisatawan. Meskipun tidak secara langsung menunjukkan krisis air, kehadiran wisatawan dan aktivitas perdagangan menekankan pentingnya ketersediaan air bersih untuk keberlangsungan sektor pariwisata dan kehidupan masyarakat di Gili.

### 1. Analisis Artikel Berita 1 detik.com

Judul : 27 Hari Tak Dapat Air Bersih, Pelaku Wisata di Gili Meno Menjerit

Sumber : detik.com

Tanggal : 19 Juni 2024

Ringkasan : Krisis air bersih di Gili Meno telah berlangsung selama 27 hari, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 3,5 juta setiap harinya bagi para pelaku usaha pariwisata. Sebanyak 120 pengusaha terpaksa menggunakan air sumur yang dicampur dengan air asin atau membeli air galon dengan harga yang tinggi. Ketua GHA meminta agar Pemkab Lombok Utara segera mengambil tindakan. PDAM pernah memutuskan pasokan air, dan saat ini distribusi air baru normal di Gili Trawangan. Dinas Pariwisata NTB menyarankan agar para pengusaha sementara mencari solusi secara mandiri sambil menunggu upaya koordinasi dengan PDAM dan aparat.

Tabel 4.11 Hasil Analisis Artikel 1 Detik.com

Perangkat Framing Struktur Sintaksis	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
	Judul	27 Hari Tak Dapat Air Bersih, Pelaku Wisata di Gili Meno Menjerit
	Lead	Pelaku wisata di Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjerit. Musababnya, mereka sudah tak mendapat air bersih selama 27 hari..
	Latar Informasi	Masalah dimulai ketika PDAM Amerta Dayan Gunung memutuskan aliran air ke Gili Meno. Meskipun aliran ke Gili Trawangan sudah normal kembali, Gili Meno masih terdampak. Para pelaku usaha pariwisata harus membeli air galon mahal dan menggunakan air sumur asin. Pemerintah daerah dan provinsi mulai mencari solusi, meskipun belum membuahkan hasil konkret
	Kutipan	Ketua Gili Hotel Association (GHA) Kusnawan Kutipan Tidak Langsung: 1. Ketua Gili Hotel Association (GHA) Lalu Kusnawan mengungkapkan krisis air bersih tersebut mengakibatkan para pengusaha hotel dan restoran di wilayah itu merugi Rp 3,5 juta per hari. Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara segera mencari solusi terkait

		<p>masalah tersebut.(Kusnawan).</p> <p>2. Menurut Kusnawan, kondisi tersebut bisa membuat wisatawan enggan berlibur ke Gili Meno. Ia mengungkapkan PDAM Amerta Dayan Gunung yang menyediakan air bersih di Lombok Utara juga sempat memutus pasokan air ke Gili Trawangan.(Kusnawan).</p> <p>3. Akibat krisis air tersebut, Kusnawan berujar, sebanyak 120 pelaku usaha di wilayah tersebut terpaksa memanfaatkan air sumur yang dicampur dengan air asin. Ada pula yang harus membeli air isi ulang seharga Rp 15 ribu per galon untuk keperluan minum dan mandi.(Kusnawan).</p> <p>Kutipan Langsung:</p> <p>1. "Bayangkan sampai sekarang belum selesai krisis air ini,"(Kusnawan).</p> <p>2. "Sementara aliran air ke Trawangan sudah normal, yang belum ini kan ke Gili Meno,"(Kusnawan).</p> <p>Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Maladi</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <p>1. Jamal tak menampik krisis air bersih tersebut berdampak terhadap wisatawan yang berlibur di Gili Meno. Dia menyarankan agar para pengusaha bersedia mengupayakan air bersih secara sukarela untuk sementara waktu.(Jamaludin Maladi).</p> <p>Kutipan Langsung:</p> <p>1. "PDAM sementara perlu koordinasi dengan pengusaha. Masalah hukum, PDAM bisa juga koordinasi dengan kejaksanaan dan Polda NTB," (Jamaludin Maladi).</p> <p>2. "Kami sudah komunikasi dan rapat-rapat,"(Jamaludin Maladi).</p>
	Sumber	<p>1. Ketua Gili Hotel Association (GHA) Kusnawan</p> <p>2. Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Maladi</p>
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	"Kami sudah komunikasi dan rapat-rapat," tandas Jamal"
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Terjadi krisis air bersih di Gili Meno selama 27 hari
	<i>Where</i>	Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, NTB
	<i>When</i>	Kondisi terjadi hingga 19 Juni 2024
	<i>Who</i>	Pelaku wisata, terutama pengusaha hotel dan restoran di Gili Meno
	<i>Why</i>	Karena PDAM Amerta Dayan Gunung menghentikan aliran air bersih ke Gili Meno
	<i>How</i>	Para pelaku wisata terpaksa menggunakan air sumur asin atau membeli air galon dengan harga tinggi; pemerintah daerah mulai melakukan koordinasi untuk mencari solusi
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 menguraikan situasi darurat terkait krisis air bersih yang dialami oleh pelaku wisata di Gili Meno, termasuk kerugian finansial yang dialami oleh pengusaha hotel dan restoran serta tuntutan kepada Pemkab untuk segera mengambil tindakan.</p> <p>Paragraf 3–5 menekankan penyebab teknis dari krisis ini, yaitu penghentian distribusi air oleh PDAM. Di bagian ini juga disajikan perbandingan dengan kondisi di Gili Trawangan yang pasokannya telah kembali normal, sementara Gili Meno masih mengalami dampak.</p> <p>Paragraf 6 menjelaskan dampak nyata di lapangan, di mana para pengusaha terpaksa menggunakan air sumur yang tercampur dengan air asin atau membeli air isi ulang dengan harga yang tinggi untuk kebutuhan dasar seperti mandi dan minum.</p> <p>Paragraf 7–9 menguraikan respons pemerintah, khususnya dari Kepala Dinas Pariwisata NTB, yang menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jamal juga menyarankan agar pengusaha bersikap proaktif dan saling membantu untuk sementara waktu, sambil</p>

<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>menunggu solusi permanen ditemukan. Kata-kata yang menekankan fakta, yakni: "27 hari tak mendapat air bersih" "Pelaku wisata di Gili Meno menjerit" "Krisis air bersih tersebut mengakibatkan para pengusaha hotel dan restoran... merugi Rp 3,5 juta per hari" "Sampai sekarang belum selesai krisis air ini" "Terpaksa memanfaatkan air sumur yang dicampur dengan air asin" "Membeli air isi ulang seharga Rp 15 ribu per galon" "Sementara aliran air ke Trawangan sudah normal, yang belum ini kan ke Gili Meno"</p>
		
		Pantai di Gili Meno, Lombok, NTB

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini menyajikan krisis air bersih di Gili Meno sebagai masalah darurat yang belum terselesaikan selama 27 hari. Judul yang digunakan, yakni "Pelaku Wisata di Gili Meno Menjerit", langsung menciptakan kesan penderitaan di kalangan pelaku usaha pariwisata. Pada bagian lead, persoalan pokok disampaikan secara lugas, yakni ketidakterediaan air bersih sebagai penyebab utama keresahan. Bagian latar belakang menjelaskan bahwa masalah bermula dari pemutusan aliran air oleh PDAM, dan bahwa Gili Meno belum menerima penanganan secepat Gili Trawangan, menimbulkan kesan adanya ketimpangan. Sumber kutipan didominasi oleh Ketua GHA, Kusnawan, yang menyampaikan dampak nyata dan kerugian ekonomi secara rinci. Sebaliknya, pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata NTB hanya memberikan pernyataan normatif, seperti soal rapat dan koordinasi, tanpa solusi konkret. Penutup berita mencantumkan pernyataan pemerintah yang terdengar formal dan kurang tanggap terhadap situasi lapangan. Dengan struktur ini, berita membingkai pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dan menyoroti lambannya respons pemerintah.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini membentuk cerita dengan alur yang jelas tentang krisis air bersih yang melanda Gili Meno selama 27 hari, berdampak langsung pada pelaku usaha pariwisata, terutama pengelola hotel dan restoran. Tokoh sentral dalam narasi ini adalah para pelaku wisata yang menjadi korban utama dari penghentian aliran air oleh PDAM Amerta Dayan Gunung. Masalah utamanya adalah terputusnya pasokan air bersih, yang memaksa pelaku usaha menggunakan air sumur asin atau membeli air galon dengan harga tinggi, sehingga membebani operasional mereka. Pemerintah daerah Lombok Utara mulai bergerak, tetapi dinilai lamban dan belum menunjukkan langkah konkret. Jika tidak segera ditangani, krisis ini berpotensi merusak citra pariwisata Gili Meno dan mengancam kelangsungan industri pariwisata lokal.

## 3. Struktur Tematik

Berita ini menjelaskan krisis air bersih di Gili Meno sebagai isu utama yang berdampak langsung pada sektor pariwisata. Di awal, ditekankan kerugian yang dialami pelaku usaha seperti hotel dan restoran serta desakan kepada pemerintah daerah untuk segera bertindak. Selanjutnya, dijelaskan penyebab teknis krisis, yakni penghentian distribusi air oleh PDAM, dengan perbandingan kondisi yang lebih baik di Gili Trawangan untuk menegaskan ketimpangan. Kondisi darurat di lapangan digambarkan melalui penggunaan air sumur asin dan mahalunya air isi ulang. Di akhir, respons pemerintah disorot, yang mencakup upaya koordinasi dan imbauan kepada pengusaha untuk saling membantu sambil menunggu solusi permanen. Secara tematik, berita menunjukkan urgensi dan perlunya penanganan cepat terhadap krisis air bersih.

## 4. Struktur Retoris

Berita menggunakan kata yang menekankan fakta tentang krisis air bersih yang dialami pelaku wisata di Gili Meno. Pertama, "27 hari tak mendapat air bersih" menunjukkan durasi krisis secara konkret dan dramatis. "Pelaku wisata di Gili Meno menjerit" menggambarkan tekanan berat yang dialami. "Krisis air bersih tersebut mengakibatkan para pengusaha hotel dan

restoran... merugi Rp 3,5 juta per hari" menyajikan dampak ekonomi nyata dengan angka spesifik. "Sampai sekarang belum selesai krisis air ini" menekankan bahwa masalah belum terselesaikan meski sudah berlangsung lama. "Terpaksa memanfaatkan air sumur yang dicampur dengan air asin" menjelaskan solusi darurat yang tidak layak atau sehat. "Membeli air isi ulang seharga Rp 15 ribu per galon" menegaskan biaya tambahan yang memberatkan. "Sementara aliran air ke Trawangan sudah normal, yang belum ini kan ke Gili Meno" membandingkan fakta kondisi antarwilayah dan ketimpangan penanganan.

Pada artikel berita ini terdapat satu gambar, Gambar ini secara visual menggambarkan lokasi Gili Meno, Lombok, NTB, yang sedang dilanda krisis air bersih seperti yang diceritakan dalam artikel. Keindahan alam yang terekam dalam foto ini berbanding terbalik dengan kenyataan pahit yang dihadapi para pelaku wisata dan pengunjung akibat tidak adanya pasokan air bersih selama 27 hari, mengancam citra pariwisata dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

## 2. Analisis Artikel Berita 2 detik.com

Judul : High Season, Pengusaha Hotel di Tiga Gili Lombok  
Merugi Rp 8 Miliar per Hari

Sumber : detik.com

Tanggal : 25 Juni 2024

Ringkasan : Ratusan pengusaha hotel di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air mengalami kerugian hingga Rp 8 miliar per hari akibat krisis air bersih yang melanda di tengah musim wisata (high season). Para pelaku usaha terpaksa membeli air isi ulang untuk tamu hotel, dan beberapa properti bahkan terpaksa tutup sementara karena stok air habis. Ketua Gili Hotel Association mendesak pemerintah segera mengatasi krisis ini, sementara Dinas Pariwisata NTB menyarankan pengusaha untuk sementara mencari solusi mandiri sambil menunggu upaya dari PDAM dan pemerintah daerah.

Tabel 4.12 Hasil Analisis Artikel 2 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	High Season, Pengusaha Hotel di Tiga Gili Lombok Merugi Rp 8 Miliar per Hari
	Lead	Ratusan pengusaha hotel di tiga gili Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), merugi hingga miliaran rupiah per hari. Musababnya, hotel-hotel di Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air kesulitan mengakses air bersih sejak bulan lalu.
	Latar Informasi	Krisis air bersih terjadi sejak bulan lalu di tiga Gili di Lombok, NTB. Hal ini berdampak besar terhadap operasional hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya. Saat krisis terjadi, kawasan tersebut sedang dalam masa high season, sehingga kebutuhan akan air bersih meningkat tajam. Banyak pengusaha harus membeli air isi ulang dengan harga mahal. Sebagian properti bahkan terpaksa tutup. Ketua Gili Hotel Association menyebut kerugian mencapai Rp 8 miliar per hari dan meminta pemerintah bertindak cepat. Sementara itu, pemerintah daerah menyarankan adanya koordinasi sukarela dan jangka pendek dengan PDAM serta penegak hukum.
	Kutipan	<p>Ketua Gili Hotel Association (GHA) Kusnawan</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menurut Kusnawan, para pengusaha hotel di tiga gili terpaksa membeli air isi ulang untuk kebutuhan tamu hotel. Ia mengeluhkan krisis air terjadi saat sektor pariwisata tengah memasuki musim ramai atau high season. Saat-saat seperti itu, dia melanjutkan, kawasan tiga gili ramai dikunjungi wisatawan.(Kusnawan).</li> <li>Berdasarkan hitung-hitungan Kusnawan, kerugian pengusaha hotel di tiga gili mencapai Rp 8 miliar per hari. Ia mengaku sudah menyampaikan keluhan para pengusaha hotel tersebut kepada DPRD Lombok Utara. (Kusnawan).</li> <li>Kusnawan mengungkapkan sejumlah properti di kawasan pariwisata itu terpaksa berhenti beroperasi sementara sejak kesulitan mendapat air bersih.(Kusnawan).</li> <li>Kusnawan berharap pemerintah segera mencari solusi terkait krisis air bersih yang terjadi di kawasan tiga gili. Selain hotel, sejumlah restoran maupun usaha pariwisata lainnya juga merugi akibat krisis air.(Kusnawan).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"Kalau bisa dibilang, kami ini sudah sekarat,"(Kusnawan).</li> <li>"Jika sampai sore ini tidak ada keputusan, 435 properti di Gili Trawangan akan memutuskan menolak tamu. Kami sudah tidak ada stok air lagi di hotel," (Kusnawan).</li> <li>"Di Gili Meno sudah ada enam properti yang tutup. Sementara di Gili Trawangan ada lima properti yang tutup," (Kusnawan).</li> <li>"Nggak ada jalan keluar lagi, intinya harus siapkan air bersih. Pemerintah sudah menyiapkan PDAM, sekarang wajar kami menuntut hak kami," (Kusnawan).</li> </ol> <p>Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jamal menyarankan agar para pengusaha bersedia mengupayakan air bersih secara sukarela untuk sementara waktu. (Jamal).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>"PDAM sementara perlu koordinasi dengan pengusaha. Masalah hukum, PDAM bisa juga koordinasi dengan kejaksaan dan Polda NTB,"(Jamal)</li> </ol>

	Sumber	1. Ketua Gili Hotel Association (GHA) Kusnawan 2. Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T.
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	Jamal menyarankan agar para pengusaha bersedia mengupayakan air bersih secara sukarela untuk sementara waktu. "PDAM sementara perlu koordinasi dengan pengusaha. Masalah hukum, PDAM bisa juga koordinasi dengan kejaksaan dan Polda NTB," kata Jamal, Rabu (19/6/2024).
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Krisis air bersih menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha pariwisata di tiga Gili
	<i>Where</i>	Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Lombok, NTB
	<i>When</i>	Sejak bulan lalu hingga saat berita diterbitkan (Juni 2024)
	<i>Who</i>	Pengusaha hotel dan restoran, Ketua GHA Lalu Kusnawan, Pemerintah Daerah, PDAM, dan pihak penegak hukum
	<i>Why</i>	Kesulitan mengakses air bersih karena distribusi air terganggu dan tidak adanya stok air yang mencukupi
	<i>How</i>	Pengusaha membeli air isi ulang, sebagian properti tutup, dan mereka menuntut pemerintah bertindak
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1–2 menguraikan masalah utama, yaitu kerugian signifikan yang dialami oleh ratusan pengusaha hotel di tiga gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) akibat krisis air bersih yang telah berlangsung selama satu bulan. Paragraf 3–4 menjelaskan dampak langsung, yaitu kebutuhan hotel yang harus dipenuhi dengan membeli air isi ulang di tengah musim liburan (high season), serta besarnya potensi kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 8 miliar per hari. Paragraf 5–6 menggambarkan konsekuensi lebih lanjut, yaitu ancaman penolakan terhadap tamu karena kehabisan stok air serta sejumlah properti yang terpaksa tutup sementara akibat krisis ini. Paragraf 7 menyampaikan seruan dan tuntutan dari pihak pengusaha kepada pemerintah untuk segera mencari solusi konkret karena kerugian juga dirasakan oleh sektor lain seperti restoran dan usaha wisata lainnya. Paragraf 8 memuat respon pemerintah melalui pernyataan Jamal, yang menyarankan agar pengusaha mengusahakan air bersih secara sukarela untuk sementara waktu, sambil PDAM melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kejaksaan dan kepolisian.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Kata-kata yang menekankan fakta, yakni: "Merugi hingga miliaran rupiah per hari" "Rata-rata kerugian per hari Rp 3,5 juta dikalikan 2.500 kunjungan wisatawan" "Kerugian pengusaha hotel di tiga gili mencapai Rp 8 miliar per hari" "Sudah sekarat" "Kami sudah tidak ada stok air lagi di hotel" "Gili Meno sudah ada enam properti yang tutup... Gili Trawangan ada lima properti yang tutup" "435 properti di Gili Trawangan akan memutuskan menolak tamu" "Nggak ada jalan keluar lagi... kami menuntut hak kami"
		
		Foto udara suasana Gili Trawangan di Kepulauan Gili,

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini menyajikan krisis air bersih di tiga gili (Trawangan, Meno, dan Air) sebagai ancaman serius terhadap sektor pariwisata di tengah musim ramai (high season). Judulnya yang mencantumkan kerugian Rp 8 miliar per hari langsung menarik perhatian dan memperkuat kesan bahwa dampaknya sangat besar secara ekonomi. Lead berita menekankan bahwa krisis ini telah berlangsung sejak bulan lalu dan sangat memukul operasional hotel serta restoran. Latar belakang peristiwa disusun dengan menyoroti peningkatan kebutuhan air bersih selama high season, yang menyebabkan banyak pengusaha harus membeli air isi ulang dengan harga mahal, bahkan menutup usaha. Sumber utama yang dikutip adalah Kusnawan, Ketua Gili Hotel Association, yang menyuarakan kepanikan pelaku usaha dengan data kerugian dan jumlah properti yang sudah tutup. Pernyataan langsung Kusnawan seperti “kami ini sudah sekarat” dan ancaman penolakan tamu memperkuat tekanan emosional dalam berita. Sebaliknya, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata NTB tampil dengan kutipan singkat dan normatif, menyarankan solusi sementara yang bersifat sukarela dan administratif, tanpa menunjukkan langkah nyata. Penutup berita berisi kutipan dari pemerintah yang kembali menekankan perlunya koordinasi, memberi kesan bahwa tanggapan pemerintah belum sebanding dengan urgensi masalah. Dengan struktur seperti ini, berita meringkai pelaku usaha sebagai korban krisis yang mendesak bantuan, sementara pemerintah digambarkan masih sibuk dengan koordinasi dan prosedur.

### 2. Struktur Skrip

Berita ini membangun narasi tentang krisis air bersih yang berdampak serius pada sektor pariwisata di tiga destinasi utama Lombok: Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Sejak bulan lalu hingga Juni 2024, para pengusaha hotel dan restoran di kawasan tersebut mengalami kesulitan besar akibat terganggunya distribusi air bersih dan minimnya stok air yang tersedia.

Tokoh utama yang tampil dalam sorotan adalah Ketua GHA, Lalu Kusnawan, yang menyuarakan keluhan pelaku usaha dan mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Dampaknya cukup parah, yakni sebagian pelaku usaha terpaksa membeli air isi ulang dengan biaya tinggi, bahkan beberapa properti terpaksa ditutup sementara. Pemerintah daerah, PDAM, dan pihak penegak hukum disorot karena dinilai lamban merespons situasi ini. Jika krisis tidak segera diatasi, sektor pariwisata di kawasan Gili terancam mengalami kerugian jangka panjang.

### 3. **Struktur Tematik**

Berita ini menjelaskan krisis air bersih di tiga gili sebagai persoalan serius yang mengancam keberlangsungan sektor pariwisata. Paragraf awal menyoroti kerugian besar yang dialami oleh ratusan pengusaha hotel akibat krisis yang telah berlangsung selama satu bulan. Dampak langsungnya terlihat dalam tingginya biaya operasional karena hotel harus membeli air isi ulang di tengah musim liburan, dengan potensi kerugian mencapai Rp 8 miliar per hari. Kondisi ini bahkan memaksa beberapa properti menolak tamu dan menghentikan operasional sementara. Tekanan terhadap pemerintah pun muncul dalam bentuk tuntutan pengusaha untuk segera menangani krisis ini secara konkret, karena dampaknya juga merembet ke restoran dan usaha wisata lain. Menanggapi hal ini, pemerintah melalui pernyataan Jamal menyarankan agar pengusaha saling membantu dalam pemenuhan air bersih, sembari PDAM berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Secara tematik, berita menyusun narasi yang menekankan skala kerugian, urgensi penanganan, dan keterbatasan respons pemerintah.

### 4. **Struktur Retoris**

Berita ini menggunakan kata-kata untuk menekankan bahwa krisis air bersih di tiga gili merupakan krisis yang berdampak langsung pada ekonomi dan pelayanan wisata. "Merugi hingga miliaran rupiah per hari" menekankan besarnya dampak ekonomi dengan angka besar yang konkret. "Rata-rata kerugian per hari Rp 3,5 juta dikalikan 2.500 kunjungan wisatawan" menunjukkan dasar perhitungan kerugian. "Kerugian

pengusaha hotel di tiga gili mencapai Rp 8 miliar per hari" menyampaikan estimasi total kerugian secara tegas dan besar skalanya. "Sudah sekarat" menekankan kondisi kritis dan nyaris lumpuh. "Kami sudah tidak ada stok air lagi di hotel" menyampaikan fakta langsung tentang ketiadaan kebutuhan pokok. "Gili Meno sudah ada enam properti yang tutup... Gili Trawangan ada lima properti yang tutup" menunjukkan dampak langsung berupa penutupan usaha. "435 properti di Gili Trawangan akan memutuskan menolak tamu" menegaskan tentang potensi tindakan drastis jika krisis tak ditangani. "Nggak ada jalan keluar lagi... kami menuntut hak kami" menunjukkan posisi pelaku usaha yang sudah berada di titik akhir kesabaran.

Pada artikel berita ini memiliki 1 gambar yang menyajikan pemandangan udara atau drone view yang indah dari salah satu Gili di Lombok, menampilkan garis pantai berpasir putih yang dipenuhi deretan bangunan, dermaga panjang dengan perahu-perahu bersandar, serta hamparan laut biru jernih yang memukau. Visual ini menggambarkan lokasi pariwisata utama, yaitu Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), yang ironisnya sedang dilanda krisis air bersih, seperti yang dijelaskan dalam artikel. Meskipun pemandangan yang disajikan tampak menawan dan ramai, kondisi krisis air yang berkepanjangan ini mengakibatkan kerugian miliaran rupiah bagi ratusan pengusaha hotel dan pariwisata di sana, bahkan memaksa beberapa properti untuk tutup, mengancam keberlangsungan industri pariwisata yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

### 3. Analisis Artikel Berita 3 detik.com

Judul : Krisis Air di Gili Trawangan Berujung Wisatawan Batal Booking Hotel

Sumber : detik.com

Tanggal : 14 Oktober 2024

Ringkasan : Krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno membuat sejumlah wisatawan membatalkan reservasi hotel hingga 10 persen, menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan dari 2.800 menjadi

2.100 orang. Para pelaku usaha mendesak pemerintah daerah dan PDAM segera menyelesaikan masalah ini. Pemerintah Provinsi NTB juga tengah mencari solusi jangka panjang, seperti memasok air melalui PDAM sebagaimana di Gili Air, serta mempertimbangkan kembali pencabutan izin PT TCN yang sebelumnya menyuplai air sulingan laut, meskipun dinilai merusak terumbu karang.

Tabel 4.13 Hasil Analisis Artikel 3 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Krisis Air di Gili Trawangan Berujung Wisatawan Batal Booking Hotel
	Lead	Krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dikeluhkan wisatawan. Sejumlah turis bahkan membatalkan booking atau pemesanan penginapan di kawasan tersebut. Walhasil, pelaku wisata di kedua pulau itu merugi.
	Latar Informasi	Sejak awal Oktober 2024, pasokan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno terganggu. Hal ini berdampak pada kenyamanan wisatawan hingga terjadi pembatalan penginapan. Pelaku pariwisata menuntut pemerintah daerah dan PDAM untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Krisis diperparah dengan pencabutan izin PT TCN, penyedia utama air bersih. Pemerintah Provinsi NTB sedang mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk opsi pipa bawah laut seperti di Gili Air.
	Kutipan	<p>Ketua Gili Hotel Association (GHA) Kusnawan Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Kusnawan, dampak dari pembatalan pemesanan ini cukup besar bagi para pengusaha perhotelan. Ia menjelaskan permasalahan air bersih di kawasan tersebut berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah melalui perusahaan daerah air minum (PDAM). (Kusnawan).</li> <li>2. "Baru isu saja, sudah 10 persen yang cancel," (Kusnawan).</li> <li>3. "Sekarang muncul isu lagi, beginilah kondisi pariwisata kita saat ini," (Kusnawan).</li> <li>4. "Kami meminta agar pemerintah daerah segera menemukan solusi terkait permasalahan ini. PDAM diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik agar Gili Trawangan dan Gili Meno tidak mengalami krisis air," (Kusnawan).</li> <li>5. "Kami tidak bisa membatasi tamu yang melakukan pembatalan karena memang tidak ada jaminan pasokan air ke depan," (Kusnawan).</li> </ol> <p>Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T.</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jamal menjelaskan pencabutan izin PT TCN dapat memicu krisis air yang akan berdampak besar bagi pariwisata di Gili Trawangan dan Gili Meno. Terlebih menjelang musim liburan akhir tahun yang biasanya menjadi high season bagi wisatawan (Jamaluddin Malady).</li> <li>2. Mantan Kepala Disperkim NTB ini juga berharap agar KKP, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara, dan PT TCN bisa duduk bersama mencari solusi terkait pencabutan izin ini. Sebelumnya, pencabutan izin PT TCN itu dilakukan karena adanya kerusakan terumbu karang di sekitar</li> </ol>

		<p>area pengeboran air di Gili Trawangan.(Jamaluddin Malady).</p> <p>3. Pemkab Lombok Utara, dia melanjutkan, perlu mulai memikirkan penyediaan pasokan air dari PDAM untuk Gili Trawangan dan Gili Meno, seperti yang telah diterapkan di Gili Air. Saat ini, hanya Gili Air yang menerima pasokan air bersih dari daratan melalui pipa air bawah laut yang disalurkan PDAM.(Jamaluddin Malady).</p> <p>Kutipan Langsung:</p> <p>1. "Kami minta KKP merevisi atau meninjau kembali izin PT TCN terkait dampak lingkungannya karena dampaknya masyarakat jadi kesulitan mendapatkan air. Terlebih lagi, sektor pariwisata di Gili akan terdampak secara ekonomi jika air bersih tidak tersedia," (Jamaluddin Malady).</p> <p>2. "Jika tidak ada pasokan air, pariwisata kita pasti akan merosot. Pengusaha hotel akan kehilangan pendapatan miliaran dan masyarakat yang tinggal di Gili Tramenra juga akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat pencabutan izin PT TCN,"(Jamaluddin Malady).</p> <p>3. "Ini perlu menjadi solusi jangka panjang. Pemkab Lombok Utara harus mulai memikirkan pasokan air dari PDAM untuk Gili Trawangan dan Gili Meno, seperti yang dilakukan di Gili Air. Anggarannya mungkin belum cukup, tetapi ini seharusnya bisa diprioritaskan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari Gili Trawangan,"(Jamaluddin Malady).</p>
	Sumber	<p>1. Ketua Gili Hotel Association (GHA) Kusnawan</p> <p>2. Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaludin Malady, S.Sos., M.T.</p>
	Pernyataan Opini Penutup	<p>Tidak ada</p> <p>"Ini perlu menjadi solusi jangka panjang. Pemkab Lombok Utara harus mulai memikirkan pasokan air dari PDAM untuk Gili Trawangan dan Gili Meno, seperti yang dilakukan di Gili Air. Anggarannya mungkin belum cukup, tetapi ini seharusnya bisa diprioritaskan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar berasal dari Gili Trawangan," imbuh Jamal.</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Krisis air bersih menyebabkan wisatawan membatalkan pemesanan penginapan dan kerugian pelaku usaha
	<i>Where</i>	Gili Trawangan dan Gili Meno, Lombok Utara, NTB
	<i>When</i>	Oktober 2024, menjelang high season akhir tahun
	<i>Who</i>	Wisatawan, pelaku usaha (GHA), Pemprov NTB, PDAM, PT TCN, KKP
	<i>Why</i>	Pasokan air terganggu karena pencabutan izin PT TCN dan belum adanya sistem distribusi alternatif
	<i>How</i>	Wisatawan membatalkan booking, pengusaha rugi, pemerintah mencari solusi seperti pemanfaatan PDAM
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 menguraikan keluhan yang dialami oleh wisatawan serta dampak awal dari krisis air, yang meliputi pembatalan pemesanan akomodasi di Gili Trawangan dan Gili Meno, yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi pelaku industri pariwisata.</p> <p>Paragraf 3–5 menggambarkan kekhawatiran yang dirasakan oleh para pengusaha hotel dan permohonan mereka kepada pemerintah untuk mencari solusi, termasuk tanggung jawab PDAM sebagai pengelola pasokan air.</p> <p>Paragraf 6–7 menyajikan data mengenai penurunan jumlah wisatawan dan ketidakmampuan pelaku wisata untuk menjamin ketersediaan air, yang semakin memperkuat dampak krisis terhadap sektor pariwisata.</p> <p>Paragraf 8–9 menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB, termasuk permintaan kepada KKP untuk mempertimbangkan pencabutan izin PT TCN yang bertanggung jawab dalam penyediaan air hasil sulingan laut.</p> <p>Paragraf 10–11 menguraikan dampak dari pencabutan izin tersebut terhadap keberlangsungan pariwisata dan masyarakat,</p>

---

**Struktur Retoris**Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

terutama menjelang musim liburan yang sangat penting bagi pelaku usaha.

Paragraf 12–13 menyoroti solusi jangka panjang yang diusulkan, yaitu mengalirkan pasokan air dari daratan melalui PDAM, seperti yang telah diterapkan di Gili Air, serta pentingnya prioritas anggaran mengingat kontribusi signifikan Gili Trawangan terhadap PAD Lombok Utara.

Kata-kata yang menekankan fakta, yakni:

"Sejumlah turis bahkan membatalkan booking atau pemesanan penginapan"

"Baru isu saja, sudah 10 persen yang cancel"

"Suplai air di kawasan itu sempat terhenti selama beberapa hari"

"Jumlah wisatawan... turun dari rata-rata 2.800 menjadi 2.100 wisatawan"

"Kami tidak bisa membatasi tamu yang melakukan pembatalan karena memang tidak ada jaminan pasokan air ke depan"

"Pariwisata kita pasti akan merosot"

"Pengusaha hotel akan kehilangan pendapatan miliaran"

"Masyarakat... akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar"

"Pencabutan izin PT TCN itu dilakukan karena adanya kerusakan terumbu karang"

"Hanya Gili Air yang menerima pasokan air bersih dari daratan"



Sejumlah wisatawan melintas di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB, beberapa waktu lalu

---

**Rincian analisis****1. Struktur Sintaksis**

Berita ini menyajikan krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno sebagai ancaman langsung terhadap industri pariwisata, terutama akibat pembatalan pesanan hotel oleh wisatawan. Judulnya, "Krisis Air di Gili Trawangan Berujung Wisatawan Batal Booking Hotel", secara eksplisit menekankan dampak ekonomi dari krisis, yaitu pembatalan booking, yang mengarahkan perhatian pembaca pada kerugian pelaku usaha. Bagian lead mengangkat keluhan wisatawan dan menyebutkan bahwa krisis air menyebabkan ketidaknyamanan hingga pembatalan penginapan. Ini memberi kesan bahwa persoalan sudah menyentuh kenyamanan konsumen, bukan sekadar hambatan operasional. Latar belakang berita memaparkan gangguan pasokan air sejak awal Oktober serta pencabutan izin PT TCN

sebagai penyedia air, yang memperparah situasi. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan memiliki akar struktural yang melibatkan kebijakan lingkungan.

Sumber kutipan didominasi oleh Ketua GHA, Kusnawan, yang menyampaikan keresahan pelaku usaha dan kerugian yang ditimbulkan, termasuk ancaman penutupan properti dan pembatalan massal oleh tamu. Kutipan langsung seperti “Baru isu saja, sudah 10 persen yang cancel” menciptakan kesan genting dan memperlihatkan betapa sensitifnya sektor pariwisata terhadap isu layanan dasar seperti air bersih. Sementara itu, pemerintah yang diwakili oleh Dinas Pariwisata NTB melalui Jamaludin Malady menanggapi dengan pernyataan panjang lebar yang menjelaskan latar belakang pencabutan izin dan rencana solusi jangka panjang, seperti pemanfaatan pipa bawah laut. Namun, pernyataan tersebut lebih bersifat konseptual dan normatif, tanpa menunjukkan langkah konkret di lapangan. Penutup berita kembali mengutip Jamaludin yang menekankan pentingnya anggaran dan perencanaan jangka panjang, yang memperkuat kesan bahwa solusi masih bersifat wacana. Dengan struktur ini, berita membingkai pelaku usaha sebagai pihak yang merugi dan pemerintah sebagai pihak yang lamban dalam memberikan respons nyata.

## **2. Struktur Skrip**

Berita ini membangun cerita mengenai krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno sebagai ancaman serius bagi sektor pariwisata Lombok Utara menjelang musim liburan akhir tahun. Pada Oktober 2024, gangguan pasokan air terjadi akibat pencabutan izin operasional PT TCN, tanpa adanya sistem distribusi alternatif yang siap digunakan. Tokoh utama dalam narasi ini adalah pelaku usaha yang tergabung dalam GHA (Gili Hotel Association), yang mengalami langsung dampak dari krisis ini, mulai dari kerugian finansial hingga pembatalan pemesanan penginapan oleh wisatawan. Wisatawan menjadi aktor terdampak lainnya, yang kecewa terhadap menurunnya layanan dasar di destinasi wisata unggulan. Pemerintah Provinsi NTB, bersama PDAM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kini tengah mencari solusi, termasuk memanfaatkan

jaringan PDAM. Namun, lambannya respons pemerintah menjadi sorotan utama, karena situasi ini berpotensi memukul citra pariwisata daerah dan menurunkan kepercayaan wisatawan terhadap kesiapan destinasi Gili dalam menyambut high season.

### 3. Struktur Tematik

Berita ini menyusun narasi tematik tentang krisis air di Gili Trawangan dan Gili Meno dengan menekankan dampaknya terhadap sektor pariwisata. Paragraf awal memuat keluhan wisatawan dan dampak langsung berupa pembatalan reservasi yang merugikan pelaku usaha. Selanjutnya, diuraikan kekhawatiran para pengusaha hotel yang meminta pemerintah dan PDAM segera bertindak. Data tentang penurunan jumlah wisatawan dan ketidakpastian pasokan air memperkuat kesan bahwa krisis ini mengancam keberlanjutan industri. Respons pemerintah muncul dalam bentuk permintaan kepada KKP untuk mencabut izin PT TCN, penyedia air hasil sulingan laut, yang dianggap lalai. Namun, pencabutan ini juga dipandang berdampak negatif terhadap masyarakat dan usaha lokal, apalagi menjelang musim liburan. Sebagai solusi jangka panjang, diusulkan distribusi air dari daratan melalui PDAM, seperti di Gili Air, dengan penekanan pada urgensi pengalokasian anggaran mengingat besarnya kontribusi Gili Trawangan terhadap pendapatan daerah. Struktur tematik ini membentuk alur logis yang menyoroti krisis, dampak, respons, serta solusi yang diharapkan.

### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan kata-kata untuk menekankan fakta mengenai krisis air terkait dengan persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial. "Sejumlah turis bahkan membatalkan booking atau pemesanan penginapan" menjelaskan bahwa dampak sudah terasa langsung pada bisnis pariwisata. "Baru isu saja, sudah 10 persen yang cancel" menjelaskan bahwa persepsi atau kekhawatiran sudah cukup membuat wisatawan membatalkan. "Suplai air di kawasan itu sempat terhenti selama beberapa hari" menegaskan tentang gangguan distribusi air. "Jumlah wisatawan... turun dari rata-rata 2.800 menjadi 2.100 wisatawan" menunjukkan data kunjungan sebagai akibat krisis. "Kami tidak bisa membatasi tamu yang melakukan

pembatalan karena memang tidak ada jaminan pasokan air ke depan" menyiratkan kondisi krisis masih berlangsung dan belum ada kepastian solusi. "Pariwisata kita pasti akan merosot" menunjukkan prediksi berbasis fakta bahwa dampak krisis akan memburuk tanpa tindakan. "Pengusaha hotel akan kehilangan pendapatan miliaran" menunjukkan skala kerugian. "Masyarakat... akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar" menekankan krisis tidak hanya berdampak pada sektor wisata, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga. "Pencabutan izin PT TCN itu dilakukan karena adanya kerusakan terumbu karang" menunjukkan penyebab hukum dan lingkungan dari krisis pasokan air. "Hanya Gili Air yang menerima pasokan air bersih dari daratan" menunjukkan ketimpangan infrastruktur antar pulau.

Pemilihan gambar dalam berita ini menampilkan suasana jalanan yang ramai di Gili Trawangan pada siang hari yang cerah, dengan beberapa orang berjalan kaki dan bersepeda, serta deretan bangunan hotel dan restoran di sepanjang jalan yang dihiasi dengan tanaman pot dan plang-plang penunjuk arah. Visual ini menangkap dinamika kehidupan sehari-hari dan aktivitas pariwisata yang aktif di Gili Trawangan. Namun, dalam konteks berita, suasana ramai ini kontras dengan keluhan krisis air bersih yang melanda Gili Trawangan dan Gili Meno. Krisis tersebut telah menyebabkan pembatalan pemesanan penginapan oleh wisatawan dan kerugian bagi pelaku usaha, menggarisbawahi bahwa meskipun destinasi tampak hidup, permasalahan infrastruktur dasar dapat sangat memengaruhi keberlangsungan pariwisata.

#### 4. Analisis Artikel Berita 4 detik.com

Judul : Izin PT TCN Dicabut KKP, Warga Gili Tramena  
Terancam Krisis Air Bersih

Sumber : detik.com

Tanggal : 8 Oktober 2024

Ringkasan : Pencabutan izin pengeboran bawah laut PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) oleh KKP mengancam ketersediaan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno. Selama ini warga bergantung pada air sulingan

laut dari PT TCN, berbeda dengan Gili Air yang sudah mendapatkan pasokan air PDAM. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meminta solusi kepada Pemprov NTB guna mencegah krisis air yang dapat mengganggu sektor pariwisata. Sementara ini air masih mengalir, namun kekhawatiran akan terulangnya krisis seperti Juni lalu tetap ada. Pemprov NTB berencana mencari sumber air alternatif yang ramah lingkungan berdasarkan kajian dari Balai Wilayah Sungai.

Tabel 4.14 Hasil Analisis Artikel 4 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Izin PT TCN Dicabut KKP, Warga Gili Tramena Terancam Krisis Air Bersih
	Lead	Warga yang tinggal di Gili Trawangan dan Gili Meno, Lombok Utara, NTB, terancam krisis air bersih setelah izin pengeboran pipa bawah laut PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dicabut oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selama ini, warga di sana bergantung pada air bersih hasil sulingan air laut dari TCN.
	Latar Informasi	Gili Trawangan dan Gili Meno selama ini bergantung pada air bersih hasil sulingan air laut dari PT TCN. Namun, setelah izin pengeboran pipa bawah laut dicabut oleh KKP, warga dan pelaku pariwisata di dua pulau itu cemas akan terjadi krisis air bersih, apalagi menjelang musim liburan. Pemkab Lombok Utara dan Pemprov NTB tengah berupaya mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi potensi krisis tersebut. Sebelumnya, saat krisis serupa terjadi, kerugian pelaku usaha mencapai miliaran rupiah per hari.
	Kutipan	<p>Kepala UPT Gili Tramena Mawardi</p> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Ketersediaan airnya ada, tapi namanya air laut itu kan ada pasang surutnya. Jadi kami minta solusi (ke sini)," (Mawardi).</li> <li>2. "Kami pakai air laut yang disuling oleh PT TCN, itu yang didistribusikan ke Gili Meno dan Gili Trawangan. Untuk sementara air masih jalan, kami belum dapat respons kalau misalkan airnya dihentikan seperti Juni lalu. Kami takutnya (krisis air bersih) ini berpengaruh ke kunjungan wisatawan, ngapain ke Gili Tramena kalau tak ada air," (Mawardi).</li> </ol> <p>Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dia menjelaskan air di Gili Trawangan dan Gili Meno masih didistribusikan oleh PT TCN. Saat ini, Pemprov akan mengkaji alternatif lain agar distribusi air bersih di sana tetap lancar. (Fathul Gani).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Akan ada pertemuan lanjutan. Kami dorong Pemkab Lombok Utara untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait," (Fathul Gani).</li> <li>2. "Kami akan mencari solusi terkait sumber air yang ramah lingkungan, tapi ini kan tidak serta merta, butuh kajian dan waktu," (Fathul Gani).</li> <li>3. "Kami akan cari sumber-sumber (air bersih) berdasarkan</li> </ol>

		<p>kajian dari BWS (Balai Wilayah Sungai) masih ada ketersediaan (air bersih). Itu yang kami kaji, alternatif itu yang kami hidupkan,"(Fathul Gani)</p> <p>1. Kepala UPT Gili Tramena Mawardi 2. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Fathul Gani</p>
	Sumber	
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	"Kami akan cari sumber-sumber (air bersih) berdasarkan kajian dari BWS (Balai Wilayah Sungai) masih ada ketersediaan (air bersih). Itu yang kami kaji, alternatif itu yang kami hidupkan," ujarnya.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Warga Gili Trawangan dan Gili Meno terancam krisis air bersih
	<i>Where</i>	Gili Trawangan dan Gili Meno, Lombok Utara, NTB
	<i>When</i>	Kondisi disampaikan pada Selasa, 8 Oktober 2024, dan berkaitan dengan krisis yang terjadi beberapa bulan sebelumnya, termasuk Juni 2024.
	<i>Who</i>	Warga Gili Tramena, PT TCN, KKP, Pemkab Lombok Utara, Pemprov NTB
	<i>Why</i> <i>How</i>	Izin pengeboran air laut oleh PT TCN dicabut oleh KKP Pemerintah daerah dan provinsi mencari solusi alternatif pasokan air bersih, seperti dari PDAM atau sumber lain berdasarkan kajian BWS
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 menguraikan asal mula permasalahan krisis air di Gili Trawangan dan Gili Meno, yang disebabkan oleh pencabutan izin pengeboran PT TCN, yang merupakan sumber utama air bersih, serta permintaan solusi dari Pemkab Lombok Utara kepada Pemprov NTB.</p> <p>Paragraf 3–5 memberikan konteks mengenai distribusi air bersih di kawasan Gili Tramena, menjelaskan cara sistem distribusi air yang diterapkan oleh PT TCN dan kolaborasinya dengan PDAM, serta kekhawatiran masyarakat akan kemungkinan terulangnya krisis air yang berdampak pada sektor pariwisata.</p> <p>Paragraf 6–7 menyoroti dampak nyata dari krisis air pada musim sebelumnya, terutama kerugian ekonomi yang dialami oleh pelaku usaha dan hotel akibat ketergantungan pada pasokan air yang terbatas.</p> <p>Paragraf 8–10 menggambarkan respons Pemprov NTB, yang berusaha mencari solusi jangka panjang dan mendorong pertemuan antar pihak untuk mendiskusikan alternatif sumber air yang lebih ramah lingkungan.</p> <p>Paragraf 11–12 menjelaskan langkah teknis yang sedang direncanakan, yaitu kajian bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk menemukan dan mengaktifkan sumber air bersih alternatif sebagai solusi yang berkelanjutan.</p>
	<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik



Kepala UPT Gili Tramena Mawardi saat diwawancarai di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

---

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini menyajikan pencabutan izin PT TCN oleh KKP sebagai ancaman serius terhadap akses air bersih bagi warga dan pelaku pariwisata di Gili Trawangan dan Gili Meno. Judul dan lead menekankan ketergantungan masyarakat pada air sulingan laut dari TCN, yang kini terancam di tengah persiapan musim liburan. Latar belakang mengingatkan bahwa krisis serupa pernah terjadi dan menyebabkan kerugian besar, memperkuat kesan bahwa persoalan ini belum terselesaikan secara tuntas. Kutipan dari Kepala UPT Gili Tramena, Mawardi, menyoroti kekhawatiran warga terhadap dampak langsung krisis terhadap kunjungan wisatawan. Sementara itu, Asisten II Setda NTB, Fathul Gani, menjelaskan bahwa pemerintah masih mengkaji solusi jangka menengah bersama BWS, tanpa langkah konkret dalam waktu dekat. Penutup berita mempertegas bahwa pemerintah belum siap merespons cepat, sementara warga dan pelaku wisata terancam terdampak langsung oleh kebijakan pusat.

### 2. Struktur Skrip

Berita ini membentuk narasi mengenai krisis air bersih yang kembali mengancam warga Gili Trawangan dan Gili Meno, Lombok Utara, pada Oktober 2024. Akar persoalan berasal dari pencabutan izin pengeboran air laut milik PT TCN oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang selama ini menjadi penyedia utama pasokan air bersih di kawasan tersebut. Tokoh utama dalam narasi ini adalah warga Gili Tramena yang terdampak langsung oleh krisis ini, menghadapi ancaman kekurangan air bersih di tengah kebutuhan dasar yang terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Provinsi NTB berupaya mencari solusi alternatif, di antaranya memanfaatkan jaringan PDAM atau sumber pasokan

lain berdasarkan kajian dari Balai Wilayah Sungai (BWS). Meski langkah penanganan mulai dibahas, warga masih menghadapi ketidakpastian, sementara risiko sosial dan ekonomi dari krisis ini terus membayangi.

### 3. Struktur Tematik

Berita ini membangun narasi tematik tentang krisis air di Gili Trawangan dan Gili Meno dengan menelusuri asal mula permasalahan hingga upaya pencarian solusi. Paragraf awal menjelaskan bahwa krisis dipicu oleh pencabutan izin pengeboran milik PT TCN, yang selama ini menjadi penyedia utama air bersih. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara kemudian meminta dukungan dari Pemprov NTB untuk mengatasi krisis ini. Paragraf selanjutnya memberikan konteks sistem distribusi air bersih di Gili Trameana, menjelaskan peran PT TCN dan PDAM, serta kekhawatiran masyarakat akan dampak berulang terhadap sektor pariwisata. Dampak nyata dari krisis pada musim sebelumnya juga digambarkan, termasuk kerugian besar yang dialami oleh pelaku usaha pariwisata akibat ketergantungan pada pasokan air yang terbatas. Menanggapi situasi tersebut, Pemprov NTB berupaya mencari solusi jangka panjang melalui koordinasi lintas sektor dan eksplorasi sumber air alternatif yang lebih berkelanjutan. Upaya konkret tengah dilakukan melalui kajian teknis bersama Balai Wilayah Sungai untuk mengidentifikasi dan mengaktifkan sumber air baru. Secara tematik, berita ini menyusun alur yang runtut, dari sebab, dampak, hingga inisiatif penyelesaian jangka panjang, yang mempertegas urgensi dan perlunya kolaborasi dalam menangani krisis air di kawasan wisata strategis.

### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan kata-kata untuk menekankan fakta tentang dampak pencabutan izin PT TCN terhadap ketersediaan air bersih di Gili Trameana (Gili Trawangan, Meno, dan Air). "Terancam krisis air bersih" menunjukkan potensi bencana kebutuhan dasar yang serius bagi warga. "Selama ini, warga di sana bergantung pada air bersih hasil sulingan air laut dari TCN" menunjukkan ketergantungan masyarakat pada satu sumber air. "Pasokan air bersih dari PT Tiara Cipta Nirwana (TCN)... disuling,

kemudian didistribusikan kepada masyarakat" menjelaskan distribusi air yang menekankan peran vital PT TCN. "Kami takutnya (krisis air bersih) ini berpengaruh ke kunjungan wisatawan, ngapain ke Gili Tramena kalau tak ada air" menekankan bahwa dampaknya bukan hanya sosial, tetapi juga ekonomi pariwisata. "Industri hotel di Gili Tramena merugi hingga miliaran rupiah per hari" menunjukkan kerugian akibat krisis yang pernah terjadi. "Hotel-hotel... kesulitan mengakses air bersih, padahal saat itu... musim ramai atau high season" menunjukkan bahwa krisis terjadi pada masa krusial sektor pariwisata. "Terpaksa membeli air isi ulang untuk kebutuhan tamu hotel" menunjukkan bahwa sumber air bersih alternatif mahal. "Air masih jalan, kami belum dapat respons kalau misalkan airnya dihentikan seperti Juni lalu" menunjukkan bahwa krisis sudah pernah terjadi sebelumnya dan bisa terulang.

- Pemilihan gambar pada artikel berita ini menampilkan Mawardi, Kepala UPT Gili Tramena yang mengenakan seragam PNS berwarna cokelat muda dengan penutup kepala khas, sedang berbicara di depan kamera atau mikrofon, mengindikasikan bahwa ia sedang memberikan keterangan pers atau wawancara.

#### **5. Analisis Artikel Berita 5 detik.com**

Judul : Pemprov NTB Minta Pemkab Segera Carikan Solusi Krisis Air di Gili Tramena

Sumber : detik.com

Tanggal : 16 Oktober 2024

Ringkasan : Pemerintah Provinsi NTB akan menggelar rapat lanjutan terkait krisis air bersih di Gili Tramena, menyusul pencabutan izin PT TCN oleh KKP. Sekda NTB menilai Pemkab Lombok Utara belum menunjukkan solusi konkret atas masalah ini. Sementara itu, warga Gili Trawangan dan Gili Meno khawatir suplai air akan terhenti seperti yang dialami Gili Meno sejak enam bulan terakhir, usai PT TCN dan PT BAL berhenti beroperasi. Sebanyak 260 KK di Gili Meno kini bergantung pada air galon seharga Rp 60 ribu per hari dan bantuan tandon air dari Pemkab

yang sering menjadi rebutan. Warga meminta solusi jangka panjang, seperti distribusi air PDAM dari Gili Air atau pendirian perusahaan air baru di wilayah tersebut.

Tabel 4.15 Hasil Analisis Artikel 5 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Pemprov NTB Minta Pemkab Segera Carikan Solusi Krisis Air di Gili Tramena
	Lead	Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menggelar rapat terkait krisis air bersih di Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), Kabupaten Lombok Utara. Krisis terjadi setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut izin PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) yang selama ini menyuplai air bersih di kawasan wisata itu.
	Latar Informasi	Krisis air bersih melanda Gili Trawangan dan Gili Meno setelah PT TCN dan PT BAL berhenti menyalurkan air bersih akibat pencabutan izin oleh KKP. Pemprov NTB merasa belum ada tindakan konkret dari Pemkab Lombok Utara dan berupaya mendesak penanganan cepat. Masyarakat terdampak sangat kesulitan mendapatkan air bersih, hingga harus membeli air isi ulang mahal dan berebut dengan hotel serta fasilitas umum. Pemerintah diminta membuka opsi baru untuk penyaluran air, termasuk memanfaatkan sumber dari Gili Air
	Kutipan	<p>Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan rapat terkait krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno akan digelar pekan ini. Pemprov NTB, dia berujar, akan meminta Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu untuk menjelaskan langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan air bersih di kawasan itu.(Gita).</li> <li>2. Gita menjelaskan Pemprov NTB sebelumnya telah menggelar rapat terkait krisis air bersih tersebut bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara. Namun, ia menilai belum ada solusi konkret yang dilakukan Pemkab Lombok Utara terhadap persoalan air di Gili Trawangan dan Gili Meno.(Gita)</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kami ini sedang berpacu dengan waktu dan kami tidak ingin situasinya menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi,"(Gita).</li> <li>2. "Saat rapat sebelumnya, kami sudah berikan solusi-solusi, dan Pak Bupati mengatakan siap untuk menindaklanjuti di lapangan dan mencari solusi terbaik. Sekarang, tinggal kami konfirmasi kepada Pak Bupati (terkait solusi krisis air di wilayah tersebut),"(Gita).</li> </ol> <p>Kepala Desa (Kades) Gili Indah, Wardana</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Gili Indah, Wardana, mengatakan warga Gili Trawangan dan Gili Meno khawatir jika krisis air kembali terjadi se usai pencabutan izin PT TCN oleh KKP. Menurutnya, warga takut jika sewaktu-waktu suplai air dari PT TCN berhenti seperti yang dialami warga di Gili Meno hingga sekarang,(Wardana).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Pasti akan takut (masyarakat kalau airnya setop). Di Gili Meno itu, suplai air bersih harus pakai (kapal) boat kesana. Ini terjadi sejak PT BAL (Berkat Air Laut) dicabut (stop suplai air</li> </ol>

		ke gili),"(Wardana). Kepala Dusun Gili Meno Masrun Kutipan Tidak Langsung: 1. Kepala Dusun Gili Meno Masrun mengungkapkan krisis air di wilayahnya terjadi setelah PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dan PT Berkat Air Laut (BAL) berhenti beroperasi di Gili Meno. Selama ini, kedua perusahaan tersebut menjadi penyalur air bersih ke Gili Trawangan dan Gili Meno.(Masrun). 2. Menurut Mursan, bantuan air dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara hanya lima tandon. Masing-masing tandon berisi 4.000 liter dan 5.000 liter air. Bantuan air tersebut kerap menjadi rebutan warga.(Masrun). 3. Masrun menyebut warga juga harus berebut air dengan hotel-hotel di kawasan pariwisata itu.(Masrun). 4. Dia meminta pemerintah daerah segera mencari solusi konkret terkait krisis air yang dialami warga Lombok Utara. Ia berharap air bawah laut dari Gili Air juga diteruskan ke Gili Meno.(Masrun). Kutipan Langsung: 1. "Kami beli air seharga Rp 15 ribu per galon. Kami butuh air sampai empat galon sehari,"(Masrun). 2. "Kami berebut dengan suplai air hotel. Belum lagi ke puskesmas, itu belum cukup,"(Masrun). 3. "Kalau tidak bisa, pemerintah harus buka perusahaan air yang ada,"(Masrun).
	Sumber	1. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi 2. Kepala Desa (Kades) Gili Indah, Wardana 3. Kepala Dusun Gili Meno Masrun
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	Dia meminta pemerintah daerah segera mencari solusi konkret terkait krisis air yang dialami warga Lombok Utara. Ia berharap air bawah laut dari Gili Air juga diteruskan ke Gili Meno. "Kalau tidak bisa, pemerintah harus buka perusahaan air yang ada," pungkasnya.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Krisis air bersih melanda Gili Tramenas setelah dicabutnya izin PT TCN dan PT BAL
	<i>Where</i>	Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, NTB
	<i>When</i>	Oktober 2024 (terjadi selama 6 bulan terakhir untuk Gili Meno)
	<i>Who</i>	Pemprov NTB, Pemkab Lombok Utara, warga Gili Tramenas, PT TCN dan PT BAL
	<i>Why</i>	Pencabutan izin operasi dua perusahaan penyedia air oleh KKP
	<i>How</i>	Warga membeli air isi ulang mahal dan berebut dengan hotel karena distribusi air terganggu
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1–2 menguraikan latar belakang terjadinya krisis air bersih di Gili Tramenas yang disebabkan oleh pencabutan izin PT TCN oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta rencana Pemerintah Provinsi NTB untuk mengadakan rapat guna membahas solusi atas krisis tersebut. Paragraf 3–5 menggambarkan reaksi dan penilaian Pemerintah Provinsi NTB terhadap langkah-langkah yang belum terwujud secara konkret dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, sekaligus menekankan pentingnya koordinasi dan pelaksanaan kebijakan agar situasi tidak semakin memburuk. Paragraf 6–7 mulai mengangkat kekhawatiran masyarakat setempat, terutama warga Gili Trawangan dan Gili Meno, mengenai kemungkinan terhentinya pasokan air yang selama ini disuplai oleh PT TCN maupun PT BAL. Paragraf 8–10 menjelaskan kondisi nyata krisis air di Gili Meno, termasuk dampak langsung terhadap warga yang harus menggunakan air galon untuk kebutuhan sehari-hari dengan

---

**Struktur Retoris**Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

biaya yang tinggi, serta terbatasnya bantuan dari pemerintah. Paragraf 11–12 menampilkan konflik distribusi air bersih antara warga dan pelaku usaha pariwisata, menunjukkan ketidakadilan akses air bersih di tengah krisis, serta tuntutan warga agar pemerintah segera mengambil langkah konkret seperti membuka perusahaan air milik daerah atau memperluas distribusi dari Gili Air.

Kata yang digunakan untuk menekankan fakta, yakni:

"Krisis air bersih"

"Krisis terjadi setelah KKP mencabut izin PT TCN"

"Kami sedang berpacu dengan waktu dan tidak ingin situasinya menjadi lebih buruk lagi"

"Belum ada solusi konkret yang dilakukan Pemkab"

"Suplai air bersih harus pakai (kapal) boat ke sana"

"260 kepala keluarga kesulitan mengakses air bersih sejak enam bulan terakhir"

"Mereka terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air galon"

"Rp 60 ribu setiap hari... empat galon sehari"

"Bantuan air... hanya lima tandon... menjadi rebutan warga"

"Berebut dengan suplai air hotel... puskesmas belum cukup"



Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi

---

**Rincian analisis****1. Struktur Sintaksis**

Berita ini menyajikan krisis air bersih di Gili Tramenas sebagai persoalan mendesak yang belum ditangani secara konkret oleh pemerintah daerah.

Judulnya menekankan desakan dari Pemprov NTB agar Pemkab Lombok Utara segera mencari solusi, menyiratkan adanya ketegangan antarlevel pemerintahan dalam menangani masalah tersebut. Lead berita menjelaskan bahwa krisis muncul setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut izin PT TCN, penyedia utama air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno. Latar belakang memperkuat narasi kegentingan dengan menyebut masyarakat terpaksa membeli air mahal dan berebut pasokan dengan hotel dan fasilitas umum.

Kutipan dari Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, menyoroti lambannya respons Pemkab Lombok Utara, meski solusi sempat dibahas dalam rapat sebelumnya. Ucapan seperti "kami sedang berpacu dengan waktu" menunjukkan kekhawatiran pemerintah provinsi akan memburuknya situasi. Sementara itu, Kepala Desa Gili Indah dan Kepala Dusun Gili Meno

menekankan penderitaan warga, dari pasokan air terbatas hingga ketergantungan pada air galon yang mahal. Pernyataan mereka menggambarkan kondisi lapangan yang genting dan memperkuat tuntutan akan solusi segera, termasuk pemanfaatan pipa bawah laut dari Gili Air. Dengan struktur ini, berita menyajikan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak, Pemprov sebagai pihak yang mendesak, dan Pemkab sebagai pihak yang dinilai belum cukup sigap menangani krisis.

2. **Struktur Skrip**

Berita ini menggambarkan krisis air bersih yang melanda kawasan Gili Tramena, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, di Kabupaten Lombok Utara, NTB, sebagai dampak serius dari pencabutan izin operasi dua perusahaan penyedia air, PT TCN dan PT BAL, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Krisis yang memuncak pada Oktober 2024 ini telah berlangsung selama enam bulan di Gili Meno dan kini meluas ke dua Gili lainnya. Tokoh utama dalam narasi ini adalah warga Gili Tramena, yang menjadi korban langsung terganggunya distribusi air. Mereka terpaksa membeli air isi ulang dengan harga mahal dan harus berebut dengan hotel serta properti wisata lainnya demi memenuhi kebutuhan harian. Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berada di bawah tekanan untuk segera mencari solusi, namun hingga kini respons yang diberikan belum mampu memulihkan akses air bersih secara menyeluruh. Ketegangan antara kebutuhan warga dan kepentingan pariwisata menjadi sorotan utama dalam isu ini.

3. **Struktur Tematik**

Berita ini menyusun narasi tematik krisis air bersih di Gili Tramena sebagai persoalan struktural yang melibatkan kebijakan pusat dan daerah, serta berdampak langsung pada kehidupan warga dan pelaku usaha. Paragraf awal menjelaskan latar belakang krisis yang dipicu oleh pencabutan izin PT TCN oleh KKP, serta rencana Pemprov NTB untuk mencari solusi melalui rapat koordinasi. Selanjutnya, Pemprov menilai bahwa Pemkab Lombok Utara belum menunjukkan langkah konkret, dan menekankan pentingnya sinergi agar krisis tidak semakin meluas. Kekhawatiran masyarakat pun

mulai muncul, terutama di Gili Trawangan dan Gili Meno, terkait potensi terhentinya pasokan air dari penyedia utama. Dampak nyata paling terlihat di Gili Meno, di mana warga harus membeli air galon untuk kebutuhan dasar dengan harga tinggi, sementara bantuan pemerintah masih sangat terbatas. Krisis ini juga memicu ketegangan antara warga dan pelaku usaha pariwisata akibat ketimpangan distribusi air, mendorong warga untuk menuntut langkah konkret dari pemerintah seperti mendirikan perusahaan air milik daerah atau memperluas jaringan dari Gili Air. Struktur tematik berita secara runtut membangun narasi dari sebab, respons pemerintah, keresahan masyarakat, hingga konflik sosial, yang semuanya menegaskan urgensi penanganan krisis secara adil dan menyeluruh.

#### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan kata-kata untuk menekankan fakta bahwa krisis air bersih merupakan masalah mendesak yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga dan keberlangsungan sektor pariwisata. "Krisis air bersih" menunjukkan situasi genting terkait kebutuhan dasar. "Krisis terjadi setelah KKP mencabut izin PT TCN" menyampaikan hubungan sebab-akibat yang konkret antara kebijakan dan dampaknya. "Kami sedang berpacu dengan waktu dan tidak ingin situasinya menjadi lebih buruk lagi" menunjukkan potensi krisis air bersih yang bisa memburuk. "Belum ada solusi konkret yang dilakukan Pemkab" menunjukkan kritik karena belum adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah. "Suplai air bersih harus pakai (kapal) boat ke sana" menggambarkan betapa tidak efisien dan daruratnya distribusi air saat ini. "260 kepala keluarga kesulitan mengakses air bersih sejak enam bulan terakhir" menyajikan angka pasti untuk menegaskan skala masalah. "Mereka terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air galon" menunjukkan dampak terhadap aktivitas hidup sehari-hari. "Rp 60 ribu setiap hari... empat galon sehari" memperjelas beban ekonomi warga akibat krisis. "Bantuan air... hanya lima tandon... menjadi rebutan warga" menekankan keterbatasan pasokan dan ketegangan sosial yang terjadi. "Berebut dengan suplai air hotel... puskesmas belum cukup" menunjukkan persaingan antar kebutuhan vital (warga, wisata, kesehatan).

Pada artikel berita ini menampilkan foto wawancara Lalu Gita Ariadi, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, yang dalam konteks berita mengumumkan rencana rapat terkait krisis air bersih di Gili Tramen. Ia menyatakan bahwa Pemprov NTB akan meminta Bupati Lombok Utara untuk menjelaskan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan air bersih yang semakin memburuk setelah pencabutan izin PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) oleh KKP, menegaskan urgensi penyelesaian masalah ini yang telah menyulitkan warga dan pelaku usaha di Gili.

**16. Analisis Artikel Berita 6 detik.com**

Judul : Kementerian KKP Cabut Izin Pemanfaatan Ruang Laut PT TCN di Gili Trawangan

Sumber : detik.com

Tanggal : 4 Oktober 2024

Ringkasan : Kementerian Kelautan dan Perikanan mencabut izin pemanfaatan ruang laut PT Tiara Cipta Nirwana pada 27 September 2024 akibat pengeboran pipa di luar area izin yang merusak ekosistem laut.

Meski PT TCN berjanji melakukan rehabilitasi, belum ada tindak lanjut. Sebelumnya, operasional mereka telah disegel, namun distribusi air dari sumber darat masih diperbolehkan. Kapolda NTB menyatakan izin PT TCN sah secara administratif, tetapi lokasinya melanggar ketentuan, dan perusahaan diberi kesempatan melengkapi izin yang kurang.

Tabel 4.16 Hasil Analisis Artikel 6 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Kementerian KKP Cabut Izin Pemanfaatan Ruang Laut PT TCN di Gili Trawangan
	Lead	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) mencabut izin pengeboran pipa bawah laut oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN). PT TCN adalah perusahaan swasta yang bekerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung untuk menyediakan air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).
	Latar Informasi	Pencabutan izin oleh KKP terhadap PT TCN dilakukan karena aktivitas pengeboran perusahaan tersebut dianggap merusak ekosistem laut di Gili Trawangan. PT TCN sebelumnya bekerja sama dengan PDAM untuk mendistribusikan air bersih di wilayah tersebut. KKP juga ikut mengawasi kasus ini melalui Korsup Wilayah V, dan proses hukum serta

		<p>lingkungan tengah berjalan. Meski izin pengeboran dicabut, distribusi air dari darat masih diizinkan. Sementara itu, kepolisian NTB menyatakan kegiatan PT TCN tidak ilegal, hanya lokasi pengeborannya berada di luar batas izin Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria, mengungkapkan izin pengeboran pipa bawah laut di Gili Trawangan tersebut telah dicabut pada 27 September lalu.(Dian).</li> <li>2. Dian menjelaskan KKP sedang menghitung kerugian ekosistem laut akibat aktivitas pengeboran PT TCN yang mencakup area seluas 5.000 meter persegi. PT TCN, dia melanjutkan, telah menyatakan akan melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas pengeboran tersebut. Namun, hingga saat ini rehabilitasi tersebut belum dilakukan.(Dian).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Izin terkait pemanfaatan ruang laut (PRL) sudah dicabut,"(Dian).</li> <li>2. "Pada 7 Juni 2024, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa menyegel sarana operasional PT TCN,"(Dian).</li> <li>3. "Mereka mungkin masih memiliki izin untuk mendistribusikan air. Jika air diambil dari darat, tidak ada masalah. Tapi jika dari laut, izinya sudah dicabut,"(Dian).</li> </ol> <p>Kapolda NTB Irjen Raden Umar Farooq</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelumnya, Kapolda NTB Irjen Raden Umar Farooq sempat memberikan penjelasan terkait aktivitas pengeboran PT TCN yang ditutup oleh PSDKP. Menurut Farooq, aktivitas pengeboran air milik PT TCN di Gili Trawangan sah secara administrasi. Namun, lokasi pengeboran tersebut berada di luar area yang diizinkan.(Farooq).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "PT TCN bukan usaha ilegal. Pengeboran yang dilakukan hanya berada di luar lokasi sesuai izin yang telah dikeluarkan. Kami masih memberikan kesempatan kepada PT TCN untuk melengkapi administrasi perizinannya,"(Farooq).</li> </ol>
	Sumber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria</li> <li>2. Kapolda NTB Irjen Raden Umar Farooq</li> </ol>
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	"PT TCN bukan usaha ilegal. Pengeboran yang dilakukan hanya berada di luar lokasi sesuai izin yang telah dikeluarkan. Kami masih memberikan kesempatan kepada PT TCN untuk melengkapi administrasi perizinannya," ujar Farooq pada 25 Juli lalu.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Pencabutan izin pengeboran bawah laut milik PT TCN oleh KKP
	<i>Where</i>	Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, NTB
	<i>When</i>	Izin dicabut pada 27 September 2024
	<i>Who</i>	PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK, PSDKP, Kapolda NTB
	<i>Why</i>	Aktivitas pengeboran melanggar area izin dan merusak ekosistem laut
	<i>How</i>	Izin dicabut setelah penyegelan sarana operasional oleh PSDKP dan audit kerusakan ekosistem
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1–2 menguraikan latar belakang pencabutan izin pengeboran yang dilakukan oleh KKP terhadap PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), sebuah perusahaan yang menyediakan air bersih di kawasan Gili Trawangan, serta menjelaskan waktu dan otoritas yang terlibat dalam pencabutan izin tersebut.

---

**Struktur Retoris**Kata, Idiom,  
Gambar, Grafik

Paragraf 3–4 menjelaskan alasan di balik pencabutan izin, yang mencakup kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas pengeboran, luas area yang terdampak, serta tindakan penyegelan yang dilakukan oleh KKP sebagai langkah awal sebelum pencabutan resmi.

Paragraf 5 memberikan klarifikasi mengenai status operasional PT TCN, yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut masih diperbolehkan untuk mendistribusikan air dengan syarat bahwa pengambilan air harus dilakukan dari darat, bukan dari laut.

Paragraf 6 menyajikan perspektif dari pihak kepolisian, di mana Kapolda NTB menyatakan bahwa kegiatan pengeboran yang dilakukan oleh PT TCN sah secara administratif, meskipun titik pengeboran berada di luar area yang diizinkan, dan perusahaan masih diberikan kesempatan untuk melengkapi perizinan.

Kata-kata yang digunakan untuk menekankan fakta, yakni:

"KKP... mencabut izin pengeboran pipa bawah laut oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN)"

"Izin terkait pemanfaatan ruang laut (PRL) sudah dicabut"

"Pengeboran... mencakup area seluas 5.000 meter persegi"

"KKP sedang menghitung kerugian ekosistem laut akibat aktivitas pengeboran"

"Rehabilitasi terhadap kerusakan ekosistem... belum dilakukan"

"Pada 7 Juni 2024... PT TCN disegel"

"Penyegelan ini akhirnya berujung pada pencabutan izin"

"Jika air diambil dari darat, tidak ada masalah. Tapi jika dari laut, izinnya sudah dicabut."

"Pengeboran yang dilakukan hanya berada di luar lokasi sesuai izin..."



Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui di Dinas ESDM NTB

---

**Rincian analisis****1. Struktur Sintaksis**

Berita ini menyajikan pencabutan izin pengeboran bawah laut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di Gili Trawangan. Judul menyoroti tindakan tegas KKP terhadap PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), perusahaan penyedia air bersih di kawasan wisata tersebut. Lead berita langsung menyampaikan bahwa pencabutan izin dilakukan karena aktivitas pengeboran PT TCN dinilai merusak ekosistem laut. Latar belakang berita menambahkan bahwa distribusi air dari darat tetap diperbolehkan, sementara pengeboran bawah laut telah dihentikan dan disegel. Hal ini

menunjukkan kebijakan KKP sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.

Kutipan dari Ketua Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menguatkan legitimasi tindakan KKP dengan menjelaskan adanya pengawasan antarlembaga dan potensi kerugian ekosistem laut yang masih dikaji. Ia juga menegaskan bahwa rehabilitasi belum dilakukan oleh PT TCN, memperkuat citra perusahaan sebagai pihak yang lalai terhadap dampak lingkungan. Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Umar Farooq, memberikan pernyataan yang lebih moderat dengan menyebut bahwa PT TCN tidak ilegal, hanya pengeborannya dilakukan di luar batas izin. Ini meringkai persoalan sebagai masalah administratif, bukan kriminal. Dengan struktur ini, berita memosisikan KKP dan KPK sebagai aktor penegak aturan dan pelindung lingkungan, sementara PT TCN digambarkan sebagai pihak yang melanggar aturan teknis. Pemerintah daerah tidak tampil dominan dalam narasi ini, memperkuat kesan bahwa isu ini ditangani di tingkat pusat dan penegakan hukum.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menggambarkan pencabutan izin pengeboran bawah laut milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, sebagai respons tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Pada 27 September 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencabut izin perusahaan setelah terungkap bahwa aktivitas pengeboran melampaui batas area yang diizinkan dan merusak ekosistem laut di sekitar wilayah konservasi. Tokoh-tokoh utama dalam narasi ini mencakup KKP sebagai otoritas pengambil keputusan, PT TCN sebagai pelaku pelanggaran, serta lembaga pengawasan seperti PSDKP, KPK, dan Kapolda NTB yang terlibat dalam penyegelan dan audit. Proses pencabutan izin dilakukan menyusul penyegelan fasilitas operasional oleh PSDKP dan hasil audit yang menunjukkan kerusakan ekosistem. Kasus ini memperlihatkan ketegangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan lingkungan, sekaligus menjadi titik balik dalam pengawasan tata kelola sumber daya laut di kawasan wisata unggulan seperti Gili Trawangan.

### 3. Struktur Tematik

Berita ini menyusun narasi tematik tentang pencabutan izin pengeboran air oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan, dengan fokus pada latar belakang kebijakan, dampak lingkungan, serta respons berbagai pihak. Paragraf awal menjelaskan kronologi pencabutan izin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk otoritas yang terlibat dan waktu pelaksanaannya. Paragraf berikutnya memaparkan alasan utama di balik pencabutan, yaitu kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas pengeboran yang melampaui batas area yang diperbolehkan, yang kemudian diikuti oleh tindakan penyegelan sebagai langkah penegakan awal. Paragraf kelima memberikan klarifikasi penting bahwa meskipun izin pengeboran dicabut, PT TCN masih boleh mendistribusikan air asalkan sumbernya berasal dari darat. Perspektif kepolisian dalam paragraf terakhir menambahkan dimensi legal, dengan penegasan bahwa meskipun secara administratif sah, lokasi pengeboran tidak sesuai izin, dan perusahaan masih diberi ruang untuk melengkapi dokumen perizinan. Secara tematik, berita ini membentuk alur informasi yang menggabungkan aspek kebijakan, lingkungan, dan hukum, untuk menunjukkan kompleksitas kasus dan perlunya solusi yang mempertimbangkan berbagai kepentingan.

### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan kata-kata untuk menekankan fakta mengenai keputusan resmi pemerintah, dampak lingkungan, dan status perizinan perusahaan, serta memperjelas duduk perkara kepada pembaca. "KKP... mencabut izin pengeboran pipa bawah laut oleh PT Tiara Cipta Nirwana (TCN)" menjelaskan fakta hukum. "Izin terkait pemanfaatan ruang laut (PRL) sudah dicabut" menjelaskan pernyataan resmi dari pejabat KPK mengenai status legalitas. "Pengeboran... mencakup area seluas 5.000 meter persegi" menunjukkan aktivitas dan potensi dampaknya. "KKP sedang menghitung kerugian ekosistem laut akibat aktivitas pengeboran" menunjukkan bahwa ada kerusakan. "Rehabilitasi terhadap kerusakan ekosistem... belum dilakukan" menunjukkan perusahaan gagal bertanggung jawab dalam pemulihan lingkungan. "Pada 7 Juni 2024... PT TCN disegel"

menunjukkan adanya tindakan tegas dan resmi oleh aparat pengawas (PSDKP). "Penyegehan ini akhirnya berujung pada pencabutan izin" menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara pelanggaran dan sanksi.

Pada artikel berita ini menampilkan Dian Patria, Ketua Satuan Tugas Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, yang dalam artikel ini menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencabut izin pengeboran pipa bawah laut PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) di Gili Trawangan sejak 27 September lalu. Ia juga menginformasikan bahwa KKP sedang menghitung kerugian ekosistem laut akibat aktivitas TCN dan bahwa perusahaan tersebut belum melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang ditimbulkan.

#### 17. Analisis Artikel Berita 7 detik.com

Judul : Walhi Temukan Limbah Penyulingan Air PT TCN  
Cemari Laut Gili Meno

Sumber : detik.com

Tanggal : 12 Oktober 2024

Ringkasan : Walhi NTB menemukan limbah penyulingan PT TCN mencemari laut Gili Meno, merusak terumbu karang dan mengancam mata pencaharian warga. Instalasi perusahaan juga dibangun dekat spot wisata coral garden. Warga menuntut rehabilitasi lingkungan dan solusi air bersih yang ramah ekosistem. Krisis air bersih yang sudah berlangsung enam bulan memaksa warga membeli air mahal, sementara sektor pariwisata merugi besar dan terancam PHK massal, menurut PHRI Lombok Utara.

Tabel 4.17 Hasil Analisis Artikel 7 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Walhi Temukan Limbah Penyulingan Air PT TCN Cemari Laut Gili Meno
	Lead	Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan limbah penyulingan air milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) mencemari pantai di kawasan Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara.
	Latar Informasi	Berita ini mengangkat temuan Walhi NTB bahwa limbah penyulingan air laut dengan salinitas tinggi dari PT TCN

---

mencemari laut di Gili Meno. Pencemaran ini diduga mempercepat kerusakan terumbu karang dan mengancam ekosistem laut. Selain isu lingkungan, Walhi juga mengungkap dugaan pembungkaman terhadap warga yang menuntut akses air bersih. Kepala Dusun Gili Meno dan masyarakat menuntut tanggung jawab PT TCN atas kerusakan lingkungan serta mendesak solusi jangka panjang dari pemerintah. Sementara itu, perwakilan PHRI menyatakan krisis air berdampak besar pada sektor pariwisata dan tenaga kerja di tiga gili

Kutipan

Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin

Kutipan Tidak Langsung:

1. Amri menduga cairan yang dibuang ke laut tersebut mempercepat proses kerusakan terumbu karang serta mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Padahal laut menjadi sumber kehidupan utama bagi penduduk Gili Meno.(Amri).
2. Selain masalah lingkungan, Walhi NTB juga menyoroti adanya upaya pembungkaman warga yang kritis terhadap aktivitas PT TCN. Amri berujar ada 11 warga dipanggil oleh polisi untuk klarifikasi aktivitas perjuangan warga terkait akses air bersih.(Amri).

Kutipan Langsung:

1. "Ya kami menemukan limbah penyulingan air laut dengan salinitas tinggi telah mencemari perairan Gili Meno,"(Amri).
2. "Sudah banyak kerusakan terumbu karang yang diduga kuat terjadi akibat aktivitas PT TCN,"(Amri).
3. "Kami menyerukan kepada pemerintah agar melindungi hak mereka untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman atau tekanan,"(Amri).

Kepala Dusun Gili Meno, Masrun

Kutipan Tidak Langsung:

1. Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, mengatakan telah menyelam di lokasi dan melihat sendiri dampak negatif dari operasi PT TCN tersebut. Pembangunan instalasi air PT TCN yang direncanakan sebelumnya berdekatan dengan coral garden, spot wisata utama di Gili Meno yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara.(Masrun).
2. Menurut dia, pencabutan izin oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) merupakan langkah yang tepat. Meski dicabut, PT TCN harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan dan diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang telah rusak.(Masrun).
3. Masrun juga meminta agar pemerintah mencari solusi jangka panjang agar krisis air bersih di Gili Meno tidak berlarut-larut.(Masrun).
4. Dia menegaskan darurat air bersih di Gili Meno yang sudah berlangsung sejak 6 bulan lalu membuat aktivitas warga memburuk.(Masrun).

Kutipan Langsung:

1. "Kami masyarakat Gili Meno dengan tegas menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis ini,"(Masrun).
  2. "Warga pun mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara memastikan hak warga Gili Meno atas akses air bersih yang terjangkau dan aman. Darurat air bersih tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang jelas,"(Masrun).
  3. "Tentu tanpa merusak ekosistem laut dan sumber daya alam,"(Masrun).
  4. "Pasokan air bersih yang seharusnya menjadi hak dasar masyarakat kini berubah menjadi komoditas mahal yang
-

		<p>harus dibeli dari daratan,"(Masrun).          Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lombok Utara Vicky Hanoi          Kutipan Tidak Langsung:          1. Sebelumnya, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lombok Utara Vicky Hanoi mengatakan krisis air bersih di tiga gili juga mengakibatkan para pengusaha hotel dan restoran merugi hingga puluhan juta setiap hari.(Vicky Hanoi).          2. Menurut Vicky jika semua hotel dan restoran di tiga gili tutup akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada hampir 4.000 pekerja. Selain berdampak kepada PHK ribuan karyawan, krisis air juga akan mencoreng citra pariwisata di NTB.(Vicky Hanoi).          Kutipan Langsung:          1. "Jika situasi ini terus terjadi (krisis air) beberapa pengusaha ini akan menutup properti di sana. Kenapa, karena semua pengusaha merugi,"(Vicky Hanoi).          2. Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin          3. Kepala Dusun Gili Meno, Masrun          3. Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Lombok Utara Vicky Hanoi</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<p><b>Sumber</b></p> <p><b>Pernyataan Opini Penutup</b></p> <p><b>What</b></p> <p><b>Where</b></p> <p><b>When</b></p> <p><b>Who</b></p> <p><b>Why</b></p> <p><b>How</b></p>	<p>Tidak ada</p> <p>Menurut Vicky jika semua hotel dan restoran di tiga gili tutup akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada hampir 4.000 pekerja. Selain berdampak kepada PHK ribuan karyawan, krisis air juga akan mencoreng citra pariwisata di NTB.</p> <p>Temuan pencemaran laut oleh limbah PT TCN dan krisis air bersih di Gili Meno</p> <p>Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara</p> <p>Investigasi dilakukan Sabtu, 12 Oktober 2024</p> <p>Walhi NTB, warga Gili Meno, PT TCN, Pemkab Lombok Utara, PHRI</p> <p>Limbah penyulingan air mencemari laut dan aktivitas perusahaan diduga merusak terumbu karang serta memperburuk krisis air</p> <p>Investigasi lapangan oleh Walhi dan pengakuan warga terhadap dampak langsung pencemaran serta kesulitan akses air bersih</p>
<b>Struktur Tematik</b>	<p>Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat</p>	<p>Paragraf 1–3 membahas penemuan pencemaran lingkungan oleh Walhi NTB yang disebabkan oleh limbah penyulingan air laut dari PT TCN, yang diduga mempercepat kerusakan terumbu karang dan mengancam ekosistem laut di Gili Meno.</p> <p>Paragraf 4–5 melanjutkan dengan sorotan terhadap pelanggaran hak warga, di mana Walhi NTB mengungkapkan adanya intimidasi terhadap masyarakat yang menyuarakan kritik, serta pernyataan Kepala Dusun Gili Meno mengenai dampak langsung terhadap lingkungan sekitar, khususnya area wisata coral garden.</p> <p>Paragraf 6–8 menyoroti desakan masyarakat untuk meminta tanggung jawab dan solusi jangka panjang, termasuk dukungan untuk pencabutan izin PT TCN dan tuntutan rehabilitasi lingkungan, serta penyediaan akses air bersih yang berkelanjutan tanpa merusak alam.</p> <p>Paragraf 9–11 beralih pada dampak ekonomi dari krisis air bersih, khususnya pada sektor perhotelan dan restoran. Krisis ini dianggap mengancam kelangsungan usaha dan lapangan kerja bagi sekitar 4.000 pekerja, serta berpotensi merusak citra pariwisata NTB secara keseluruhan.</p>
<b>Struktur Retoris</b>	<p>Kata, Idiom, Gambar, Grafik</p>	<p>Kata-kata yang menekankan fakta, yakni:          "Limbah penyulingan air milik PT TCN mencemari pantai"</p>

---

"Salinitas tinggi telah mencemari perairan Gili Meno"  
"Cairan... mempercepat proses kerusakan terumbu karang"  
"Sudah banyak kerusakan terumbu karang yang diduga kuat akibat aktivitas PT TCN"  
"Ada 11 warga dipanggil oleh polisi untuk klarifikasi"  
"Berdekatan dengan coral garden, spot wisata utama"  
"PT TCN harus bertanggung jawab... melakukan rehabilitasi ekosistem"  
"Darurat air bersih tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi jelas"  
"Air bersih... berubah menjadi komoditas mahal yang harus dibeli dari daratan"  
"PHK kepada hampir 4.000 pekerja... mencoreng citra pariwisata di NTB"



Foto: Lokasi limbah PT TCN di Gili Meno.

---

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini menyajikan aktivitas PT TCN sebagai penyebab kerusakan lingkungan laut di Gili Meno dan memicu krisis sosial-ekonomi. Judulnya langsung menyoroti temuan Walhi NTB terkait pencemaran laut akibat limbah penyulingan air dengan salinitas tinggi. Lead berita menegaskan bahwa pencemaran ini berdampak pada kerusakan terumbu karang dan mengancam ekosistem yang menjadi andalan hidup warga lokal. Latar belakang berita menunjukkan bahwa selain isu lingkungan, terdapat persoalan sosial berupa dugaan intimidasi terhadap warga yang menuntut akses air bersih. Kutipan dari Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menyampaikan keprihatinan terhadap kerusakan ekosistem laut dan menyoroti pentingnya kebebasan warga menyuarakan aspirasi tanpa tekanan. Pernyataan Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, memperkuat narasi warga sebagai korban. Ia menegaskan bahwa krisis air telah berlangsung selama enam bulan dan mendesak pemerintah mengambil langkah konkret tanpa merusak lingkungan. Masrun juga mengkritik air bersih yang kini menjadi komoditas mahal, bukan lagi hak dasar warga. Sementara itu, pernyataan dari PHRI melalui Vicky Hanoi menyoroti dampak ekonomi yang besar: potensi kerugian pelaku usaha, ancaman PHK terhadap ribuan

pekerja, dan rusaknya citra pariwisata NTB. Dengan struktur ini, berita mbingkai PT TCN sebagai aktor pencemar, warga sebagai korban lingkungan dan sosial, serta sektor pariwisata sebagai pihak yang ikut terdampak secara ekonomi. Pemerintah ditampilkan sebagai pihak yang didesak untuk segera bertindak.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menyusun narasi tentang keterkaitan antara pencemaran lingkungan laut dan krisis air bersih yang melanda Gili Meno, Lombok Utara. Dalam investigasi lapangan yang dilakukan pada Sabtu, 12 Oktober 2024, Walhi NTB bersama warga menemukan bahwa limbah dari fasilitas penyulingan air milik PT TCN mencemari perairan sekitar dan diduga turut merusak terumbu karang. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga memperburuk krisis air bersih yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut. Warga Gili Meno menjadi tokoh utama yang terdampak langsung, mengeluhkan kesulitan akses air bersih dan perubahan kondisi laut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam PHRI ikut terseret dalam narasi, karena dianggap belum memberikan solusi yang memadai. Kasus ini memperlihatkan bagaimana eksploitasi sumber daya oleh korporasi dapat menimbulkan krisis ganda, yakni kerusakan lingkungan dan hilangnya akses kebutuhan dasar bagi masyarakat.

## 3. Struktur Tematik

Berita ini membangun narasi tematik yang menyoroti keterkaitan antara pencemaran lingkungan, pelanggaran sosial, dan dampak ekonomi akibat aktivitas penyulingan air laut oleh PT TCN di Gili Meno. Paragraf awal memaparkan temuan Walhi NTB mengenai limbah dari proses penyulingan yang merusak terumbu karang dan mengancam ekosistem laut. Masalah ini diperparah oleh dugaan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dusun Gili Meno, yang juga menyoroti kerusakan di area wisata coral garden. Masyarakat kemudian mendesak agar pemerintah mencabut izin PT TCN, menuntut tanggung

jawab atas kerusakan yang terjadi, serta menekankan pentingnya solusi jangka panjang yang tidak merusak lingkungan. Narasi kemudian bergeser ke dampak ekonomi, dengan sorotan pada kerugian yang dialami sektor perhotelan dan restoran, serta ancaman terhadap sekitar 4.000 pekerja lokal. Krisis ini juga dinilai berpotensi merusak reputasi pariwisata NTB. Secara tematik, berita menyatukan isu lingkungan, hak masyarakat, dan keberlangsungan ekonomi dalam satu kerangka yang memperkuat urgensi penyelesaian menyeluruh dan berkelanjutan.

#### 4. Struktur Retoris

Berita ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan kerusakan ekosistem, dampak ekonomi, pelanggaran hak warga, serta ketidakhadiran solusi yang memadai. "Limbah penyulingan air milik PT TCN mencemari pantai" menjelaskan pencemaran yang ditemukan di lapangan. "Salinitas tinggi telah mencemari perairan Gili Meno" menguatkan bahwa limbah berpotensi merusak lingkungan laut. "Cairan... mempercepat proses kerusakan terumbu karang" menunjukkan dampak lingkungan jangka panjang yang diakui sebagai serius. "Sudah banyak kerusakan terumbu karang yang diduga kuat akibat aktivitas PT TCN" menegaskan hubungan antara kerusakan lingkungan dan aktivitas perusahaan. "Ada 11 warga dipanggil oleh polisi untuk klarifikasi" menjelaskan fakta sosial tentang tekanan terhadap warga yang bersuara. "Berdekatan dengan coral garden, spot wisata utama" menjelaskan fakta lokasi penting yang membuat dampaknya juga menyentuh sektor pariwisata. "PT TCN harus bertanggung jawab... melakukan rehabilitasi ekosistem" menjelaskan tuntutan tanggung jawab atas dampak faktual yang ditimbulkan. "Darurat air bersih tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi jelas" menjelaskan krisis jangka panjang yang belum ditangani secara efektif. "Air bersih... berubah menjadi komoditas mahal yang harus dibeli dari daratan" menjelaskan ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar. "PHK kepada hampir 4.000 pekerja... mencoreng citra pariwisata di NTB" menjelaskan dampak makro ekonomi serta reputasi daerah.

Pada artikel berita ini terdapat satu gambar yang menunjukkan area yang tampak berantakan dan kumuh di tepi pantai, dengan tumpukan terpal biru, selang-selang, pipa, dan sebuah tandon air berwarna merah, di tengah-tengah vegetasi. Pemandangan ini mengindikasikan lokasi atau fasilitas yang terkait dengan aktivitas pengolahan air. Dalam konteks berita, gambar ini merepresentasikan penemuan limbah penyulingan air milik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) yang mencemari pantai di kawasan Gili Meno. Walhi NTB menduga limbah dengan salinitas tinggi ini menjadi penyebab kerusakan terumbu karang dan mengancam ekosistem laut, yang merupakan sumber kehidupan utama bagi penduduk setempat, memperparah krisis air dan lingkungan di wilayah tersebut.

#### 8. Analisis Artikel Berita 8 detik.com

Judul: Puluhan Warga Gili Meno Datangi DPRD Lombok Utara Buntut

Krisis Air

Sumber: detik.com

Tanggal: 14 November 2024

Ringkasan: Pada 14 November 2024, warga Gili Meno mendatangi DPRD Lombok Utara menuntut solusi krisis air bersih yang sudah berlangsung tujuh bulan. Mereka menolak PT TCN karena diduga mencemari laut dan merusak ekosistem. Walhi NTB menilai PT TCN melanggar hukum karena tetap beroperasi meski izinnya dicabut. DPRD merespons dengan rencana menambah titik distribusi air, memutuskan kerja sama dengan PT TCN, dan mendorong pemasangan pipa bawah laut sebagai solusi jangka panjang yang ramah lingkungan.

Tabel 4.18 Hasil Analisis Artikel 8 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Puluhan Warga Gili Meno Datangi DPRD Lombok Utara Buntut Krisis Air
	Lead	Puluhan warga Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, ramai-ramai mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara, Kamis siang (14/11/2024). Mereka menanyakan langkah pemerintah terhadap masalah krisis air bersih yang sudah berlangsung 7 bulan di sana.
	Latar Informasi	Berita ini mengangkat aksi warga Gili Meno yang menyuarakan protes terhadap krisis air bersih serta kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT TCN. Sejak 2021, warga telah

---

menolak keberadaan PT TCN, namun krisis makin parah hingga harus membeli air dari luar pulau. Walhi NTB mendampingi warga dan menegaskan bahwa PT TCN mencemari lingkungan dan tetap beroperasi walau izinnya telah dicabut. DPRD menyatakan akan mengusulkan penambahan distribusi air, memutus kerja sama dengan PT TCN, serta memasang pipa bawah laut sebagai solusi jangka panjang.

Kutipan

Kepala Dusun Gili Meno Masrun

Kutipan Tidak Langsung:

1. Salah satu warga, Masrun, mengungkapkan krisis air bersih yang semakin parah di Gili Meno. Bahkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT Tiara Cipta Nirwana (PT TCN) di Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air, memunculkan gelombang protes dari masyarakat. (Masrun).
2. Menurut dia, krisis air bersih semakin parah di kawasan Gili Meno. Warga mengaku telah mencapai titik kritis menghadapi krisis air di Gili Meno. (Masrun).
3. Salam ini, air tandon yang ada tidak mencukupi kebutuhan makan minum hingga memasak. Bahkan beberapa hewan ternak banyak mati karena dehidrasi. (Masrun).

Kutipan Langsung:

1. "Kami datang ke kantor DPRD untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD guna menyelesaikan masalah krisis air bersih yang melanda Gili Meno dan Trawangan dan kerusakan ekosistem," (Masrun).
2. "Sejak 2021, kami telah mengajukan petisi penolakan terhadap PT TCN, kini merasakan dampak nyata dari kurangnya pasokan air bersih. Kami sudah tidak bisa bertahan lagi," (Masrun).
3. "Kini, kami harus membeli air dari luar pulau, namun itu pun tidak cukup untuk kebutuhan kami sehari-hari," (Masrun).  
Direktur Wahana Lingkungan Hidup NTB Amri Nuryadin

Kutipan Tidak Langsung:

1. Direktur Wahana Lingkungan Hidup NTB Amri Nuryadin yang ikut mendampingi warga ke kantor DPRD Lombok Utara menambahkan masalah ini bukan hanya tentang ketersediaan air, tetapi juga dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT TCN. (Amri).
2. Ia juga menyebutkan bahwa PT TCN telah melakukan pelanggaran besar dengan terus beroperasi meskipun izin pemanfaatan ruang laut mereka telah dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (Amri).
3. Dia menyarankan agar legislatif melakukan penegakan hukum terhadap PT TCN yang telah melanggar berbagai peraturan, termasuk pencemaran lingkungan dan pelanggaran administratif terkait izin usaha. (Amri).

Kutipan Langsung:

1. "PT TCN seharusnya membantu menyediakan air bersih, justru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Limbah dari perusahaan ini telah mencemari perairan dan memperburuk ekosistem laut di sekitar tiga Gili," (Amri).
2. "Kami mendesak pemerintah untuk tegas dalam menegakkan hukum dan menghentikan aktivitas PT TCN yang merusak lingkungan hidup," (Amri).

Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani

Kutipan Tidak Langsung:

1. Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani mengatakan pemerintah perlu menambah droping air untuk di Gili Meno. (Agus).
  2. Menurut Agus, DPRD akan merekomendasikan kepada Pemda untuk meninjau dan memutus Kerja sama Pemerintah
-

		dengan Badan Usaha dengan PT TCN.(Agus). 3. Dia pun akan memberikan masukan ke Pemda Lombok Utara untuk segera menyelesaikan masalah krisis air bersih tersebut dengan solusi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan(Agus). Kutipan Langsung: 1. "Bila perlu ditambah dari 5 titik menjadi 10-15 titik untuk memenuhi kebutuhan warga,"(Agus). 2. "Kami juga memprioritaskan pemasangan pipa bawah laut sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan,"(Agus).		
	Sumber	1. Kepala Dusun Gili Meno Masrun 2. Direktur Wahana Lingkungan Hidup NTB Amri Nuryadin 3. Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani		
	Pernyataan Opini Penutup	Tidak ada Dia pun akan memberikan masukan ke Pemda Lombok Utara untuk segera menyelesaikan masalah krisis air bersih tersebut dengan solusi yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.		
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	Aksi warga Gili Meno menuntut solusi krisis air bersih dan kerusakan lingkungan akibat PT TCN		
	<i>Where</i>	Kantor DPRD Lombok Utara		
	<i>When</i>	Kamis, 14 November 2024 untuk aksi warga		
	<i>Who</i>	Warga Gili Meno, PT TCN, Walhi NTB, DPRD Lombok Utara		
	<i>Why</i>	Krisis air sudah berlangsung 7 bulan dan diperparah oleh aktivitas pencemaran dari PT TCN		
	<i>How</i>	Warga datang langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi, didampingi Walhi, dan direspons oleh DPRD		
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1–3 menjelaskan aksi protes yang dilakukan oleh warga Gili Meno yang mendatangi DPRD Lombok Utara untuk menuntut solusi terkait krisis air bersih dan kerusakan lingkungan yang mereka alami akibat aktivitas PT TCN.		
		Paragraf 4–6 menekankan betapa seriusnya dampak krisis air terhadap kehidupan masyarakat, termasuk pengaruh langsung terhadap kebutuhan pokok dan hewan ternak. Warga menegaskan bahwa mereka tidak dapat bertahan dalam kondisi yang ada saat ini.		
		Paragraf 7–9 memperkuat narasi mengenai dampak lingkungan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT TCN melalui pernyataan dari Direktur Walhi NTB. Selain mencemari lingkungan, PT TCN juga disebutkan tetap beroperasi meskipun izinnnya telah dicabut oleh KKP.		
		Paragraf 10–11 menyoroti tuntutan kepada DPRD agar menangani dengan serius pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT TCN, termasuk tindakan pencemaran dan pelanggaran administratif.		
		Paragraf 12–14 menampilkan tanggapan dari DPRD Lombok Utara yang mengusulkan peningkatan distribusi air bersih serta peninjauan kembali kerja sama dengan PT TCN. DPRD juga mengusulkan solusi jangka panjang berupa pemasangan pipa bawah laut.		
		Kata-kata yang menekankan fakta, yakni: "Krisis air bersih yang sudah berlangsung 7 bulan" "Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT TCN" "Kami sudah tidak bisa bertahan lagi" "Air tandon tidak mencukupi kebutuhan makan, minum, hingga memasak" "Beberapa hewan ternak banyak mati karena dehidrasi" "Kami harus membeli air dari luar pulau, namun itu pun tidak cukup" "Limbah dari perusahaan ini telah mencemari perairan dan memperburuk ekosistem laut" "PT TCN... terus beroperasi meskipun izin... telah dicabut oleh		
		<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	

---

KKP"

"Melanggar berbagai peraturan, termasuk pencemaran lingkungan dan pelanggaran administratif"

"Menambah dropping air... dari 5 titik menjadi 10–15 titik"

"Pemasangan pipa bawah laut sebagai solusi jangka panjang"



Warga Gili Meno, Lombok Utara, mengadu ke DPRD karena krisis air berkepanjangan

---

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini menyajikan aksi puluhan warga Gili Meno ke DPRD Lombok Utara sebagai bentuk protes atas krisis air bersih yang telah berlangsung selama tujuh bulan dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT TCN. Judul dan lead langsung menekankan keresahan warga terhadap lambannya penanganan pemerintah serta dampak jangka panjang dari pencemaran. Dalam narasi, warga diwakili oleh Kepala Dusun Masrun menyuarakan kondisi kritis di lapangan, termasuk kekurangan air bersih, matinya ternak, dan terpaksa membeli air dari luar pulau. Ia juga mengingatkan bahwa sejak 2021 warga telah menolak kehadiran PT TCN. Kutipan Masrun menggambarkan situasi darurat serta desakan agar DPRD dan Pemda mengambil langkah nyata, termasuk menghentikan kerusakan ekosistem. Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, memperkuat narasi warga dengan menuduh PT TCN sebagai penyebab pencemaran laut dan pelanggar izin. Ia menuntut penegakan hukum dan penghentian operasional perusahaan. Pernyataannya menekankan bahwa krisis ini bukan hanya soal akses air, tapi juga soal keadilan lingkungan. Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, merespons dengan menjanjikan peningkatan distribusi air bersih dan mendorong solusi jangka panjang seperti pemasangan pipa bawah laut. Ia juga menyatakan DPRD akan merekomendasikan pemutusan kerja sama dengan PT TCN. Struktur berita ini menempatkan warga sebagai korban utama, PT TCN sebagai pihak yang disalahkan, dan DPRD sebagai pihak

yang mulai merespons tekanan publik, dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang didorong untuk bergerak lebih cepat.

## **2. Struktur Skrip**

Berita ini menyusun narasi tentang aksi warga Gili Meno sebagai bentuk perlawanan terhadap krisis yang berlarut, baik krisis air bersih maupun kerusakan lingkungan. Pada Kamis, 14 November 2024, sekelompok warga mendatangi Kantor DPRD Lombok Utara untuk menyampaikan tuntutan langsung terkait krisis air yang telah berlangsung selama tujuh bulan. Aksi ini juga menyoroti pencemaran lingkungan yang diduga disebabkan oleh aktivitas PT TCN, termasuk limbah penyulingan air laut yang mencemari laut dan merusak ekosistem. Warga hadir bersama Walhi NTB, yang mendampingi mereka dalam menyuarkan dampak nyata yang dirasakan di lapangan. DPRD Lombok Utara merespons kedatangan warga dan mulai meninjau kemungkinan solusi. Dalam narasi ini, warga Gili Meno tampil sebagai tokoh sentral yang mengambil peran aktif, sementara pemerintah daerah dan DPRD mulai ditekan untuk keluar dari posisi pasif dan segera bertindak. Isu ini memperlihatkan pertemuan antara krisis lingkungan, kelambanan birokrasi, dan keberanian komunitas lokal menuntut keadilan ekologis dan sosial.

## **3. Struktur Tematik**

Berita ini menyusun narasi tematik yang menyoroti eskalasi krisis air bersih dan kerusakan lingkungan di Gili Meno sebagai isu yang memicu mobilisasi warga untuk menuntut keadilan. Paragraf awal menggambarkan aksi protes warga ke DPRD Lombok Utara, menuntut solusi konkret atas dampak buruk yang mereka alami akibat aktivitas PT TCN. Paragraf selanjutnya menekankan beratnya kondisi di lapangan, di mana warga tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mengalami kerugian pada sektor peternakan. Narasi kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Direktur Walhi NTB yang menuding PT TCN melakukan pencemaran dan tetap beroperasi meskipun izinnnya telah dicabut, menunjukkan adanya pelanggaran hukum dan pengabaian terhadap peraturan. Warga pun menuntut DPRD untuk mengambil sikap tegas atas pelanggaran tersebut.

Sebagai respons, DPRD Lombok Utara menyatakan komitmennya untuk meninjau ulang kerja sama dengan PT TCN, memperkuat distribusi air bersih, serta merancang solusi jangka panjang melalui pemasangan pipa bawah laut. Secara tematik, berita ini membangun alur yang runtut, dimulai dari aksi warga, dampak krisis, pelanggaran lingkungan, desakan hukum, hingga langkah-langkah legislatif, yang menegaskan urgensi penanganan menyeluruh terhadap krisis air di Gili Meno.

#### 4. Struktur Retoris

Berita menggunakan kata-kata yang menekankan fakta tentang krisis air bersih yang parah dan berkepanjangan, serta berdampak langsung terhadap warga serta lingkungan hidup. "Krisis air bersih yang sudah berlangsung 7 bulan" menyajikan durasi krisis secara eksplisit dan menunjukkan masalah kronis. "Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT TCN" menjelaskan hubungan sebab-akibat antara aktivitas industri dan dampak ekologis. "Kami sudah tidak bisa bertahan lagi" menggambarkan kondisi warga sudah sangat terdesak secara nyata. "Air tandon tidak mencukupi kebutuhan makan, minum, hingga memasak" menjelaskan dampak terhadap kebutuhan dasar harian. "Beberapa hewan ternak banyak mati karena dehidrasi" menjelaskan dampak luas krisis terhadap ekonomi warga dan kesejahteraan hewan. "Kami harus membeli air dari luar pulau, namun itu pun tidak cukup" menjelaskan beban ekonomi dan ketimpangan akses terhadap air. "Limbah dari perusahaan ini telah mencemari perairan dan memperburuk ekosistem laut" menjelaskan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. "PT TCN... terus beroperasi meskipun izin... telah dicabut oleh KKP" menjelaskan pelanggaran administratif yang menyoroti lemahnya pengawasan hukum. "Melanggar berbagai peraturan, termasuk pencemaran lingkungan dan pelanggaran administratif" menyebutkan pelanggaran hukum yang berlapis. "Menambah dropping air... dari 5 titik menjadi 10–15 titik" dan "Pemasangan pipa bawah laut sebagai solusi jangka panjang" menjelaskan usulan untuk krisis yang berkelanjutan. Pada artikel ini terdapat sebuah gambar yang menunjukkan suasana sebuah ruangan rapat yang dipenuhi oleh puluhan warga yang duduk berhadapan

dengan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara. Pemandangan ini secara langsung menggambarkan hearing atau pertemuan yang terjadi pada Kamis siang (14/11/2024), di mana warga Gili Meno, didampingi oleh Direktur Walhi NTB, mendatangi kantor DPRD Lombok Utara. Mereka datang untuk menanyakan langkah konkret pemerintah terhadap krisis air bersih yang telah berlangsung selama 7 bulan dan menuntut penyelesaian masalah tersebut, termasuk dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).

#### 10. Analisis Artikel Berita 9 detik.com

Judul : Krisis Air Parah Berbulan-bulan di Gili Meno yang Tak Teratasi  
 Sumber : detik.com  
 Tanggal : 15 Januari 2025  
 Ringkasan : Krisis air bersih di Gili Meno yang telah berlangsung tujuh bulan mendorong warga kembali mendatangi DPRD Lombok Utara pada 14 Januari 2025. Mereka menuntut penambahan pasokan dan penampungan air bersih, serta evaluasi kerja sama Pemda-PDAM dengan PT TCN yang dinilai tidak efektif. Warga juga mengusulkan pemasangan pipa bawah laut sebagai solusi jangka panjang. Walhi NTB menegaskan pentingnya melanjutkan dropping air dan mendesak tindakan tegas terhadap PT TCN. DPRD berkomitmen menyurati Pemda agar distribusi air darurat terus berjalan dan solusi permanen segera disiapkan.

Tabel 4.19 Hasil Analisis Artikel 9 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Krisis Air Parah Berbulan-bulan di Gili Meno yang Tak Teratasi
	Lead	Krisis air di Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), tak kunjung terselesaikan. Sudah tujuh bulan warga di sana kesulitan mendapatkan air bersih.
	Latar Informasi	Warga Gili Meno di Lombok Utara sudah tujuh bulan mengalami kesulitan air bersih. Pada 14 Januari 2025, mereka mendatangi DPRD Lombok Utara untuk menindaklanjuti audiensi sebelumnya yang dilakukan pada November 2024. Mereka menyerahkan berita acara berisi permintaan agar pasokan air ditambah, serta mendesak evaluasi kerja sama dengan PT TCN. Walhi NTB dan DPRD mendukung usulan

Kutipan	<p>warga dan mendorong percepatan solusi jangka panjang seperti pemasangan pipa bawah laut.</p> <p>Kepala Dusun Gili Meno Masrun</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Minta Pasokan Air Ditambah Masrun menyatakan warga mendesak agar volume pasokan air bersih ke Gili Meno ditambah, serta meminta penambahan titik penampungan air. Selain itu, warga mendesak DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan Perusahaan Daerah Amerta Dayan Gunung untuk meninjau ulang kerja sama dengan PT Tiara Citra Nirwana (PT TCN) terkait penyediaan air bersih menggunakan teknologi SWRO(Masrun).</li> <li>2. Sebagai solusi jangka panjang, warga juga mengusulkan penyaluran air bersih melalui sistem pipa bawah laut ke Gili Meno dan Gili Trawangan. Masrun mengungkapkan bahwa selama dua bulan terakhir tidak ada lagi bantuan droping air dari Pemda, sehingga warga hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.(Masrun).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Ada beberapa poin yang ada di dalam berita acara. Intinya kami meminta pemerintah daerah tetap melakukan suplai air bersih ke Gili Meno,"(Masrun).</li> <li>2. "Situasi ini sangat memprihatinkan,"(Masrun).</li> </ol> <p>Direktur Wahana Lingkungan Hidup NTB Amri Nuryadin</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menegaskan pentingnya kelanjutan penyaluran air bersih sebagai solusi darurat(Amri).</li> <li>2. Ia juga mendesak Pemkab Lombok Utara segera memenuhi komitmen dalam penyediaan air bersih dan mengambil tindakan tegas terhadap PT TCN atas pelanggaran yang telah terjadi. Selain itu, Amri meminta percepatan proyek pipa bawah laut sebagai solusi distribusi air bersih yang berkelanjutan.(Amri).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Droping air bersih tidak boleh berhenti. Ini adalah kebutuhan mendesak, dan merupakan hak dasar warga atas air bersih yang harus dipenuhi,"(Amri).</li> </ol> <p>Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPRD Segera Surati Pemkab Lombok Utara Menanggapi tuntutan warga, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menyatakan pihaknya akan segera bersurat kepada Pemkab untuk memastikan realisasi hasil audiensi tersebut.(Agus).</li> <li>2. Ia menegaskan bahwa DPRD berkomitmen mendorong Pemkab Lombok Utara untuk segera melanjutkan distribusi air sembari mempersiapkan solusi jangka panjang.(Agus).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Ya, terutama terkait distribusi air bersih melalui tandon sebagai langkah darurat atau solusi jangka pendek,"(Agus).</li> <li>2. "Kami dorong juga pemasangan pipa bawah laut. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,"(Agus).</li> </ol>
Sumber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dusun Gili Meno Masrun</li> <li>2. Direktur Wahana Lingkungan Hidup NTB Amri Nuryadin</li> <li>3. Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani</li> </ol>
Pernyataan Opini Penutup	<p>Tidak ada</p> <p>"Kami dorong juga pemasangan pipa bawah laut. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegas Agus.</p>
<b>Struktur Skrip</b>	<p><i>What</i> Warga menuntut penanganan krisis air bersih yang belum terselesaikan</p> <p><i>Where</i> Kantor DPRD Lombok Utara, NTB</p> <p><i>When</i> Jumat, 15 November 2024 (pernyataan DPRD); Kamis, 14 November 2024 (aksi warga).</p> <p><i>Who</i> Warga Gili Meno, DPRD Lombok Utara, Walhi NTB, instansi</p>

	<i>Why</i>	pemerintah daerah Karena tidak ada lagi bantuan air dari Pemda selama dua bulan, dan warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar
	<i>How</i>	Warga menyerahkan berita acara dan menyampaikan tuntutan secara langsung kepada DPRD
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	Paragraf 1–2 membahas mengenai krisis air yang masih belum teratasi serta tindak lanjut dari audiensi yang telah dilakukan sebelumnya. Paragraf 3–4 menjelaskan tentang penyerahan berita acara dan permohonan untuk pasokan air bersih. Paragraf 5–7 memuat tuntutan dari masyarakat terkait peninjauan kerja sama dengan PT TCN serta usulan solusi mengenai pipa bawah laut. Paragraf 8–10 menyampaikan dukungan dari Walhi NTB, yang menekankan pentingnya distribusi air sebagai hak dasar bagi setiap individu. Paragraf 11–13 menampilkan tanggapan dari DPRD yang berkomitmen untuk menyurati pemerintah dan mendorong penyelesaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	Kata-kata yang menekankan fakta, yakni: "Krisis air... tak kunjung terselesaikan" "Sudah tujuh bulan warga... kesulitan mendapatkan air bersih" "Warga kembali mendatangi kantor DPRD" "Kami meminta pemerintah daerah tetap melakukan suplai air bersih" "Warga mendesak agar volume pasokan air bersih.. ditambah" "Selama dua bulan terakhir tidak ada lagi bantuan dropping air" "Warga hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan" "Situasi ini sangat memprihatinkan" "Dropping air bersih tidak boleh terhenti... merupakan hak dasar warga" "Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut"
		
		Foto: Warga mendatangi kantor DPRD Lombok Utara, Selasa (14/1/2025). (dok. Walhi NTB)

## Rincian analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Berita ini menyajikan krisis air bersih yang berkepanjangan di Gili Meno sebagai kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar warga. Judul secara tegas menyoroti kondisi darurat yang telah berlangsung selama tujuh bulan tanpa penyelesaian. Lead berita menyampaikan aksi warga pada Januari 2025 yang menindaklanjuti audiensi sebelumnya, menunjukkan bahwa masalah ini telah lama disuarakan namun belum ditangani secara efektif. Kutipan dari Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, menegaskan

desakan warga agar pasokan air ditambah dan sistem distribusi diperluas, serta mengevaluasi kerja sama dengan PT TCN. Ia juga menyebut bahwa dalam dua bulan terakhir tidak ada bantuan dropping air, sehingga warga hanya bergantung pada air hujan.

Direktur Walhi NTB, Amri Nuryadin, menguatkan narasi bahwa air bersih adalah hak dasar yang harus segera dipenuhi. Ia mendesak tindakan tegas terhadap PT TCN dan percepatan solusi jangka panjang seperti pemasangan pipa bawah laut. Ketua DPRD Lombok Utara, Agus Jasmani, menyatakan dukungan atas tuntutan warga dan akan menyurati Pemkab untuk memastikan tindak lanjut. Ia juga mendorong percepatan distribusi air melalui tandon sebagai solusi jangka pendek dan pemasangan pipa laut sebagai langkah jangka panjang. Struktur berita ini menempatkan warga sebagai pihak yang paling terdampak, sementara pemerintah digambarkan belum cukup responsif. DPRD dan Walhi tampil sebagai pihak yang mendorong percepatan solusi, menegaskan bahwa masalah ini membutuhkan perhatian serius dan tidak bisa terus diabaikan.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menggambarkan keberlanjutan krisis air bersih yang belum terselesaikan di Gili Meno dan meningkatnya tekanan warga terhadap pemerintah daerah. Pada Selasa, 14 Januari 2025, warga Gili Meno kembali mendatangi Kantor DPRD Lombok Utara untuk menuntut penanganan nyata atas krisis yang telah berlangsung berbulan-bulan. Aksi ini dipicu oleh terhentinya bantuan air dari pemerintah daerah selama dua bulan terakhir, yang membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam aksi tersebut, warga yang didampingi Walhi NTB menyerahkan berita acara serta menyampaikan tuntutan secara langsung kepada anggota DPRD. Tokoh utama dalam narasi ini adalah warga Gili Meno sebagai pihak terdampak, sementara DPRD dan instansi pemerintah daerah kembali disorot karena dinilai tidak responsif. Aksi ini memperkuat bingkai tentang ketidakadilan layanan publik dan perlunya tanggung jawab nyata dari pemerintah dalam menjamin hak dasar warga atas air bersih.

### 3. Struktur Tematik

Berita ini membangun narasi tematik yang berfokus pada kelanjutan krisis air di Gili Meno dan langkah-langkah advokasi warga untuk menuntut solusi konkret. Paragraf awal menegaskan bahwa krisis air masih berlangsung tanpa penyelesaian, meskipun audiensi sebelumnya telah dilakukan. Dalam paragraf selanjutnya, digambarkan penyerahan berita acara dan permohonan resmi dari warga agar pasokan air bersih segera dipenuhi. Tuntutan masyarakat kemudian diperjelas, termasuk desakan untuk meninjau ulang kerja sama dengan PT TCN dan usulan teknis berupa pemasangan pipa bawah laut sebagai solusi jangka panjang. Walhi NTB turut menyuarakan dukungan, menekankan bahwa air bersih adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Sebagai tanggapan, DPRD menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti masalah ini melalui komunikasi resmi dengan pemerintah, baik dalam bentuk langkah darurat maupun perencanaan solusi berkelanjutan. Secara tematik, berita ini menggambarkan kesinambungan dari advokasi warga, penguatan oleh organisasi lingkungan, dan respons politik, yang membentuk tekanan moral dan kelembagaan untuk mengakhiri krisis air di Gili Meno.

### 4. Struktur Retoris

Berita menggunakan kata-kata yang menekankan fakta mengenai parahnya krisis air. "Krisis air... tak kunjung terselesaikan" menekankan bahwa masalah ini sudah lama dan belum ada penyelesaian nyata. "Sudah tujuh bulan warga... kesulitan mendapatkan air bersih" menunjukkan tingkat keparahan dan kelambanan respons. "Warga kembali mendatangi kantor DPRD" menandakan warga terus berjuang karena belum ada perubahan. "Kami meminta pemerintah daerah tetap melakukan suplai air bersih" menunjukkan bahwa kebutuhan dasar belum terpenuhi dan masih bergantung pada bantuan. "Warga mendesak agar volume pasokan air bersih... ditambah" menjelaskan bahwa kondisi saat ini masih belum cukup bahkan untuk kebutuhan minimum. "Selama dua bulan terakhir tidak ada lagi bantuan dropping air" menjelaskan terhentinya bantuan yang sebelumnya ada. "Warga hanya mengandalkan air hujan untuk memenuhi

kebutuhan" menunjukkan ketidaklayakan situasi dan potensi risiko kesehatan. "Situasi ini sangat memprihatinkan" memberikan penilaian langsung terhadap kondisi yang memperkuat urgensi. "Dropping air bersih tidak boleh terhenti... merupakan hak dasar warga" menekankan bahwa akses air adalah hak, bukan sekadar bantuan. "Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut" menunjukkan bahwa penundaan berarti memperburuk kondisi warga.

Dalam artikel berita ini terdapat sebuah foto yang memperlihatkan suasana sebuah ruang rapat yang dipenuhi oleh puluhan warga yang duduk berhadapan dengan meja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara. Pemandangan ini secara langsung mencerminkan hearing atau pertemuan yang berlangsung pada Kamis siang (14/11/2024), di mana warga Gili Meno, didampingi oleh Direktur Walhi NTB, mengunjungi kantor DPRD Lombok Utara. Mereka hadir untuk menanyakan langkah konkret pemerintah terkait krisis air bersih yang telah berlangsung selama 7 bulan dan menuntut penyelesaian masalah tersebut, termasuk dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).

#### **10. Analisis Artikel Berita 10 detik.com**

Judul : DPRD Desak Pemkab Lombok Utara Putus Kerja Sama PT TCN  
Sumber : detik.com  
Tanggal : 15 November 2025  
Ringkasan : DPRD Lombok Utara mendesak Pemkab memutus kerja sama dengan PT TCN karena diduga mencemari lingkungan di Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air. PT TCN dinilai melanggar aturan KPBU dan mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan. Walhi menilai kerja sama ini cacat hukum dan minta pemerintah menyediakan akses air bersih bagi warga. Sebelumnya, warga Gili Meno protes ke DPRD karena krisis air bersih yang makin parah.

Tabel 4.20 Hasil Analisis Artikel 10 Detik.com

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	DPRD Desak Pemkab Lombok Utara Putus Kerja Sama PT TCN
	Lead	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara untuk memutus kerja sama dengan perusahaan air PT Tiara Citra Nirwana (TCN). Pemutusan kontrak itu buntut adanya dugaan pencemaran lingkungan oleh PT TCN di Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air yang berdampak kepada masyarakat.
	Latar Informasi	PT TCN dituduh mencemari lingkungan dan memperburuk krisis air bersih di wilayah Gili. DPRD, melalui Fraksi Gerindra dan dukungan Walhi, meminta Pemkab Lombok Utara segera mengakhiri kerja sama KPBU dengan PT TCN. DPRD menganggap Pemda lalai dalam menegakkan aturan dan perlindungan lingkungan. Selain itu, sebelumnya warga Gili Meno juga telah menyampaikan protes langsung kepada DPRD akibat dampak dari krisis air dan pencemaran lingkungan oleh perusahaan tersebut.
	Kutipan	<p>Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Lombok Utara, Nasrudin</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Lombok Utara, Nasrudin, meminta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) PT TCN disetop. Sebab, ada pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan tersebut.(Nasrudin).</li> <li>2. Nasrudin mempertanyakan alasan Pemkab Lombok Utara yang masih mempertahankan kerja sama dengan PT TCN.(Nasrudin).</li> <li>3. Nasrudin menegaskan Pemda Lombok Utara harus segera meninjau kembali dokumen KPBU dengan PT TCN. Menurutnya, Pemkab Lombok Utara tidak bisa diam ketika ada perusahaan yang jelas-jelas merusak lingkungan dan mengabaikan hak rakyat terus dibiarkan beroperasi.(Nasrudin).</li> </ol> <p>Kutipan Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Kami sudah meminta dokumen terkait KPBU ini sejak beberapa tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemda,"(Nasrudin).</li> <li>2. "Harus segera dihentikan,"(Nasrudin).</li> <li>3. "Kami meminta bupati untuk segera meninjau ulang kerja sama ini,"(Nasrudin).</li> </ol> <p>Perwakilan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ferry Widodo</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwakilan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ferry Widodo, menyampaikan KPBU antara PT TCN dan Pemkab Lombok Utara tidak memperhitungkan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).(Ferry).</li> <li>2. Menurut Ferry, salah satu kejanggalan dalam KPBU Pemkab Lombok Utara dengan PT TCN adalah tidak dimasukkannya UUPLH sebagai dasar hukum. Walhasil, kerja sama itu bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.(Ferry).</li> <li>3. Selain itu, Ferry melanjutkan, aparat penegak hukum (APH) diminta untuk segera menindak tegas pelanggaran PT TCN. APH juga harus memastikan perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.(Ferry).</li> </ol>

		<p>Kutipan Langsung:</p> <p>1. "Pemerintah abai dengan hal-hal dasar. Sekarang pemerintah harus menyediakan akses air bersih yang aman dan terjangkau bagi warga Gili Meno,"(Ferry). Kepala Dusun Gili Meno Masrun</p> <p>Kutipan Tidak Langsung:</p> <p>1. Masrun, warga Gili Meno, menyatakan krisis air bersih yang makin parah di Gili Meno. Bahkan, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas PT TCN di Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air, memunculkan gelombang protes dari masyarakat.(Masrun). 2. Menurut dia, krisis air bersih makin parah di kawasan Gili Meno. Warga mengaku telah mencapai titik kritis menghadapi krisis air di Gili Meno. (Masrun).</p> <p>Kutipan Langsung:</p> <p>1. "Kami datang ke kantor DPRD untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD guna menyelesaikan masalah krisis air bersih yang melanda Gili Meno dan Trawangan dan kerusakan ekosistem,"(Masrun). 2. "Sejak 2021, kami telah mengajukan petisi penolakan terhadap PT TCN, kini merasakan dampak nyata dari kurangnya pasokan air bersih. Kami sudah tidak bisa bertahan lagi,"(Masrun). 3. Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Lombok Utara, Nasrudin 2. Perwakilan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ferry Widodo 3. Kepala Dusun Gili Meno Masrun</p>
	Sumber	<p>1. Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Lombok Utara, Nasrudin 2. Perwakilan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ferry Widodo 3. Kepala Dusun Gili Meno Masrun</p>
	Pernyataan Opini	Tidak ada
	Penutup	"Sejak 2021, kami telah mengajukan petisi penolakan terhadap PT TCN, kini merasakan dampak nyata dari kurangnya pasokan air bersih. Kami sudah tidak bisa bertahan lagi," ujarnya.
<b>Struktur Skrip</b>	<i>What</i>	DPRD meminta Pemkab memutus kontrak kerja sama dengan PT TCN karena pencemaran lingkungan
	<i>Where</i>	Kabupaten Lombok Utara, khususnya di wilayah Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air
	<i>When</i>	Jumat, 15 November 2024 (dan sebelumnya Kamis, 14 November 2024 untuk aksi warga)
	<i>Who</i>	DPRD Lombok Utara, Walhi Nasional, warga Gili Meno, PT TCN, dan Pemkab Lombok Utara
	<i>Why</i>	Karena PT TCN dianggap melanggar prinsip lingkungan dan memperburuk krisis air bersih
	<i>How</i>	DPRD menyampaikan desakan kepada Pemkab melalui pernyataan publik dan meminta tindakan konkret
<b>Struktur Tematik</b>	Paragraf, Proposisi kalimat, Hubungan antar kalimat	<p>Paragraf 1–2 menguraikan tuntutan DPRD untuk menghentikan kerja sama dengan PT TCN. Disambung dengan kutipan dari anggota fraksi partai gerakan indonesia raya (Gerindra) DPRD Lombok Utara Nasrudin, yang meminta kerja sama pemerintah dengan badan usaha KPBU PT TCN disetop. Sebab ada pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan tersebut.</p> <p>Paragraf 3–5 menyajikan kutipan langsung dari Nasrudin yang mempertanyakan sikap Pemkab serta menegaskan pelanggaran yang dilakukan oleh PT TCN.</p> <p>Paragraf 6–8 memuat kritik dari Perwakilan Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Nasional yaitu Ferry Widodo mengenai pelanggaran prinsip hukum lingkungan dalam kerja sama tersebut dan permintaan untuk penegakan hukum.</p> <p>Paragraf 9–12 memberikan konteks tambahan dengan mengulas kembali aksi protes warga Gili Meno yang sebelumnya melaporkan kepada DPRD terkait krisis air dan</p>

<b>Struktur Retoris</b>	Kata, Idiom, Gambar, Grafik	<p>pencemaran lingkungan.          Kata-kata yang menekankan fakta, yakni          "Dugaan pencemaran lingkungan oleh PT TCN di Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air"          "Kami sudah meminta dokumen... sejak beberapa tahun lalu"          "Sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemda"          "Harus segera dihentikan" / "tidak bisa diam ketika... merusak lingkungan"          "Tidak dimasukkannya UU PPLH sebagai dasar hukum"          "Kerja sama itu bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan"          "Krisis air bersih... selama tujuh bulan"          "Warga... telah mencapai titik kritis menghadapi krisis air"          "Kami sudah tidak bisa bertahan lagi"          "Aparat penegak hukum diminta menindak tegas"</p>  <p>Foto: Warga Gili Meno, Lombok Utara, mengadu ke DPRD karena krisis air berkepanjangan, Kamis (14/11/2024). (dok. Walhi NTB)</p>
-------------------------	-----------------------------	--

**Rincian analisis**

**1. Struktur Sintaksis**

Berita ini menyajikan desakan DPRD Lombok Utara terhadap Pemkab untuk segera memutus kerja sama dengan PT Tiara Citra Nirwana (TCN) sebagai bentuk tanggapan atas krisis air dan pencemaran lingkungan yang terus berlangsung di kawasan Gili. Judul berita menegaskan sikap tegas legislatif terhadap dugaan pelanggaran oleh PT TCN dan kelambanan pemerintah dalam bertindak. Isi berita menyampaikan bahwa desakan ini muncul dari Fraksi Gerindra, dengan dukungan Walhi dan warga Gili Meno. Anggota DPRD Nasrudin menilai kerja sama dengan PT TCN sudah tidak layak dipertahankan karena perusahaan diduga merusak lingkungan dan mengabaikan hak warga atas air bersih. Ia juga mengkritik kurangnya transparansi Pemkab terkait dokumen kerja sama KPBU dan menegaskan bahwa bupati harus segera meninjau ulang perjanjian tersebut. Perwakilan Walhi, Ferry Widodo, memperkuat kritik dengan menyebut kerja sama itu tidak mengacu pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ia menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan diabaikan dan menuntut penegakan hukum atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT

TCN. Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, mewakili suara warga yang telah lama memprotes keberadaan PT TCN. Ia menekankan bahwa sejak 2021 warga sudah mengajukan penolakan dan kini merasakan dampak langsung berupa krisis air yang makin parah. Dengan struktur ini, berita membingkai DPRD, Walhi, dan warga sebagai pihak yang aktif menuntut keadilan, sementara Pemkab digambarkan pasif dan abai terhadap pelanggaran lingkungan serta penderitaan masyarakat. PT TCN diposisikan sebagai penyebab utama krisis, baik dari sisi lingkungan maupun akses air bersih.

## 2. Struktur Skrip

Berita ini menggambarkan respons politik DPRD Lombok Utara terhadap desakan warga dan temuan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT TCN di wilayah Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air. Pada Jumat, 15 November 2024, sehari setelah aksi unjuk rasa warga Gili Meno, DPRD menyampaikan pernyataan publik yang mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk segera memutus kontrak kerja sama dengan PT TCN. Tekanan ini muncul setelah perusahaan dinilai melanggar prinsip perlindungan lingkungan dan memperburuk krisis air bersih yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Tokoh utama dalam narasi ini adalah DPRD sebagai lembaga perwakilan yang akhirnya mengambil sikap, dengan warga Gili Meno dan Walhi Nasional sebagai pendorong utama perubahan. PT TCN ditempatkan sebagai aktor problematis, sementara Pemkab Lombok Utara berada dalam sorotan untuk segera mengambil langkah konkret. Narasi ini mencerminkan titik balik dalam konflik antara kepentingan investasi dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan akses air bersih.

## 3. Struktur Tematik

Berita ini menyusun narasi tematik yang menyoroti desakan politik dan masyarakat untuk menghentikan kerja sama antara pemerintah dan PT TCN terkait pengelolaan air bersih di Gili Meno. Paragraf awal menampilkan pernyataan tegas dari DPRD Lombok Utara, khususnya anggota Fraksi Gerindra, Nasrudin, yang meminta penghentian kerja sama karena adanya pelanggaran oleh PT TCN. Kutipan langsung dari Nasrudin dalam paragraf

berikutnya memperkuat kritik terhadap sikap pasif Pemkab dan menegaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Kritik tersebut diperluas oleh Ferry Widodo dari Walhi Nasional, yang menilai bahwa kerja sama itu melanggar prinsip-prinsip hukum lingkungan dan menuntut penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Narasi kemudian dilengkapi dengan latar belakang aksi protes warga Gili Meno yang telah lebih dulu melaporkan krisis air dan pencemaran lingkungan kepada DPRD. Secara tematik, berita ini menyatukan tekanan dari lembaga legislatif, organisasi lingkungan, dan masyarakat sipil, yang secara bersama-sama menuntut penghentian kerja sama yang dianggap merugikan lingkungan dan mengabaikan hak dasar warga atas air bersih.

#### 4. Struktur Retoris

Berita menggunakan kata-kata yang menekankan fakta mengenai pelanggaran lingkungan dan krisis air berkepanjangan. "Dugaan pencemaran lingkungan oleh PT TCN di Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air" menyatakan cakupan luas dugaan kerusakan lingkungan. "Kami sudah meminta dokumen... sejak beberapa tahun lalu" menjelaskan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah. "Sampai sekarang belum ada kejelasan dari pemda" menunjukkan lambannya respons pemerintah terhadap permintaan informasi publik. "Harus segera dihentikan" dan "tidak bisa diam ketika... merusak lingkungan" menunjukkan desakan. "Tidak dimasukkannya UU PPLH sebagai dasar hukum" menunjukkan kelemahan hukum. "Kerja sama itu bertentangan dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan" menunjukkan kritik. "Krisis air bersih... selama tujuh bulan" menekankan pada lamanya masalah dan ketidakmampuan menyelesaikannya. "Warga... telah mencapai titik kritis menghadapi krisis air" menyampaikan situasi sosial-ekonomi yang genting

Pada artikel berita ini terdapat foto, foto tersebut memperlihatkan pertemuan antara warga Gili Meno dan DPRD Lombok Utara pada 14 November 2024. Dalam forum itu, warga menyuarakan desakan agar Pemda menghentikan kerja sama dengan PT Tiara Citra Nirwana (TCN) karena dugaan

pencemaran lingkungan di tiga Gili dan krisis air bersih yang makin parah. DPRD menanggapi dengan komitmen meninjau ulang kontrak KPBU dan menambah distribusi air bersih. Pertemuan ini mencerminkan meningkatnya tekanan masyarakat terhadap pemerintah untuk menyelesaikan krisis air dan menegakkan perlindungan lingkungan.

#### 4.3 Hasil Analisis Framing SUARANTB.com dan Detik.com

Berdasarkan hasil ringkasan yang telah dilakukan peneliti dari penulisan artikel berita oleh media lokal SUARANTB.com dan media nasional detik.com yang membahas mengenai fenomena krisis air bersih yang terjadi di Kepulauan Gili Lombok Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menganalisis pembingkai pemberitaan terkait artikel berita dari SUARANTB.com dan detik.com mengenai krisis air bersih yang terjadi di Tiga Gili, Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti melalui media lokal SUARANTB.com dan media nasional detik.com, kedua media tersebut menunjukkan sudut pandang serta metode yang berbeda dalam membingkai peristiwa yang terbagi ke dalam empat struktur, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Pembingkai berita dari media lokal dan media nasional tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.21 Hasil Analisis Perbandingan 2 Media

Struktur	SUARANTB.com	detik.com
Struktur Sintaksis	Judul menggunakan diksi langsung dan tegas seperti "krisis", "tuntutan", "demo", "tolak", "defense", "tanpa solusi". Lead fokus pada aksi (demo, petisi, lobi), penderitaan warga atau pelaku usaha, dan lambannya respons pemerintah. Latar Informasi menyebut durasi krisis, kerugian ekonomi, ketergantungan pada PT TCN, dan lemahnya penanganan struktural. Kutipan narasumber didominasi oleh pihak warga, PHRI, DPRD, atau aktivis lingkungan. Jarang menyajikan pandangan berimbang dari pihak pemerintah pusat atau PT TCN.	Judul menggunakan kata yang provokatif dan emosional, menyoroti penderitaan warga/pelaku usaha atau tekanan terhadap pemerintah. Misalnya, "Pelaku Wisata Menjerit", "DPRD Desak Pemkab Putus Kontrak PT TCN". Lead langsung menyebut krisis air sebagai isu utama, lengkap dengan lamanya krisis dan dampaknya, misalnya "sudah 7 bulan...". Latar Belakang menjelaskan asal muasal krisis, yakni pencabutan izin PT TCN, pemutusan aliran air, tidak adanya distribusi, serta ketimpangan antar wilayah, yakni Trawangan vs. Meno.

	<p>Sumber yang dominan, yakni warga, pelaku usaha, DPRD, aktivis lingkungan. Kehadiran suara lokal ini menunjukkan kuatnya nilai berita proximity, baik secara geografis maupun psikologis, karena media ini berada di dalam lingkup masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis, sehingga memiliki kepedulian dan ikatan emosional yang lebih besar terhadap isu yang diberitakan. Tidak ada opini penulis. Penutup Berita biasanya berupa penegasan posisi narasumber, desakan solusi, atau harapan masyarakat.</p> <p>What: Krisis air bersih berulang di Gili Tramen, ditambah kerusakan lingkungan akibat pengeboran oleh pihak swasta.</p> <p>Who: warga, pelaku usaha (PHRI, IHGMA), mahasiswa, WALHI, PT TCN, pemerintah (Pemda, Pemprov, KKP, PDAM). SuaraNTB.com menampilkan banyak suara akar rumput dan pemangku kebijakan.</p> <p>When: terjadi sejak awal 2024 hingga pertengahan tahun (berita Juni–Oktober), dengan momen penting seperti, yakni pencabutan izin (27 Sep), demo Pj Gubernur (1 Juli), dan musyawarah warga (16 Juni).</p> <p>Where: Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air (Gili Tramen) sebagai pusat krisis, dan Mataram sebagai lokasi aksi dan kebijakan.</p> <p>Why: alasan krisis air, yakni ketergantungan pada perusahaan swasta, lemahnya solusi dari pemerintah, pelanggaran izin, dan konflik antara kebutuhan dasar vs kepentingan lingkungan atau komersial.</p> <p>How: respons bervariasi, yakni warga demo dan musyawarah, Pemda distribusi darurat dan lobi pusat, Pelaku usaha bertahan dengan cara darurat Solusi besar tertunda karena perjanjian hukum dan izin.</p>	<p>Sumber dan kutipan didominasi oleh warga (Masrun), pelaku wisata (Kusnawan), aktivis (Walhi), dan DPRD; pemerintah dikutip singkat dan normatif. Tidak ada opini. Penutup umumnya berupa janji normatif atau rencana rapat dari pemerintah; tidak ada solusi konkret.</p> <p>What: Krisis air bersih berkepanjangan dan pencemaran laut akibat aktivitas perusahaan penyulingan air laut (PT TCN &amp; PT BAL).</p> <p>Where: Gili Meno, Gili Trawangan, dan Gili Air — Kabupaten Lombok Utara, NTB.</p> <p>When: Oktober 2024 hingga Januari 2025.</p> <p>Who: Warga Gili Tramen, pelaku usaha (GHA), PT TCN dan PT BAL, Pemkab Lombok Utara, Pemprov NTB, Kementerian KKP, PDAM, DPRD Lombok Utara, Walhi Nasional dan NTB.</p> <p>Why: Pencabutan izin PT TCN &amp; PT BAL oleh KKP karena pencemaran laut, tanpa solusi distribusi alternatif air bersih.</p> <p>How: Warga beli air isi ulang dengan harga tinggi, berebut pasokan dengan hotel, wisatawan membatalkan booking; warga protes ke DPRD; DPRD desak Pemkab bertindak.</p>
Struktur Skrip		
Struktur Tematik	<p>Krisis air bersih di Kepulauan Gili sebagai isu multidimensional, menyangkut aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik.</p>	<p>Krisis air bersih di Kepulauan Gili sebagai isu yang mencakup aspek teknis, ekologis, sosial, dan politik.</p>
Struktur Retoris	<p>Memaksimalkan pemilihan kata yang emosional seperti krisis, darurat, sangat mengkhawatirkan, trauma, ancaman, tidak ada solusi konkret, kami sudah capek, angka</p>	<p>Menggunakan diksi yang emosional seperti "menjerit", "sudah sekarat", "krisis berkepanjangan", "tidak bisa bertahan lagi", "darurat air</p>

<p>konkret Rp10–15 juta per hari, 1660 m<sup>2</sup> konservasi laut rusak, 4.000–5.000 orang terancam PHK, 54.000 liter air ideal, dan metafora seperti Covid jilid 2.</p>	<p>bersih", "berebut air", "kami menuntut hak kami". Menggunakan angka seperti "kerugian Rp 3,5 juta per hari", "kerugian total Rp 8 miliar", "PHK terhadap hampir 4.000 pekerja", "260 kepala keluarga kesulitan", "7 bulan krisis". Melancarkan kritik terhadap korporasi seperti "Belum ada solusi konkret", "Pemda belum merespons", "PT TCN terus beroperasi meski izinnnya dicabut".</p>
---	--

Berdasarkan hasil tabel diatas, terlihat adanya perbedaan dalam cara masing-masing media lokal SUARANTB.com dan media nasional detik.com membingkai isu krisis air bersih yang terjadi di Kepulauan Gili Lombok Nusa Tenggara Barat dalam periode bulan Juni 2024 – Februari 2025. Dalam membandingkan pemberitaan krisis air bersih di Kepulauan Gili antara SUARANTB.com dan detik.com, tampak jelas bahwa masing-masing media menempatkan fokus yang berbeda dalam penyampaian narasinya. Perbedaan ini terlihat dari cara keduanya membangun struktur berita, baik secara sintaksis, skrip, tematik, maupun retorik.

Pada struktur sintaksis, SUARANTB.com cenderung memilih judul yang jelas, tegas, dan langsung mengarah pada inti permasalahan, dengan pemilihan kata seperti "krisis", "tuntutan", "demo", atau "tanpa solusi". Lead berita menyoroti aksi nyata dari masyarakat, seperti demonstrasi, petisi, dan musyawarah, serta penderitaan warga yang terus berlanjut akibat lambannya respons dari pemerintah. Kutipan narasumber dalam berita-berita SUARANTB.com menunjukkan lokalitasnya dengan menghadirkan sumber-sumber dari warga lokal, pelaku usaha di NTB, serta aktivis dan DPRD daerah. Pemberitaannya menggambarkan krisis sebagai hasil dari kebijakan yang keliru dan kegagalan sistemik dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Sementara itu, pandangan dari pihak pemerintah pusat atau perusahaan seperti PT TCN hanya disinggung secara terbatas atau tidak mendalam. Penutup berita umumnya memperkuat pernyataan atau posisi narasumber dengan menegaskan desakan akan solusi atau harapan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Sebaliknya, detik.com tampil lebih emosional dan dramatik, mengangkat penderitaan manusia sebagai headline, seperti dalam judul

“Pelaku Wisata Menjerit”, dan menyusun konflik dalam format yang cepat, ringkas, dan menggugah perasaan pembaca untuk menarik perhatian pembaca dengan cepat. Lead berita Detik.com langsung menyebutkan krisis air sebagai isu utama dan menekankan pada lamanya krisis serta dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah biasanya hanya dikutip secara singkat dan normatif tanpa penjelasan lebih lanjut, sementara bagian penutup berita umumnya hanya berisi rencana rapat atau pernyataan yang belum jelas dari pihak berwenang tanpa menyampaikan solusi konkret.

Dalam struktur skrip, SUARANTB.com menyajikan narasi yang kompleks dan sistematis, membangun hubungan sebab-akibat yang menjelaskan akar masalah hingga dampaknya. Krisis air ditelusuri dari pencabutan izin, lemahnya solusi pemerintah, hingga konflik antara kebutuhan dasar dan komersialisasi pariwisata. Media ini menekankan beberapa momen penting, seperti pencabutan izin PT TCN pada 27 September, aksi demonstrasi masyarakat pada 1 Juli, serta musyawarah warga pada 16 Juni. Rangkaian peristiwa tersebut disajikan dengan cara yang sistematis dan komprehensif, mengaitkan dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Lokasi pemberitaan tidak hanya terfokus pada daerah Gili Tramena, tetapi juga mencakup Mataram sebagai pusat pengambilan keputusan pemerintah daerah dan provinsi. SUARANTB.com juga menyelidiki penyebab krisis secara mendalam, mulai dari ketergantungan pada perusahaan swasta, lemahnya pengawasan lingkungan, hingga kebijakan publik yang belum berpihak kepada masyarakat. Respons yang ditampilkan mencakup aksi warga, distribusi air darurat oleh pemerintah, serta berbagai kendala hukum dan administratif yang menghalangi solusi jangka panjang. Di sisi lain, Detik.com menyoroti krisis air dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga Januari 2025 dengan fokus utama pada pencabutan izin perusahaan penyedia air bersih, tidak adanya distribusi air bersih, serta dampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Detik.com lebih menekankan pada respons langsung terhadap krisis, seperti pembelian air bersih dengan harga tinggi, kerugian ekonomi pelaku wisata, dan desakan DPRD kepada pemerintah, tanpa banyak menjelaskan proses struktural yang melatarbelakanginya. Aktor-aktor yang diangkat dalam pemberitaan mencakup warga, DPRD, Walhi, dan perusahaan swasta seperti PT TCN dan PT BAL. Meskipun latar belakang disajikan dengan

cukup lengkap, fokus utama pemberitaan Detik.com tetap tertuju pada dampak langsung krisis, seperti pembatalan reservasi wisatawan dan perebutan pasokan air bersih. Penyebab krisis cenderung disederhanakan, yaitu pencemaran laut oleh perusahaan dan kurangnya solusi konkret dari pemerintah.

Dalam struktur tematik, SUARANTB.com memandang krisis air sebagai cermin kegagalan tata kelola daerah, menyentuh dimensi sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa SUARANTB.com sebagai media lokal tidak hanya memandang masalah dari sudut pandang teknis atau dampak semata, tetapi juga menyoroti akar permasalahan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan air yang lemah serta minimnya partisipasi dan perlindungan terhadap masyarakat lokal. Sebaliknya, Detik.com memusatkan narasinya pada penderitaan masyarakat akibat krisis, menjadikannya lebih sebagai kisah tentang kegagalan teknis dan tekanan sosial, tanpa terlalu menyentuh aspek struktural dan politik. Tema-tema yang diangkat oleh Detik.com lebih menekankan pada sisi emosional dan dramatis dari krisis, tanpa menyelidiki secara mendalam struktur penyebab atau menawarkan narasi solusi jangka panjang seperti yang dilakukan oleh SUARANTB.com.

Pada struktur retorik, SUARANTB.com menggunakan pendekatan yang berbasis data dan fakta, menyampaikan informasi secara terukur dan analitis, didukung oleh data konkret untuk memperkuat kesan urgensi terkait krisis air bersih di Kepulauan Gili. Istilah seperti "krisis", "darurat", "ancaman", serta metafora seperti "Covid jilid 2" digunakan untuk menggambarkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Di sisi lain, Detik.com juga menerapkan gaya retorik yang serupa dengan penggunaan diksi yang sangat emosional seperti "sudah sekarat", "berebut air", dan "kami menuntut hak kami", untuk menarik perhatian pembaca dan menggugah emosi. Detik.com juga menyertakan angka statistik, seperti "kerugian Rp 3,5 juta per hari" dan "260 kepala keluarga kesulitan air", untuk menunjukkan besarnya dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Sementara itu, detik.com lebih populis dan emosional, menggunakan diksi yang menggugah simpati dan membangkitkan empati publik terhadap penderitaan warga Gili. Kritik dalam pemberitaan Detik.com diarahkan secara langsung kepada pihak

perusahaan dan pemerintah yang dianggap belum memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada.

Dalam konteks jurnalisme lingkungan yang dikemukakan oleh Agustina (2019), Iqbal et al. (2020), Reziana dan Sobur (2023), serta Yanuary & Gumilar (2018), pemberitaan krisis air bersih di Gili Tramena oleh SuaraNTB.com dan Detik.com menunjukkan perbedaan orientasi yang penting dalam praktik jurnalistiknya. SuaraNTB.com secara lebih konsisten menunjukkan karakteristik jurnalisme lingkungan sebagaimana dijelaskan oleh Agustina (2019) dan Ana Nadhya Abrar (2018). Media ini tidak hanya melaporkan krisis sebagai fenomena sesaat, tetapi membingkai isu sebagai akumulasi dari kegagalan tata kelola lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta lemahnya peran negara dalam pengawasan dan penegakan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Abrar (2018), bahwa jurnalisme lingkungan mengikuti isu dari awal hingga akhir, menelusuri penyebab, proses, hingga solusi yang diperlukan secara struktural dan sistematis

SUARANTB.com, yang berakar kuat di Nusa Tenggara Barat, membingkai krisis air bersih di Kepulauan Gili sebagai persoalan serius, tidak hanya dari sisi penderitaan warga, tetapi juga menggali akar permasalahan secara struktural seperti ketergantungan masyarakat pada perusahaan swasta seperti PT TCN, lemahnya pengawasan lingkungan, serta lambannya respons pemerintah daerah dan pusat. Melalui struktur skrip dan latar narasi yang kompleks, SUARANTB menggarisbawahi kerusakan lingkungan akibat pengeboran, ketergantungan pada korporasi air, serta konflik antara kebutuhan dasar masyarakat dengan kepentingan komersial pariwisata. Dalam hal ini, SUARANTB mengambil peran seperti yang dijelaskan oleh Iqbal et al. (2020), yaitu sebagai penggerak kesadaran publik dan agen kontrol sosial yang mendorong partisipasi warga dalam menyuarakan hak atas lingkungan hidup yang adil.

Lebih jauh, SUARANTB juga mengangkat elemen-elemen penting jurnalisme lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Yanuary & Gumilar (2018), yaitu kerusakan lingkungan akibat pengeboran oleh PT TCN; eksploitasi sumber daya alam, khususnya air dan kawasan pesisir; konservasi, dengan menyebut luasan laut yang rusak dan potensi hilangnya keanekaragaman hayati laut. Dengan

pendekatan yang mendalam, berbasis data, serta memberi ruang pada aktivis dan warga, SUARANTB tampil sebagai media yang berpihak pada keadilan ekologis dan keberlanjutan yang merupakan esensi utama dari jurnalisme lingkungan.

Kehadiran suara lokal ini menunjukkan kuatnya nilai berita proximity, baik secara geografis maupun psikologis, karena media ini berada di dalam lingkup masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis, sehingga memiliki kepedulian dan ikatan emosional yang lebih besar terhadap isu yang diberitakan. Pendekatan ini juga mencerminkan praktik jurnalisme lingkungan, di mana media tidak hanya menyampaikan peristiwa, tetapi turut mengedukasi publik, menyuarakan kepentingan dan mendorong tanggung jawab pemerintah terhadap kelestarian sumber daya air.

Sebaliknya, Detik.com cenderung menempatkan krisis ini sebagai kisah penderitaan manusia yang dramatis dan emosional. Judul-judul seperti “Pelaku Wisata Menjerit” atau “Sudah Sekarat” menggambarkan pendekatan yang berfokus pada sensasi dan simpati pembaca, bukan pada analisis mendalam terhadap akar masalah ekologis. Narasinya ringkas, mengandalkan kutipan normatif dan keluhan warga, dan kurang menelusuri dimensi konservasi atau struktur kebijakan yang rusak. Meskipun Detik.com tidak mengabaikan keberadaan isu lingkungan, seperti pencemaran laut dan pencabutan izin, penyampaiannya lebih sebagai latar belakang dari penderitaan warga. Dalam kerangka jurnalisme lingkungan seperti dijelaskan oleh Reziana dan Sobur (2023), pendekatan ini kurang mencerminkan peran media sebagai instrumen advokasi ekologis, karena tidak membangun kesadaran kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan. Pemberitaan lebih diarahkan untuk membangkitkan empati terhadap dampak sosial, bukan mendorong perubahan struktural atas kerusakan lingkungan.

Dengan membandingkan kedua media dalam konteks konsep jurnalisme lingkungan, dapat disimpulkan bahwa SUARANTB.com merepresentasikan praktik jurnalisme lingkungan yang ideal, karena menyuarakan kepentingan ekologis, menampilkan isu dari hulu ke hilir, dan mengajak publik untuk memahami akar permasalahan serta solusi sistemik. Detik.com lebih menonjolkan jurnalisme berbasis human interest, yang meskipun penting dalam membangun empati, cenderung mengesampingkan dimensi struktural dan ekologis dari krisis.

Namun, dalam isu krisis air dan kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di Gili Tramena, peran jurnalisme lingkungan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak hanya dipahami sebagai tragedi sosial semata, tetapi juga sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya dan kelalaian kebijakan. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Larasati & Gani (2021), media seharusnya menciptakan ruang dialog untuk membahas dampak dan solusi lingkungan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, SUARANTB.com telah menjalankan peran tersebut dengan lebih konsisten.

